



jogja
istimewa



Rancangan Akhir

RENSTRA **2022 - 2027**

Rencana Strategis

**Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Daerah Istimewa Yogyakarta**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 6

 I. 1. Latar Belakang..... 6

 I. 2. Landasan Hukum..... 7

 I. 3. Maksud dan Tujuan 11

 I. 4. Sistematika Penulisan 11

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 15**

 II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda
 dan Olahraga DIY 15

 II.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 28

 II.2.1. Sumber Daya Manusia..... 28

 II.2.1.1. Sarana Prasarana Instansi 35

 II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 35

 II.3.1. Gambaran Umum 35

 II.3.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 37

 II.3.2.1. Perluasan Dan Pemerataan Peserta Didik..... 38

 II.3.2.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) 39

 II.3.2.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM) 39

 II.3.2.1.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 41

 II.3.2.2. Kondisi Mutu dan Kualitas Hasil Belajar 42

 II.3.2.2.1 Capaian Literasi dan Numerasi Berdasar
 Hasil Asesmen Nasional..... 42

 II.3.2.2.2. Kualitas Pendidik dan Tenaga
 Kependidikan..... 44

 II.3.2.3. Kondisi Relevansi Pendidikan 47

 II.3.3. Kondisi Kepemudaan dan Olahraga..... 48

 II.3.3.1. Kepemudaan 49

 II.3.3.2. Keolahragaan 49

 II.3.4. Capaian Kinerja Tahun 2022 50

 II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 51

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 64

 III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan Perangkat Daerah..... 64

 III.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan
 Wakil Kepala Daerah..... 70

 III.3. Telaahan Renstra K/L..... 75

 III.3.1. Telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan
 Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 (Bappenas)..... 75

III.3.2. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.....	77
III.3.3. Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga	97
III.3.3.1. Kepemudaan.....	99
III.3.3.2. Keolahragaan.....	100
III.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)	101
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis	103
III.5.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	103
III.5.1.1. Capaian Layanan Partisipasi Peserta Didik.....	104
III.5.1.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	107
III.5.2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;	109
III. 5.2.1. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	109
III.5.3. Penetapan Isu-Isu Strategis.....	125
III.5.6.1. Partisipasi dan Pemerataan Pendidikan	125
III.5.6.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan	125
III.5.6.3. Relevansi Pendidikan	127
III.5.6.4. Penguatan Kepemudaan.....	127
III.5.6.5. Pembinaan Keolahragaan	128
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	129
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	133
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	138
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	176
BAB VIII PENUTUP	178

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pembagian Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan..... 15

Tabel 2.2. Daftar Sekolah Menengah Atas (SMA) di DIY..... 22

Tabel 2.3. Daftar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di DIY 24

Tabel 2.4. Daftar Sekolah Luar Biasa (SLB) di DIY 26

Tabel 2.5. Jumlah SDM Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Berdasar Pendidikan..... 28

Tabel 2.6. Jumlah SDM Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Berdasar Usia..... 31

Tabel 2.7. Aset Barang Modal Dinas Dikpora DIY 35

Tabel 2.8. Kondisi Demografi Penduduk DIY 36

Tabel 2.9. Kondisi kemiskinan DIY dibandingkan dengan kondisi nasional ... 37

Tabel 2.10. Jumlah Pendidik Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah Menurut Latar Belakang Pendidikan (Tahun 2022) 44

Tabel 2.11. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah Berdasar Status kepegawaian (Tahun 2022)..... 45

Tabel 2.12. Jumlah Pendidik dan Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus Menurut Latar Belakang Pendidikan (Tahun 2022) 46

Tabel 2.13. Jumlah Pendidik dan Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus Yang Memiliki Sertifikasi Pendidik (Tahun 2022) 46

Tabel 2.14. Jumlah Pendidik dan Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus Berdasar Status Kepegawaian (Tahun 2022) 47

Tabel 2.15. Kondisi Relevansi Pendidikan di DIY pada Jenjang SMK..... 48

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Sasaran OPD..... 50

Tabel 2.17. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... 51

Tabel 2.18. Kekuatan, Kesempatan, Keinginan dan Hasil (Analisis SWOT)..... 56

Tabel 2.19. Analisa SOAR Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY 60

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Bidang Pendidikan Tahun 2022-2027 74

Tabel 3.2. Visi dan Misi RPJMN 2020-2024 75

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendikbud pada tahun 2020-2024..... 78

Tabel 3.4. Agenda Pembangunan RPJMD 2020-2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kemendikbud 79

Tabel 3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbudristek Periode 2020-2024..... 82

Tabel 3.6. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Kemendikbudristek Tahun 2020-2024 96

Tabel 3.7. Capaian DIY dalam SDG's di bidang Pendidikan dari Tahun 2020 – 2021.....102

Tabel 3.8. Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022108

Tabel 3.9. Sasaran Strategis, Indikator, dan target Kinerja Kemendikbudristek Tahun 2020-2024110

Tabel 3.10. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Kemendikbudristek Tahun 2021-2024111

Tabel 3.11. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kemenpora
Tahun 2020-2024119

Tabel 3.12. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kemenpora Tahun
2020-2024.....120

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Tahun 2022-2027130

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Dikpora DIY
Tahun 2022-2027133

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Dikpora
Tahun 2022-2027139

Tabel 7.1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Urusan
Kepemudaan dan Olahraga176

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY 18

Gambar 2.2. Bagan Susunan Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik 19

Gambar 2.3. Bagan Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan 19

Gambar 2.4. Bagan Susunan Organisasi Balai Pemuda dan Olahraga 20

Gambar 2.5. Bagan Susunan Organisasi Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo 20

Gambar 2.6. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), dan Sekolah Luar Biasa (SLBN) 20

Gambar 2.7. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021..... 39

Gambar 2.8. Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021..... 40

Gambar 2.9. Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2017-2022 di tiap kabupaten/kota DIY 41

Gambar 2.10. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua Jenjang di DIY tahun 2017-2021 41

Gambar 2.11. Capaian Literasi dan Numerasi Hasil ANBK Jenjang SMA dan SMK di DIY Tahun 2022 43

Gambar 3.1. Proporsi Anak Kelas 9 di Atas Standar Minimum Kemampuan Matematika, Sains, dan Membaca pada Tes PISA..... 77

Gambar 3.2. Profil Pelajar Pancasila..... 78

Gambar 3.3. Kebijakan Merdeka Belajar 81

Gambar 3.4. Status Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2021102

Gambar 3.5. Capaian APK Pendidikan DIY Tahun 2012-2022104

Gambar 3.6. Capaian APM Pendidikan DIY Tahun 2012-2022105

Gambar 3.7. Capaian APS Pendidikan DIY Tahun 2012-2022.....106

Gambar 3.8. Angka mengulang DIY Tahun 2012-2022106

Gambar 3.9. Angka putus sekolah DIY Tahun 2012-2022107

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Filosofi yang menjadi dasar bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjaga keselamatan dunia terangkum dalam "Hamemayu Hayuning Bawana". Filosofi ini merupakan dasar untuk merealisasikan tujuan mulia dalam mengatur nilai-nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan dengan dasar nilai-nilai budaya. Salah satu prioritas utama yang perlu ditekankan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada tercapainya peradaban baru yang unggul yang menghasilkan 'Manusia yang utama' (*jalma kang utama*), yang berasaskan '*rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan*'. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat *renaissance* di D.I. Yogyakarta.

Istilah Renaissance dalam pendidikan tidak hanya diartikan sebagai proses akademik belajar-mengajar yang hanya menekankan nilai-nilai akademik, tetapi lebih dari itu. Pendidikan harus dianggap sebagai proses yang lengkap, termasuk pendidikan karakter, proses enkulturasi, dan akulturasi budaya sebagai bagian dari pembentukan karakter individu.

Berkenaan dengan hal tersebut, tentunya pada kurun waktu perencanaan jangka menengah Tahun 2022-2027 perlu upaya nyata Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan jangka menengah yang nyata mampu mewujudkan program/kegiatan pembangunan pendidikan yang konkret dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut perlu diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih baik dengan tetap mengedepankan keistimewaan sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta menjunjung tinggi semangat *renaissance*.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 menjadi salah satu tahapan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa

Yogyakarta di Bidang Pendidikan guna mewujudkan ***Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Dalam mewujudkan semangat pembangunan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 secara lebih baik, serta mengawali penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 diperlukan kerangka pendekatan analisis yang lebih holistik, tematik, integratif serta memperhatikan lokus pembangunan pendidikan secara tepat dan jelas yang diwujudkan melalui pendekatan spasial (berbasis kewilayahan).

I. 2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 – 2027, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis

- Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 30. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 10);
 31. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
 32. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);
 33. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5)
 34. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, Dan/Atau Bakat Istimewa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 35. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Nilai-Nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 134).

I. 3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Tahun 2022-2027, sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (Renja) antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2027;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY antara tahun 2022 sampai tahun 2027;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh bidang teknis dan UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi dan pengawasan bagi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
5. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Bidang Teknis Pelaksana dan UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan; dan
6. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

I. 4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, serta penyebab harus dilakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, *asset*/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti *MDGs* atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang disajikan dalam tabel. Tabel di atas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, termasuk didalamnya perubahan yang dilakukan. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel berikut ini.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

II.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pembagian Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat		Daerah Provinsi		Daerah Kabupaten/ Kota	
1	Manajemen Pendidikan	a.	Penetapan standar nasional Pendidikan	a.	Pengelolaan pendidikan menengah	a.	Pengelolaan pendidikan dasar
		b.	Pengelolaan pendidikan tinggi	b.	Pengelolaan pendidikan khusus	b.	Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal		Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus		Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal		---		---	
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a.	Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota	
		b.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi				
5	Perizinan Pendidikan	a.	Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat	a.	Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	a.	Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
		b.	Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	b.	Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	b.	Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia		Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota	
Sumber data : UU 23/2014							

Amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Dikpora DIY diatur lebih lanjut dalam

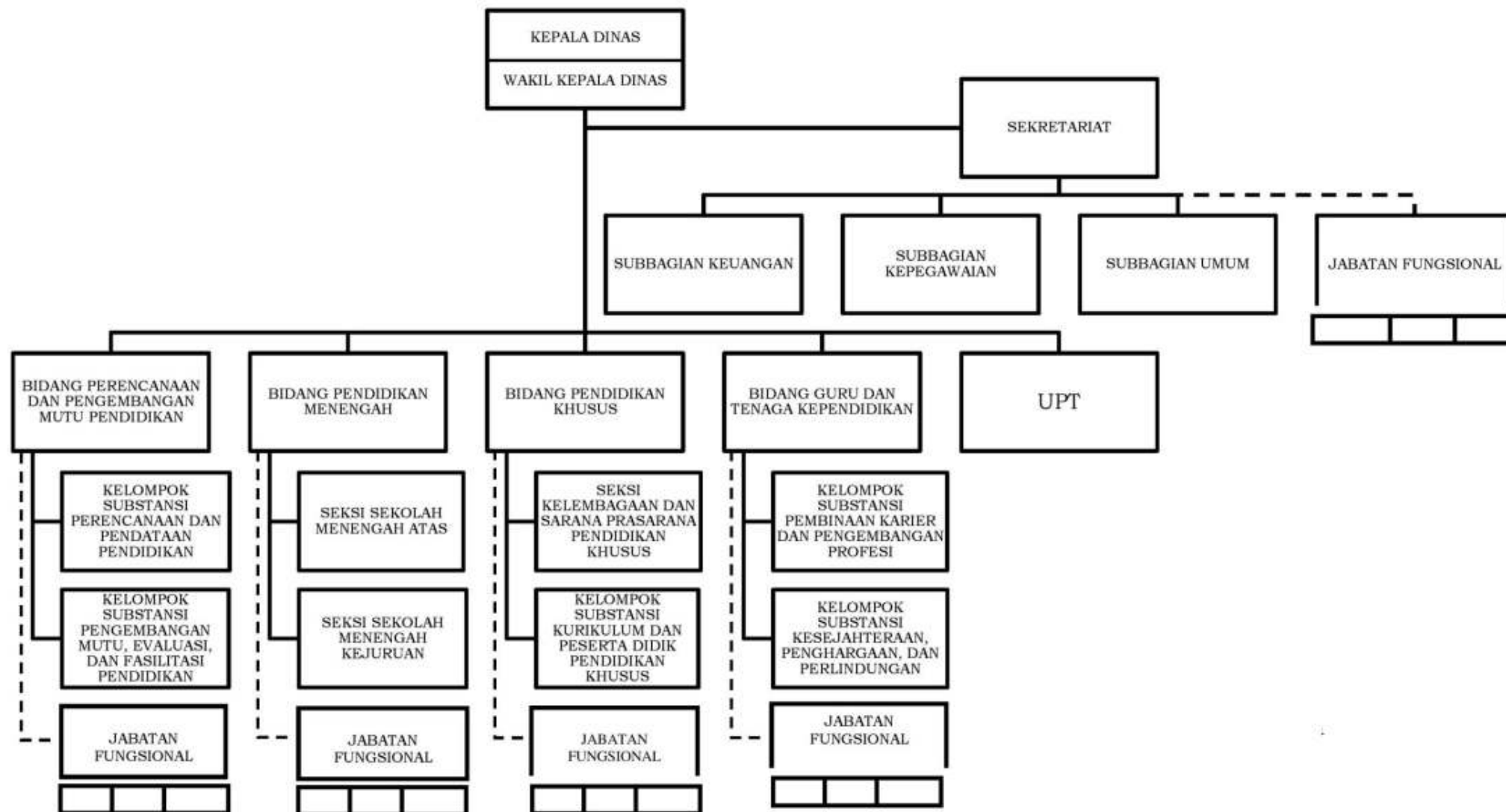
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2021, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga;
- c. penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- d. penyediaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- e. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus;
- f. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- h. pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- i. penyusunan silabus dan buku teks pelajaran/modul pembelajaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- j. penyediaan kebijakan daerah tentang pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- k. penyusunan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan per mata pelajaran, per jenjang, dan per satuan pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- l. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi berdasarkan perhitungan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- m. penerbitan rekomendasi penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- n. penyediaan kebijakan daerah tentang pembinaan bahasa dan sastra jawa daerah yang penuturnya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal;

- o. pembinaan bahasa dan sastra jawa daerah yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi di satuan pendidikan formal;
- p. pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan melalui pendidikan;
- q. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- r. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- t. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- u. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY memiliki bagan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mengatur bahwa terdapat 8 (delapan) Balai, 69 (enam puluh sembilan) SMA Negeri, 49 (empat puluh sembilan) SMK negeri, dan 9 (Sembilan) SLB Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Dikpora DIY.

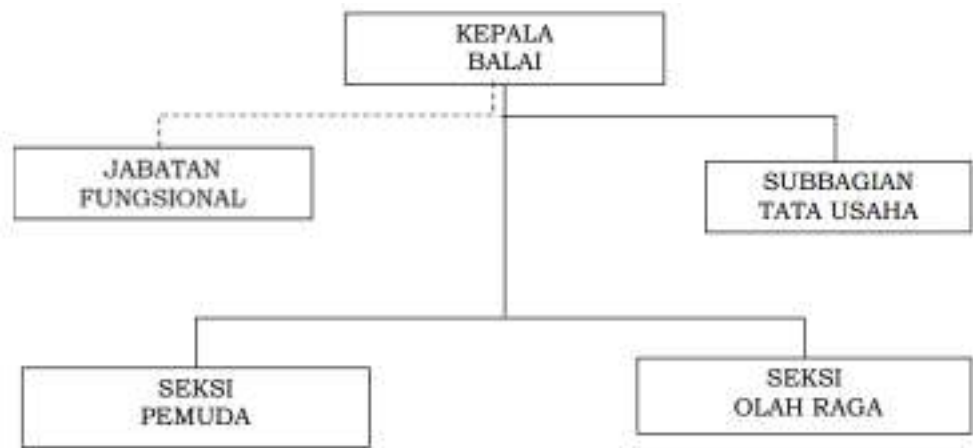
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai UPT pada Dinas Dikpora DIY, telah disusun bagan organisasi pada masing-masing UPT sebagai berikut:



Gambar 2.2. Bagan Susunan Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik



Gambar 2.3. Bagan Susunan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan



Gambar 2.4. Bagan Susunan Organisasi Balai Pemuda dan Olahraga



Gambar 2.5. Bagan Susunan Organisasi Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo



Gambar 2.6. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), dan Sekolah Luar Biasa (SLBN)

Dengan dilimpahkannya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus ke daerah provinsi maka Dinas Dkpora DIY memiliki kewajiban terhadap pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Di wilayah DIY, terdapat 169 (seratus enam puluh sembilan) SMA, 214 (dua ratus empat belas) SMK, dan 79 (tujuh puluh sembilan) SLB. Dari data tersebut, satuan

pendidikan (sekolah) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau sekolah negeri sebesar 49 (empat puluh sembilan) SMA Negeri, 69 (enam puluh sembilan) SMK Negeri dan 9 (sembilan) SLB Negeri.

Selain itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan pendidikan vokasi yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY mendorong sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berdasarkan Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola BLUD SMK yang diterbitkan oleh Pusat Standarisasi dan Sertifikasi Kelompok Kerja Kemendikbudristek. Pembentukan BLUD menjadi penting bagi SMK yang telah berhasil mengembangkan fasilitas Teaching Factory-nya, sehingga produk yang dihasilkan oleh siswa tidak hanya berkualitas baik dari sisi praktik, tetapi juga dapat memenuhi standar industri yang ada. Hingga saat ini, terdapat 4 SMK BLUD yang sudah beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu SMK Negeri 6 Yogyakarta, SMK Negeri 1 Sewon, SMK Negeri 3 Wonosari, dan SMK Negeri 5 Yogyakarta. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY terus mendorong upaya penambahan SMK menjadi BLUD dengan tetap mengedepankan dan memenuhi prinsip-prinsip pola tata kelola atau peraturan internal yang baik (*good governance*) yang memuat struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Tabel 2.2. Daftar Sekolah Menengah Atas (SMA) di DIY

Bantul		Gunung Kidul		Kulon Progo		Sleman		Yogyakarta	
1	SMA Negeri 1 Banglilipuro	1	SMA Negeri 1 Panggang	1	SMA Negeri 1 Galur	1	SMA Negeri 1 Cangkringan	1	SMA Negeri 1 Yogyakarta
2	SMA Negeri 1 Banguntapan	2	SMA Negeri 1 Patuk	2	SMA Negeri 1 Girimulyo	2	SMA Negeri 1 Depok	2	SMA Negeri 2 Yogyakarta
3	SMA Negeri 1 Bantul	3	SMA Negeri 1 Playen	3	SMA Negeri 1 Kalibawang	3	SMA Negeri 1 Gamping	3	SMA Negeri 3 Yogyakarta
4	SMA Negeri 1 Dlingo	4	SMA Negeri 1 Rongkop	4	SMA Negeri 1 Kokap	4	SMA Negeri 1 Godean	4	SMA Negeri 4 Yogyakarta
5	SMA Negeri 1 Imogiri	5	SMA Negeri 1 Semanu	5	SMA Negeri 1 Lendah	5	SMA Negeri 1 Kalasan	5	SMA Negeri 5 Yogyakarta
6	SMA Negeri 1 Jetis	6	SMA Negeri 1 Semin	6	SMA Negeri 1 Pengasih	6	SMA Negeri 1 Minggir Sleman	6	SMA Negeri 6 Yogyakarta
7	SMA Negeri 1 Kasihan	7	SMA Negeri 1 Tanjungsari	7	SMA Negeri 1 Samigaluh	7	SMA Negeri 1 Mlati	7	SMA Negeri 7 Yogyakarta
8	SMA Negeri 1 Kretek	8	SMA Negeri 1 Wonosari	8	SMA Negeri 1 Sentolo	8	SMA Negeri 1 Ngaglik	8	SMA Negeri 8 Yogyakarta
9	SMA Negeri 1 Pajangan	9	SMA Negeri 2 Playen	9	SMA Negeri 1 Temon	9	SMA Negeri 1 Ngemplak	9	SMA Negeri 9 Yogyakarta
10	SMA Negeri 1 Piyungan	10	SMA Negeri 2 Wonosari	10	SMA Negeri 1 Wates	10	SMA Negeri 1 Pakem	10	SMA Negeri 10 Yogyakarta
11	SMA Negeri 1 Pleret	11	SMA Baitul Qur`An Yogyakarta	11	SMA Negeri 2 Wates	11	SMA Negeri 1 Prambanan	11	SMA Negeri 11 Yogyakarta
12	SMA Negeri 1 Pundong	12	SMA Buahati Islamic School Yogyakarta	12	SMA ITAl Ghifari Kulon Progo	12	SMA Negeri 1 Seyegan	12	SMA 17 I Yogyakarta
13	SMA Negeri 1 Sanden	13	SMA Dominikus Wonosari	13	SMA Maarif Wates	13	SMA Negeri 1 Sleman	13	SMA Islam Darussalam
14	SMA Negeri 1 Sedayu	14	SMA Gotong Royong Semin	14	SMA Muhammadiyah Al Manar Galur	14	SMA Negeri 1 Tempel	14	SMA UII Yogyakarta
15	SMA Negeri 1 Sewon	15	SMA Ikip Veteran Iii Tambakromo	15	SMA Muhammadiyah Wates	15	SMA Negeri 1 Turi	15	SMAS Bhinneka Tunggal Ika
16	SMA Negeri 1 Srandakan	16	SMA Muhammadiyah Al Mujahidin Wonosari	16	SMA Sanjaya Xiv Nanggulan	16	SMA Negeri 2 Ngaglik	16	SMAS Bopkri 1
17	SMA Negeri 2 Banguntapan	17	SMA Muhammadiyah Daarul Khoir Gunungkidul	17	SmalTAbu Bakar Boarding School Kulon Progo	17	SMA Negeri 2 Sleman	17	SMAS Bopkri 2
18	SMA Negeri 2 Bantul	18	SMA Muhammadiyah Ngawen			18	SMA Budi Mulia Dua	18	SMAS Budi Luhur
19	SMA Negeri 3 Bantul	19	SMA Muhammadiyah Ponjong			19	SMA Budi Utama	19	SMAS Budya Wacana
20	SMA 17 Bantul	20	SMA Pembangunan 2 Karangmojo			20	SMA Bumi Cendekia	20	SMAS Gadjah Mada
21	SMA Ali Maksum	21	SMA Pembangunan 3 Ponjong			21	SMA Cahaya Bangsa Utama	21	SMAS Gotong Royong
22	SMA Bopkri Banguntapan	22	SMA Pgri Playen			22	SMA Insan Mulia Boarding School	22	SMAS ITAbu Bakar
23	SMA Dharma Amiluhur	23	SMA Negeri 1 Karangmojo			23	SMA Islam Al Azhar 9 Yogyakarta	23	SMAS ITBina Anak Sholeh
24	SMA ITAr Raihan	24	SMAS Pembangunan I Wonosari			24	SMA Islam Terpadu Baitussalam	24	SMAS Katolik Sang Timur
25	SMA Muhammadiyah Bantul					25	SMA Masa Depan	25	SMAS Ma Arif Yogyakarta
26	SMA Muhammadiyah Imogiri					26	SMA Olifant	26	SMAS Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Bantul		Gunung Kidul		Kulon Progo		Sleman		Yogyakarta	
27	SMA Muhammadiyah Kasihan					27	SMA Sahabatqu	27	SMAS Muhammadiyah 2 Yogyakarta
28	SMA Muhammadiyah Piyungan					28	SMA Sains Wahid Hasyim	28	SMAS Muhammadiyah 3 Yogyakarta
29	SMA Muhammadiyah Pleret					29	SMA Yogyakarta Independent School	29	SMAS Muhammadiyah 4 Yogyakarta
30	SMA Mutiara Persada					30	SMAS Angkasa Adisucipto	30	SMAS Muhammadiyah 5 Yogyakarta
31	SMA Pangudi Luhur Sedayu					31	SMAS Darul Hikmah	31	SMAS Muhammadiyah 6 Yogyakarta
32	SMA Patria Bantul					32	SMAS Dr Wahidin Mlati	32	SMAS Muhammadiyah 7 Yogyakarta
33	SMA Pgri Kasihan					33	SMAS Gama Depok Yogyakarta	33	SMAS Pangudi Luhur
34	SMA Stella Duce Bambanglipuro					34	SMAS Ikip Veteran	34	SMAS Perak
35	SMA Tumbuh					35	SMAS Immanuel Kalasan	35	SMAS Piri 1 Yogyakarta
36	SMAS Muhammadiyah Sewon					36	SMAS Institut Indonesia Berbah	36	SMAS Santa Maria
37	SMA Kesatuan Bangsa					37	SMAS Islam 1 Sleman	37	SMAS Santo Thomas
38	SMA Kesatuan Bangsa					38	SMAS Islam 3 Pakem	38	SMAS Stella Duce 1
						39	SMAS Islam Prambanan	39	SMAS Stella Duce 2
						40	SMAS Kolese De Britto Depok	40	SMAS Sultan Agung
						41	SMAS Kolombo Depok	41	SMAS Taman Madya Ip
						42	SMAS Maarif 1 Sleman	42	SMAS Taman Madya Jetis
						43	SMAS Mandala Bhakti		
						44	SMAS Muhammadiyah 1 Prambanan		
						45	SMAS Muhammadiyah 1 Sleman		
						46	SMAS Muhammadiyah Boarding School (Mbs) Sleman		
						47	SMAS Muhammadiyah Kalasan		
						48	SMAS Muhammadiyah Mlati		
						49	SMAS Muhammadiyah Pakem		
						50	SMAS Santo Mikael Mlati		
						51	SMAS Sulaiman Sleman		
						52	SMAS Sunan Kalijogo		
						53	SMAS Terpadu Bina Umat		

Tabel 2.3. Daftar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di DIY

Bantul		Gunung Kidul		Kulon Progo		Sleman		Yogyakarta	
1	SMK Negeri 1 Bantul	1	SMK Negeri 1 Gedangsari	1	SMK Bopkri 1 Sentolo	1	SMK Negeri 1 Cangkringan	1	SMK Negeri 1 Yogyakarta
2	SMK Negeri 1 Dlingo	2	SMK Negeri 1 Girisubo	2	SMK Bopkri Wates	2	SMK Negeri 1 Depok	2	SMK Negeri 10 Yogyakarta
3	SMK Negeri 1 Kasihan	3	SMK Negeri 1 Ngawen	3	SMK Cipta Insan Mulia	3	SMK Negeri 1 Godean	3	SMK Negeri 11 Yogyakarta
4	SMK Negeri 1 Pajangan	4	SMK Negeri 1 Nglipar	4	SMK Darul Ulum Muhammadiyah Galur	4	SMK Negeri 1 Kalasan	4	SMK Negeri 2 Yogyakarta
5	SMK Negeri 1 Pandak	5	SMK Negeri 1 Ponjong	5	SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia	5	SMK Negeri 1 Seyegan	5	SMK Negeri 3 Yogyakarta
6	SMK Negeri 1 Pleret	6	SMK Negeri 1 Purwosari	6	SMK Kuncup Samigaluh	6	SMK Negeri 1 Tempel	6	SMK Negeri 4 Yogyakarta
7	SMK Negeri 1 Pundong	7	SMK Negeri 1 Saptosari	7	SMK Maarif 1 Kalibawang	7	SMK Negeri 2 Depok	7	SMK Negeri 5 Yogyakarta
8	SMK Negeri 1 Sanden	8	SMK Negeri 1 Tanjungsari	8	SMK Maarif 1 Nanggulan	8	SMK Negeri 2 Godean	8	SMK Negeri 6 Yogyakarta
9	SMK Negeri 1 Sedayu	9	SMK Negeri 1 Wonosari	9	SMK Maarif 1 Temon	9	SMK Assalafiyah Sleman	9	SMK Negeri 7 Yogyakarta
10	SMK Negeri 1 Sewon	10	SMK Negeri 2 Gedangsari	10	SMK Maarif 1 Wates	10	SMKS 17 1 Seyegan	10	SMK Negeri 8 Yogyakarta
11	SMK Negeri 2 Kasihan	11	SMK Negeri 2 Wonosari	11	SMK Maarif 2 Temon	11	SMKS Bina Harapan	11	SMK Negeri 9 Yogyakarta
12	SMK Negeri 2 Sewon	12	SMK Negeri 3 Wonosari	12	SMK Maarif 2 Wates	12	SMKS Budi Mulia Dua	12	SMK SMTI Yogyakarta
13	SMK Negeri 3 Kasihan	13	SMK Negeri Tepus	13	SMK Maarif 3 Wates	13	SMKS Diponegoro Depok	13	SMK Negeri 1 Yogyakarta
14	SMK Ar-Rahmah	14	SMK 45 Wonosari	14	SMK Maarif Nurul Haromain Sentolo	14	SMKS Dirgantara Putra Bangsa	14	SMK Negeri 2 Yogyakarta
15	SMK Binawiyata Srandakan	15	SMK Al Hikmah Gubukrubuh	15	SMK Muhammadiyah 1 Lendah	15	SMKS Hamong Putera Pakem	15	SMK Negeri 3 Yogyakarta
16	SMK Budhi Dharma Piyungan Bantul	16	SMK Al Hikmah Karangmojo	16	SMK Muhammadiyah 1 Temon	16	SMKS Insan Cendekia	16	SMK Negeri 4 Yogyakarta
17	SMK Cokroaminoto Pandak	17	SMK Bhina Karya Rongkop	17	SMK Muhammadiyah 1 Wates	17	SMKS Islam Moyudan	17	SMK Negeri 5 Yogyakarta
18	SMK Darma Bhakti Sedayu	18	SMK Darul Quran Wonosari	18	SMK Muhammadiyah 2 Lendah	18	SMKS Kanisius 1 Pakem	18	SMK Negeri 6 Yogyakarta
19	SMK Indonesia Yipk Bantul	19	SMK Dominikus Wonosari	19	SMK Muhammadiyah 2 Wates	19	SMKS Karya Rini Sleman	19	SMK Negeri 7 Yogyakarta
20	SMK Islam Terpadu Al Furqon	20	SMK Giri Handayani	20	SMK Muhammadiyah 3 Wates	20	SMKS Kesehatan Binatama	20	SMKS Berbudi Yogyakarta
21	SMK Kesehatan Amanah Husada Banguntapan Bantul	21	SMK Gotong Royong Semin	21	SMK Muhammadiyah Kalibawang	21	SMKS Kesehatan Sadewa	21	SMKS Bopkri 1 Yogyakarta
22	SMK Kesehatan Bantul	22	SMK Kesehatan Wonosari	22	SMK Muhammadiyah Sentolo	22	SMKS Maarif 1 Sleman	22	SMKS Bopkri 2 Yogyakarta
23	SMK Kesehatan Nuzula Husada	23	SMK Maarif Ngawen	23	SMK N 2 Pengasih	23	SMKS Maarif 2 Sleman	23	SMKS Ibu Pawiyatan Tamansiswa
24	SMK Kesehatan Pelita Bangsa	24	SMK Maarif Playen	24	SMK Negeri 1 Girimulyo	24	SMKS Muda Patria Sleman	24	SMKS Indonesia Yogyakarta
25	SMK Ki Ageng Pemanahan	25	SMK Maarif Ponjong	25	SMK Negeri 1 Kokap	25	SMKS Muhammadiyah 1 Kalasan	25	SMKS Insan Mulia
26	SMK Maarif 1 Kretek	26	SMK Maarif Semanu	26	SMK Negeri 1 Nanggulan	26	SMKS Muhammadiyah 1 Moyudan	26	SMKS Islam Yogyakarta

Bantul		Gunung Kidul		Kulon Progo		Sleman		Yogyakarta	
27	SMK Maarif 1 Piyungan	27	SMK Maarif Wonosari	27	SMK Negeri 1 Panjatan	27	SMKS Muhammadiyah 1 Sleman	27	SMKS Kesehatan Cipta Bhakti Husada Yogyakarta
28	SMK Maarif Al Munawwir Krapyak	28	SMK Mahisa Agni Gunungkidul	28	SMK Negeri 1 Pengasih	28	SMKS Muhammadiyah 1 Tempel	28	SMKS Koperasi Yogyakarta
29	SMK Merah Putih Jetis	29	SMK Mardhotullah Playen	29	SMK Negeri 1 Samigaluh	29	SMKS Muhammadiyah 1 Turi	29	SMKS Maarif 1 Yogyakarta
30	SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro	30	SMK Muhammadiyah Ponjong	30	SMK Negeri 1 Temon	30	SMKS Muhammadiyah 2 Moyudan	30	SMKS Marsudi Luhur I Yogyakarta
31	SMK Muhammadiyah 1 Bantul	31	SMK Muhammadiyah 1 Patuk	31	SMK PGRI 1 Sentolo	31	SMKS Muhammadiyah 2 Sleman	31	SMKS Muhammadiyah 1 Yogyakarta
32	SMK Muhammadiyah 2 Bantul	32	SMK Muhammadiyah 1 Playen	32	SMK Taman Siswa Nanggulan	32	SMKS Muhammadiyah 2 Tempel	32	SMKS Muhammadiyah 2 Yogyakarta
33	SMK Muhammadiyah Bangunjiwo Kasihan	33	SMK Muhammadiyah 2 Playen	33	SMK Veteran Wates	33	SMKS Muhammadiyah 2 Turi	33	SMKS Muhammadiyah 3 Yogyakarta
34	SMK Muhammadiyah Imogiri	34	SMK Muhammadiyah Karangmojo			34	SMKS Muhammadiyah Berbah	34	SMKS Muhammadiyah 4 Yogyakarta
35	SMK Muhammadiyah Kretek	35	SMK Muhammadiyah Ngawen			35	SMKS Muhammadiyah Cangkringan	35	SMKS Pembangunan
36	SMK Muhammadiyah Piyungan	36	SMK Muhammadiyah Rongkop			36	SMKS Muhammadiyah Gamping	36	SMKS Perindustrian Yogyakarta
37	SMK Nasional Bantul	37	SMK Muhammadiyah Semin			37	SMKS Muhammadiyah Minggir	37	SMKS Perkebunan Mm 52
38	SMK Nurul Iman	38	SMK Muhammadiyah Tepus			38	SMKS Muhammadiyah Mlati	38	SMKS Piri 1 Yogyakarta
39	SMK Pariwisata Bantul	39	SMK Muhammadiyah Wonosari			39	SMKS Muhammadiyah Pakem	39	SMKS Piri 2 Yogyakarta
40	SMK Pelita Buana Sewon	40	SMK Pembangunan Karangmojo			40	SMKS Muhammadiyah Prambanan	40	SMKS Piri 3 Yogyakarta
41	SMK Pembangunan Dlingo	41	SMK Sanjaya Gunungkidul			41	SMKS Muhammadiyah Seyegan	41	SMKS Tamansiswa Jetis
42	SMK Putra Tama Bantul	42	SMK Taman Karya Madya Teknik			42	SMKS Nasional		
43	SMK Santo Paulus 1 Sedayu	43	SMK Taman Siswa Playen			43	SMKS Pembaharuan Indonesia Sleman		
44	SMK Smart Al Muhsin	44	SMK Teruna Jaya Gunungkidul			44	SMKS Penerbangan Aag Adisutjipto		
45	SMK Tamansiswa 1 Imogiri	45	SMK YAPPI Wonosari			45	SMKS Pi Ambarukmo 1		
46	SMK Teknologi Bantul	46	SMK YPKK Tepus			46	SMKS Piri Sleman		
47	SMK Tujuh Belas Bantul					47	SMKS Putra Samodera Yogyakarta		
48	SMKS Maarif 2 Piyungan					48	SMKS Sanjaya Pakem		
						49	SMKS SOSIAL ISLAM 1 PRAMBANAN		
						50	SMKS SULAIMAN SLEMAN		
						51	SMKS TAMAN KARYA MADYA		

Bantul		Gunung Kidul		Kulon Progo		Sleman		Yogyakarta	
						52	SMKS TRISULA I DEPOK		
						53	SMKS YAPEMDA 1 SLEMAN		
						54	SMKS YPKK 1 SLEMAN		
						55	SMKS YPKK 2 SLEMAN		
						56	SMKS YPKK 3 SLEMAN		
						57	SMKS YPPN SLEMAN		
						58	SMTK KADESI YOGYAKARTA		

Tabel 2.4. Daftar Sekolah Luar Biasa (SLB) di DIY

Bantul		Gunung Kidul		Kulon Progo		Sleman		Yogyakarta	
1	SLB Negeri 2 Bantul	1	SLB Negeri 1 Gunungkidul	1	SLB N 1 Kulon Progo	1	SLB Negeri 1 Sleman	1	SLB N 1 Yogyakarta
2	SLB Negeri 1 Bantul	2	SLB Negeri 2 Gunung Kidul	2	SLB Bhakti Wiyata	2	SLB Abcd Tunas Kasih Donoharjo	2	SLB N Pembina Yogyakarta (C.F.G)
3	SLB Bangun Putra Kasihan	3	SLB Bakti Putra	3	SLB Kasih Ibu	3	SLB Autisma Dian Amanah	3	SLB Negeri 2 Yogyakarta
4	SLB Bina Anggita	4	SLB Darma Putra	4	SLB Muhammadiyah Dekso	4	SLB B Karnnamanohara	4	SLB Bina Anak Sholeh
5	SLB Bina Siwi	5	SLB Krida Mulia 1	5	SLB Pgri Nanggulan Kulon Progo	5	SLB B Wiyata Dharma 1 Sleman	5	SLB Dharma Rena Ring Putra II
6	SLB Dharma Bhakti	6	SLB Krida Mulia II	6	SLB Pgri Sentolo	6	SLB Bakti Siwi	6	SLB Helen Keller Indonesia
7	SLB Insan Mandiri	7	SLB Krida Mulia III	7	SLB Rela Bhakti 2 Wates	7	SLB BC Wiyata Dharma 3	7	SLB Samara Bunda
8	SLB Islam Qothrunnada	8	SLB Muhammadiyah Ponjong	8	SLB Zafa Hargorejo	8	SLB Bhakti Kencana	8	SLB /A Yaketunis
9	SLB Ma Arif Bantul	9	SLB Purwo Raharjo			9	SLB Bhakti Kencana Ii	9	SLB /E Prayuwana
10	SLB Mardi Mulyo	10	SLB Suharjo Putra			10	SLB Bhakti Pertiwi		
11	SLB Marsudi Putra 1	11	SLB Suta Wijaya			11	SLB C Dharma Rena Ring Putra I		
12	SLB Marsudi Putra 2	12	SLBS Puspa Melati			12	SLB C Wiyata Dharma 2 Sleman		
13	SLB Marsudi Putra Iii	13	SLBS Sekar Handayani			13	SLB C1 Panti Asih Pakem		
14	SLB Pamardi Putra					14	SLB Citra Mulia Mandiri		
15	SLB Pgri Trimulyo					15	SLB Damayanti		
16	SLB Sekar Melati Muh. Imogiri					16	SLB Fajar Nugraha		
17	SLB Tunas Bhakti					17	SLB Fredofios		
18	SLB Tunas Kasih					18	SLB Ganda Daya Ananda		

Bantul		Gunung Kidul		Kulon Progo		Sleman		Yogyakarta	
19	SLB Widya Mulia					19	SLB Marganingsih		
20	SLB 1 Sekar Teratai					20	SLB Muhammadiyah Gamping		
						21	SLB Pgri Minggir		
						22	SLB Pgri Sumbersari		
						23	SLB Rela Bhakti I Gamping		
						24	SLB Taruna Al Quran		
						25	SLB Tegar Harapan		
						26	SLB Tunas Kasih 2 Turi		
						27	SLB Tunas Sejahtera		
						28	SLB Wiyata Dharma IV		
						29	SLB Yapenas		

II.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

II.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kinerjanya, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara, seperti Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Guru Tetap Yayasan (GTY), dan Tenaga Honorer Daerah. Jumlah total ASN yang bekerja di bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Jumlah SDM Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Berdasar Pendidikan

No.	Instansi/Unit Kerja	JUMLAH										
		S3	S2	S1	DIV	DIII/SM	DII	DI	SLTA	SLTP	SD	JML
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	43	234	0	12	5	0	19	2	5	320
2	Balai Latihan Pendidikan Teknik	0	9	12	0	2	0	0	4	3	0	30
3	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	0	8	11	2	2	0	0	1	0	0	24
4	Balai Pemuda Dan Olahraga	0	3	12	0	1	0	0	17	0	0	33
5	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	0	16	20	0	5	0	0	2	0	0	43
6	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	0	14	42	0	3	0	0	5	1	0	65
7	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	0	14	41	0	5	0	0	5	0	0	65
8	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	0	12	23	0	3	0	0	9	0	0	47
9	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	0	9	24	0	3	0	1	7	0	0	44
10	SMA Negeri 1 Yogyakarta	1	6	37	0	2	0	0	1	0	0	47
11	SMA Negeri 2 Yogyakarta	0	5	33	0	0	0	0	2	1	0	41
12	SMA Negeri 3 Yogyakarta	0	8	28	0	0	0	0	1	0	0	37
13	SMA Negeri 4 Yogyakarta	0	6	32	0	5	0	0	1	0	0	44
14	SMA Negeri 5 Yogyakarta	0	6	34	0	3	0	0	3	0	0	46
15	SMA Negeri 6 Yogyakarta	0	8	32	0	1	1	0	2	0	0	44
16	SMA Negeri 7 Yogyakarta	0	3	29	0	0	0	0	2	0	0	34
17	SMA Negeri 8 Yogyakarta	0	4	37	0	1	0	0	3	0	0	45
18	SMA Negeri 9 Yogyakarta	0	6	25	0	0	0	0	0	0	0	31
19	SMA Negeri 10 Yogyakarta	0	2	28	0	1	0	0	1	0	0	32
20	SMA Negeri 11 Yogyakarta	0	6	30	0	2	0	0	3	0	0	41
21	SMA Negeri 1 Cangkringan	0	2	21	0	2	1	0	2	0	0	28
22	SMA Negeri 1 Depok	0	3	28	0	2	0	0	1	0	0	34
23	SMA Negeri 1 Gamping	0	3	17	0	1	0	0	2	0	0	23
24	SMA Negeri 1 Godean	0	3	29	0	2	0	0	2	0	0	36
25	SMA Negeri 1 Kalasan	0	3	33	0	2	0	0	3	0	0	41
26	SMA Negeri 1 Minggir	0	1	21	0	4	0	0	2	0	0	28
27	SMA Negeri 1 Mlati	0	5	24	0	2	0	0	2	0	0	33
28	SMA Negeri 1 Ngaglik	0	4	27	0	3	0	0	1	0	0	35
29	SMA Negeri 2 Ngaglik	0	5	27	0	3	0	0	1	0	0	36
30	SMA Negeri 1 Ngemplak	0	1	19	0	2	0	0	5	1	0	28
31	SMA Negeri 1 Pakem	0	3	19	0	0	0	0	1	0	0	23
32	SMA Negeri 1 Prambanan	0	1	35	0	3	0	0	2	0	0	41
33	SMA Negeri 1 Seyegan	0	5	30	0	2	0	0	2	0	0	39

No.	Instansi/Unit Kerja	JUMLAH										
		S3	S2	S1	DIV	DIII/SM	DII	DI	SLTA	SLTP	SD	JML
34	SMA Negeri 1 Sleman	0	9	27	0	2	2	0	2	0	0	42
35	SMA Negeri 2 Sleman	0	2	21	0	4	1	0	0	0	0	28
36	SMA Negeri 1 Tempel	0	3	22	0	2	0	0	3	1	0	31
37	SMA Negeri 1 Turi	0	1	21	0	5	0	0	1	0	0	28
38	SMA Negeri 1 Bantul	0	19	22	0	2	0	0	1	0	0	44
39	SMA Negeri 2 Bantul	0	9	33	0	2	0	0	1	0	0	45
40	SMA Negeri 3 Bantul	0	3	28	0	2	0	0	0	0	0	33
41	SMA Negeri 1 Sewon	1	6	44	0	3	0	0	2	0	0	56
42	SMA Negeri 1 Kasihan	0	12	29	0	2	0	0	2	1	0	46
43	SMA Negeri 1 Sedayu	0	9	37	0	1	0	0	4	0	0	51
44	SMA Negeri 1 Banguntapan	0	6	31	0	2	0	0	4	0	1	44
45	SMA Negeri 2 Banguntapan	0	1	38	0	4	0	0	0	0	0	43
46	SMA Negeri 1 Piyungan	0	4	24	0	2	0	0	0	0	0	30
47	SMA Negeri 1 Pleret	0	6	20	0	3	0	0	1	0	1	31
48	SMA Negeri 1 Dlingo	0	2	21	0	2	0	0	0	0	0	25
49	SMA Negeri 1 Imogiri	0	4	28	0	0	0	0	1	0	0	33
50	SMA Negeri 1 Jetis	0	9	28	0	1	0	0	1	0	0	39
51	SMA Negeri 1 Pundong	0	5	25	0	0	0	0	3	0	0	33
52	SMA Negeri 1 Kretek	0	3	23	0	3	0	0	0	0	0	29
53	SMA Negeri 1 Sanden	0	4	26	0	2	0	0	1	0	0	33
54	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	0	10	30	0	0	0	0	1	0	0	41
55	SMA Negeri 1 Pajangan	0	4	22	0	2	0	0	1	0	0	29
56	SMA Negeri 1 Srandakan	0	2	21	0	0	0	0	2	0	0	25
57	SMA Negeri 1 Wonosari	0	4	34	1	3	0	0	4	0	0	46
58	SMA Negeri 2 Wonosari	0	10	26	0	2	0	0	3	0	2	43
59	SMA Negeri 1 Playen	0	0	28	0	1	0	0	3	2	0	34
60	SMA Negeri 2 Playen	0	9	30	0	2	0	0	4	0	0	45
61	SMA Negeri 1 Semin	0	3	34	0	2	0	0	2	0	0	41
62	SMA Negeri 1 Karangmojo	0	13	28	0	2	0	0	5	0	0	48
63	SMA Negeri 1 Panggang	0	3	20	0	3	0	0	2	1	0	29
64	SMA Negeri 1 Rongkop	0	5	17	0	1	0	0	3	2	0	28
65	SMA Negeri 1 Semanu	0	7	20	0	2	0	0	3	0	0	32
66	SMA Negeri 1 Patuk	0	3	27	0	2	0	0	3	0	0	35
67	SMA Negeri 1 Tanjungsari	0	2	22	0	1	0	0	5	0	0	30
68	SMA Negeri 2 Wates	0	5	28	0	2	0	0	2	0	0	37
69	SMA Negeri 1 Wates	0	3	39	0	2	0	0	1	1	1	47
70	SMA Negeri 1 Pengasih	0	6	34	0	2	0	0	2	0	1	45
71	SMA Negeri 1 Lendah	0	1	32	0	2	0	0	1	0	0	36
72	SMA Negeri 1 Galur	0	2	23	0	4	0	0	5	0	0	34
73	SMA Negeri 1 Temon	0	2	25	0	2	0	0	2	0	0	31
74	SMA Negeri 1 Kokap	0	3	16	0	1	0	0	3	0	0	23
75	SMA Negeri 1 Sentolo	0	1	29	0	2	0	0	2	0	0	34
76	SMA Negeri 1 Girimulyo	0	0	23	0	2	0	0	3	0	0	28
77	SMA Negeri 1 Kalibawang	0	3	21	0	2	0	0	1	0	0	27
78	SMA Negeri 1 Samigaluh	0	3	15	0	2	0	0	2	0	0	22
79	SMK Negeri 1 Yogyakarta	0	6	29	0	4	0	0	2	0	0	41
80	SMK Negeri 2 Yogyakarta	0	12	88	1	0	0	0	5	0	0	106
81	SMK Negeri 3 Yogyakarta	0	9	90	0	1	0	0	2	0	1	103

No.	Instansi/Unit Kerja	JUMLAH										
		S3	S2	S1	DIV	DIII/SM	DII	DI	SLTA	SLTP	SD	JML
82	SMK Negeri 4 Yogyakarta	0	6	62	1	8	0	0	2	0	0	79
83	SMK Negeri 5 Yogyakarta	0	10	60	0	1	0	0	3	1	0	75
84	SMK Negeri 6 Yogyakarta	0	11	53	0	0	0	0	3	0	0	67
85	SMK Negeri 7 Yogyakarta	0	3	41	2	2	0	0	2	0	0	50
86	SMK Negeri 1 Cangkringan	0	6	42	0	3	0	0	1	0	0	52
87	SMK Negeri 1 Depok	0	13	29	0	2	0	0	2	0	0	46
88	SMK Negeri 2 Depok	0	14	79	0	3	0	0	3	0	0	99
89	SMK Negeri 1 Godean	0	6	44	0	1	0	0	3	0	0	54
90	SMK Negeri 2 Godean	0	2	36	0	2	0	0	3	0	0	43
91	SMK Negeri 1 Kalasan	0	5	53	0	6	0	0	1	0	1	66
92	SMK Negeri 1 Seyegan	1	12	46	0	1	0	0	2	0	0	62
93	SMK Negeri 1 Tempel	0	3	42	0	2	0	0	2	1	0	50
94	SMK Negeri 1 Bantul	0	8	60	0	3	0	0	2	0	0	73
95	SMK Negeri 1 Dlingo	0	2	22	0	3	0	0	0	0	0	27
96	SMK Negeri 1 Kasihan	0	5	26	0	5	0	0	5	0	0	41
97	SMK Negeri 2 Kasihan	0	3	32	0	3	0	0	2	2	0	42
98	SMK Negeri 3 Kasihan	0	4	50	1	1	0	0	5	0	0	61
99	SMK Negeri 1 Pajangan	0	6	26	0	2	0	0	2	0	0	36
100	SMK Negeri 1 Pandak	0	8	41	0	5	0	0	0	2	0	56
101	SMK Negeri 1 Pleret	0	6	40	0	2	0	0	0	0	0	48
102	SMK Negeri 1 Pundong	0	7	41	0	2	0	0	1	0	0	51
103	SMK Negeri 1 Sanden	0	6	29	0	0	0	0	2	0	0	37
104	SMK Negeri 1 Sedayu	0	14	50	0	3	0	0	0	0	0	67
105	SMK Negeri 1 Sewon	0	12	69	1	2	0	0	2	0	0	86
106	SMK Negeri 2 Sewon	0	4	34	0	0	0	0	0	1	0	39
107	SMK Negeri 1 Wonosari	0	22	43	0	2	0	0	2	2	0	71
108	SMK Negeri 2 Wonosari	0	15	70	3	1	0	0	8	0	0	97
109	SMK Negeri 3 Wonosari	0	8	46	0	0	0	0	9	1	0	64
110	SMK Negeri 1 Saptosari	0	10	24	0	2	0	0	1	0	2	39
111	SMK Negeri 1 Gedangsari	0	4	26	0	1	0	0	1	0	0	32
112	SMK Negeri 2 Gedangsari	0	2	29	0	3	0	0	1	0	0	35
113	SMK Negeri 1 Girisubo	0	2	21	0	2	0	0	0	0	0	25
114	SMK Negeri 1 Purwosari	0	4	19	0	1	0	0	0	0	0	24
115	SMK Negeri 1 Tanjungsari	0	2	27	0	1	0	0	4	0	2	36
116	SMK Negeri 1 Nglipar	0	7	29	0	2	0	0	3	0	0	41
117	SMK Negeri 1 Tepus	0	3	10	0	2	0	0	2	0	0	17
118	SMK Negeri 1 Ngawen	0	8	32	0	3	0	0	1	0	0	44
119	SMK Negeri 1 Ponjong	0	7	18	0	2	0	0	0	0	0	27
120	SMK Negeri 1 Pengasih	0	9	43	1	2	0	0	5	0	0	60
121	SMK Negeri 2 Pengasih	0	15	108	1	3	0	0	3	1	1	132
122	SMK Negeri 1 Temon	0	3	28	0	3	0	0	1	0	0	35
123	SMK Negeri 1 Kokap	0	2	21	0	3	0	0	1	2	0	29
124	SMK Negeri 1 Samigaluh	0	5	22	0	3	1	0	3	1	0	35
125	SMK Negeri 1 Girimulyo	0	3	11	0	2	0	0	2	0	0	18
126	SMK Negeri 1 Panjatan	0	4	26	0	1	0	0	3	0	0	34
127	SMK Negeri 1 Nanggulan	0	3	38	0	0	0	0	2	0	0	43
128	SLB Negeri Pembina Yogyakarta	0	8	40	0	1	2	0	2	1	1	55
129	SLB Negeri 1 Yogyakarta	0	2	19	0	3	0	0	2	0	0	26

No.	Instansi/Unit Kerja	JUMLAH										
		S3	S2	S1	DIV	DIII/SM	DII	DI	SLTA	SLTP	SD	JML
130	SLB Negeri 2 Yogyakarta	0	5	19	0	4	0	0	1	1	0	30
131	SLB Negeri 1 Bantul	0	9	54	0	1	0	0	2	2	0	68
132	SLB Negeri 2 Bantul	0	3	28	0	1	2	0	1	0	0	35
133	SLB Negeri 1 Gunungkidul	0	2	22	0	1	1	0	2	1	0	29
134	SLB Negeri 2 Gunungkidul	0	2	10	0	4	2	0	3	0	0	21
135	SLB Negeri 1 Sleman	1	2	25	0	3	0	0	5	0	0	36
136	SLB Negeri 1 Kulon Progo	0	6	22	0	0	0	0	0	0	0	28
	JUMLAH	4	828	4530	14	293	18	1	333	35	19	6075
Sumber: BKD DIY, Desember 2022												

Tabel 2.5 menampilkan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY berdasarkan pendidikan. Keseluruhan jumlah pegawai sebanyak 6.075 orang. Dari data terlihat bahwa sebanyak 5.376 orang (88,49%) telah memiliki pendidikan minimal D-4/S-1. Fakta ini sangat penting dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

Perubahan jumlah pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga DIY dipengaruhi oleh dinamika organisasi yang memengaruhi penambahan dan pengurangan pegawai ASN dan non-ASN. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ini meliputi pensiun, tugas belajar, cuti, sakit, dan meninggal dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ASN dan non-ASN di Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga DIY mengalami penurunan karena penambahan ASN baru yang diterima dan ditempatkan tidak seimbang dengan jumlah ASN yang pensiun. Kondisi ini semakin diperparah dengan bertambahnya volume dan beban pekerjaan, sehingga manajemen kepegawaian mengalami kesulitan dalam pengaturan penempatan dan beban kerja ASN.

Tabel 2.6. Jumlah SDM Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Berdasar Usia

No.	Instansi/Unit Kerja	JUMLAH								
		18-25	26-30	31-35	36-40	41-45	45-50	51-55	>=56	JML
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2	5	11	28	51	111	112	320
2	Balai Latihan Pendidikan Teknik	0	1	2	3	5	5	7	7	30
3	Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan	0	3	3	1	4	4	7	2	24
4	Balai Pemuda Dan Olahraga	1	0	2	6	4	11	5	4	33
5	Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	0	2	2	4	4	4	2	25	43
6	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	1	1	1	3	5	2	13	39	65
7	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	0	4	3	3	4	9	13	29	65
8	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	0	0	1	1	1	11	17	16	47
9	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	0	1	0	3	5	7	11	17	44
10	SMA Negeri 1 Yogyakarta	0	2	2	4	2	8	14	15	47
11	SMA Negeri 2 Yogyakarta	0	0	1	2	6	3	13	16	41
12	SMA Negeri 3 Yogyakarta	0	3	4	1	4	4	9	12	37
13	SMA Negeri 4 Yogyakarta	0	6	2	2	1	7	9	17	44
14	SMA Negeri 5 Yogyakarta	0	5	1	5	2	7	10	16	46

No.	Instansi/Unit Kerja	JUMLAH								
		18-25	26-30	31-35	36-40	41-45	45-50	51-55	>=56	JML
15	SMA Negeri 6 Yogyakarta	0	1	0	4	4	11	8	16	44
16	SMA Negeri 7 Yogyakarta	0	1	2	4	2	7	11	7	34
17	SMA Negeri 8 Yogyakarta	0	2	2	2	5	7	17	10	45
18	SMA Negeri 9 Yogyakarta	0	1	0	1	2	4	8	15	31
19	SMA Negeri 10 Yogyakarta	0	0	2	2	4	1	12	11	32
20	SMA Negeri 11 Yogyakarta	0	2	3	3	4	8	6	15	41
21	SMA Negeri 1 Cangkringan	0	4	4	3	2	2	8	5	28
22	SMA Negeri 1 Depok	0	0	3	1	2	3	6	19	34
23	SMA Negeri 1 Gamping	0	2	1	4	2	1	7	6	23
24	SMA Negeri 1 Godean	0	3	3	2	3	4	9	12	36
25	SMA Negeri 1 Kalasan	0	1	3	1	2	9	10	15	41
26	SMA Negeri 1 Minggir	0	3	4	1	0	2	6	12	28
27	SMA Negeri 1 Mlati	0	1	6	1	3	2	10	10	33
28	SMA Negeri 1 Ngaglik	1	2	3	2	2	6	5	14	35
29	SMA Negeri 2 Ngaglik	0	3	2	0	7	2	6	16	36
30	SMA Negeri 1 Ngemplak	0	4	4	2	0	2	7	9	28
31	SMA Negeri 1 Pakem	0	0	2	0	2	4	8	7	23
32	SMA Negeri 1 Prambanan	0	4	2	3	2	2	12	16	41
33	SMA Negeri 1 Seyegan	0	2	5	3	2	5	8	14	39
34	SMA Negeri 1 Sleman	0	4	6	2	4	4	12	10	42
35	SMA Negeri 2 Sleman	0	6	2	1	4	2	4	9	28
36	SMA Negeri 1 Tempel	0	3	2	5	2	0	11	8	31
37	SMA Negeri 1 Turi	0	3	4	1	2	3	8	7	28
38	SMA Negeri 1 Bantul	0	3	1	2	7	5	9	17	44
39	SMA Negeri 2 Bantul	0	4	1	1	2	10	11	16	45
40	SMA Negeri 3 Bantul	0	3	3	1	4	3	6	13	33
41	SMA Negeri 1 Sewon	0	3	8	5	4	4	14	18	56
42	SMA Negeri 1 Kasihan	0	3	5	2	4	10	10	12	46
43	SMA Negeri 1 Sedayu	0	4	3	1	3	9	16	15	51
44	SMA Negeri 1 Banguntapan	0	4	3	4	3	5	10	15	44
45	SMA Negeri 2 Banguntapan	0	4	2	6	3	6	4	18	43
46	SMA Negeri 1 Piyungan	0	3	2	1	2	4	7	11	30
47	SMA Negeri 1 Pleret	0	3	1	0	5	8	7	7	31
48	SMA Negeri 1 Dlingo	0	5	3	2	3	3	6	3	25
49	SMA Negeri 1 Imogiri	0	2	2	0	0	6	8	15	33
50	SMA Negeri 1 Jetis	0	3	0	4	4	8	10	10	39
51	SMA Negeri 1 Pundong	0	0	0	2	3	6	11	11	33
52	SMA Negeri 1 Kretek	0	6	5	3	1	2	8	4	29
53	SMA Negeri 1 Sanden	0	2	1	2	4	5	10	9	33
54	SMA Negeri 1 Bambanglipuro	0	4	6	4	2	4	6	15	41
55	SMA Negeri 1 Pajangan	0	1	3	2	5	2	6	10	29
56	SMA Negeri 1 Srandakan	0	3	3	2	4	4	6	3	25
57	SMA Negeri 1 Wonosari	0	2	4	3	8	6	8	15	46
58	SMA Negeri 2 Wonosari	1	3	2	2	4	7	13	11	43
59	SMA Negeri 1 Playen	0	2	1	5	5	3	8	10	34
60	SMA Negeri 2 Playen	0	3	5	3	9	8	7	10	45
61	SMA Negeri 1 Semin	0	2	2	2	3	8	12	12	41
62	SMA Negeri 1 Karangmojo	0	1	7	1	5	12	15	7	48

No.	Instansi/Unit Kerja	JUMLAH								
		18-25	26-30	31-35	36-40	41-45	45-50	51-55	>=56	JML
63	SMA Negeri 1 Panggang	0	4	1	5	2	2	8	7	29
64	SMA Negeri 1 Rongkop	0	4	3	2	4	5	7	3	28
65	SMA Negeri 1 Semanu	0	2	5	5	1	4	7	8	32
66	SMA Negeri 1 Patuk	0	5	6	3	1	3	7	10	35
67	SMA Negeri 1 Tanjungsari	0	1	2	2	4	5	9	7	30
68	SMA Negeri 2 Wates	0	6	4	0	1	9	10	7	37
69	SMA Negeri 1 Wates	1	0	1	2	8	6	10	19	47
70	SMA Negeri 1 Pengasih	0	4	0	1	3	9	10	18	45
71	SMA Negeri 1 Lendah	0	2	3	0	2	5	7	17	36
72	SMA Negeri 1 Galur	0	3	2	2	4	7	11	5	34
73	SMA Negeri 1 Temon	0	2	1	3	0	7	6	12	31
74	SMA Negeri 1 Kokap	0	3	1	2	1	2	6	8	23
75	SMA Negeri 1 Sentolo	0	5	0	0	4	4	10	11	34
76	SMA Negeri 1 Girimulyo	0	5	4	1	2	4	1	11	28
77	SMA Negeri 1 Kalibawang	0	2	3	1	0	5	7	9	27
78	SMA Negeri 1 Samigaluh	0	1	7	1	3	2	3	5	22
79	SMK Negeri 1 Yogyakarta	0	2	5	4	5	6	8	11	41
80	SMK Negeri 2 Yogyakarta	0	2	3	10	13	18	21	39	106
81	SMK Negeri 3 Yogyakarta	0	7	7	7	12	15	22	33	103
82	SMK Negeri 4 Yogyakarta	0	3	2	10	16	10	21	17	79
83	SMK Negeri 5 Yogyakarta	0	4	1	8	5	8	21	28	75
84	SMK Negeri 6 Yogyakarta	0	1	1	7	9	13	11	25	67
85	SMK Negeri 7 Yogyakarta	0	2	7	2	6	9	9	15	50
86	SMK Negeri 1 Cangkringan	0	8	2	4	9	13	10	6	52
87	SMK Negeri 1 Depok	0	1	0	1	4	7	14	19	46
88	SMK Negeri 2 Depok	0	5	3	7	11	18	21	34	99
89	SMK Negeri 1 Godean	0	0	5	4	5	7	18	15	54
90	SMK Negeri 2 Godean	0	4	4	3	4	4	8	16	43
91	SMK Negeri 1 Kalasan	0	2	3	4	4	6	18	29	66
92	SMK Negeri 1 Seyegan	0	5	4	6	9	9	14	15	62
93	SMK Negeri 1 Tempel	0	1	3	1	5	11	16	13	50
94	SMK Negeri 1 Bantul	0	3	1	6	4	16	19	24	73
95	SMK Negeri 1 Dlingo	1	4	3	3	2	8	4	2	27
96	SMK Negeri 1 Kasihan	0	7	2	3	4	2	7	16	41
97	SMK Negeri 2 Kasihan	0	5	4	5	7	4	6	11	42
98	SMK Negeri 3 Kasihan	0	4	5	3	9	7	8	25	61
99	SMK Negeri 1 Pajangan	0	3	2	4	4	7	6	10	36
100	SMK Negeri 1 Pandak	1	2	4	2	3	13	16	15	56
101	SMK Negeri 1 Pleret	0	4	5	6	6	9	8	10	48
102	SMK Negeri 1 Pundong	0	3	5	2	7	8	14	12	51
103	SMK Negeri 1 Sanden	0	1	4	0	7	9	11	5	37
104	SMK Negeri 1 Sedayu	1	4	3	2	11	16	11	19	67
105	SMK Negeri 1 Sewon	0	4	5	5	10	15	18	29	86
106	SMK Negeri 2 Sewon	0	3	3	3	4	9	8	9	39
107	SMK Negeri 1 Wonosari	0	4	4	5	8	10	17	23	71
108	SMK Negeri 2 Wonosari	0	6	4	5	12	16	29	25	97
109	SMK Negeri 3 Wonosari	0	0	2	6	11	18	16	11	64
110	SMK Negeri 1 Saptosari	1	1	0	9	6	8	8	6	39

No.	Instansi/Unit Kerja	JUMLAH								
		18-25	26-30	31-35	36-40	41-45	45-50	51-55	>=56	JML
111	SMK Negeri 1 Gedangsari	0	3	6	5	5	6	3	4	32
112	SMK Negeri 2 Gedangsari	0	5	5	3	7	5	6	4	35
113	SMK Negeri 1 Girisubo	0	3	1	7	5	2	5	2	25
114	SMK Negeri 1 Purwosari	0	1	6	3	5	6	1	2	24
115	SMK Negeri 1 Tanjungsari	0	1	4	3	7	7	8	6	36
116	SMK Negeri 1 Nglipar	1	2	0	7	2	11	6	12	41
117	SMK Negeri 1 Tepus	0	1	0	2	4	3	3	4	17
118	SMK Negeri 1 Ngawen	0	5	2	6	10	6	7	8	44
119	SMK Negeri 1 Ponjong	0	4	4	5	3	5	5	1	27
120	SMK Negeri 1 Pengasih	0	0	0	1	9	17	19	14	60
121	SMK Negeri 2 Pengasih	0	9	10	6	24	17	28	38	132
122	SMK Negeri 1 Temon	0	1	1	3	6	7	5	12	35
123	SMK Negeri 1 Kokap	0	4	3	0	6	5	6	5	29
124	SMK Negeri 1 Samigaluh	0	4	1	0	3	12	7	8	35
125	SMK Negeri 1 Girimulyo	0	2	2	1	1	4	4	4	18
126	SMK Negeri 1 Panjatan	0	2	0	3	4	8	11	6	34
127	SMK Negeri 1 Nanggulan	0	1	0	1	5	14	13	9	43
128	SLB Negeri Pembina Yogyakarta	1	1	4	5	5	7	15	17	55
129	SLB Negeri 1 Yogyakarta	0	3	3	2	3	4	5	6	26
130	SLB Negeri 2 Yogyakarta	1	2	4	3	2	2	6	10	30
131	SLB Negeri 1 Bantul	1	2	11	9	3	11	17	14	68
132	SLB Negeri 2 Bantul	0	3	6	3	1	1	12	9	35
133	SLB Negeri 1 Gunungkidul	0	1	4	4	9	3	3	5	29
134	SLB Negeri 2 Gunungkidul	1	2	3	1	1	4	2	7	21
135	SLB Negeri 1 Sleman	0	2	2	7	7	3	9	6	36
136	SLB Negeri 1 Kulon Progo	0	2	3	2	2	6	7	6	28
		14	375	401	426	645	956	1438	1820	6075
Sumber: BKD DIY, Desember 2022										

Berdasarkan kondisi pegawai yang tercantum di Tabel 2.6, dapat diperhitungkan bahwa dalam 3 tahun ke depan akan terjadi penurunan signifikan jumlah pegawai sebesar 1.820 orang (29,96%). Hal ini dikarenakan para pegawai tersebut telah memasuki masa pensiun. Secara rinci, pegawai yang berusia antara 18-35 tahun berjumlah 790 orang (13,00 %), sedangkan pegawai yang berusia antara 36-55 tahun berjumlah 3.465 orang (57,04%). Dari penggolongan ini dapat disimpulkan bahwa regenerasi pegawai dengan penambahan pegawai muda di bawah 30 tahun belum berjalan dengan baik. Ketidakseimbangan jumlah pegawai berdasarkan usia akan menjadi masalah karena kekurangan pegawai dan kurangnya transfer pengetahuan dari pegawai senior ke pegawai junior, terutama karena perbedaan rentang usia yang terlalu besar.

II.2.1.1. Sarana Prasarana Instansi

Tabel 2.7. Aset Barang Modal Dinas Dikpora DIY

No	Nama Bidang Barang	Induk (Induk, SLB dan UPT)	Balai Dikmen Kota Yogyakarta	Balai Dikmen Kab. Bantul	Balai Dikmen Kab. Gunung kidul	Balai Dikmen Kab. Kulon Progo	Balai Dikmen Kab. Sleman
1	Tanah	17	13	26	23	29	25
2	Alat-alat besar	123	72	514	25	69	817
3	Alat-alat angkutan	164	55	97	123	58	101
4	Alat bengkel & alat ukur	1.438	3.469	4.650	6.377	2.943	3.483
5	Alat pertanian	223	132	330	144	387	1.230
6	Alat kantor & rumah tangga	42.436	66.308	78.234	52.115	42.073	76.825
7	Alat studio & alat komunikasi	3550	2.701	3.023	2.583	1.206	2.945
8	Alat-alat kedokteran	798	242	295	375	95	277
9	Alat laboratorium	7.801	6.689	1.3095	19.307	15.443	18.207
10	Alat-alat persenjataan/keamanan	38	49	7	32	27	24
11	Bangunan gedung	215	219	1.121	664	452	888
12	Monumen	3	0	1	9	0	11
13	Jalan & jembatan	1	1	13	6	3	1
14	Bangunan air/ irigasi	5	18	14	21	5	9
15	Instalasi	25	7	32	32	29	21
16	Jaringan	26	8	87	31	3	5
17	Buku perpustakaan	896.001	329.358	484.441	254.160	171.867	452.017
18	Barang bercorak kebudayaan	1.969	1.100	5.201	5.743	112	1.212
19	Hewan & ternak serta tanaman	5	5	6	0	4	0
20	Aset tetap renovasi	3	0	0	0	0	0
21	Konstruksi dalam pengerjaan	1	1	1	1	1	0
22	Aset tidak berwujud	437	66	25	42	97	70
Sumber data : Data Disdikpora 2022							

Sarana prasarana tersebut diatas, penggunaan dan pemanfaatannya tersebar pada OPD Induk, UPT, SLB, Balai Dikmen Kab/Kota serta SMAN dan SMKN di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

II.3.1. Gambaran Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah istimewa setingkat provinsi dengan 4 Kabupaten dan 1 Kota yang terdiri atas 78 Kecamatan dan 438 Kelurahan/Desa, memiliki luas wilayah seluruhnya 3.185,80 km². Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di bagian selatan dibatasi oleh Laut Selatan, sedangkan di bagian Tenggara, Timur Laut, Barat Laut dan Barat dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi:

- ✓ Kabupaten Wonogiri di Bagian Tenggara;
- ✓ Kabupaten Klaten di Bagian Timur Laut;
- ✓ Kabupaten Magelang di Bagian Barat Laut;
- ✓ Kabupaten Purworejo di Bagian Barat;
- ✓ Kabupaten Boyolali di Bagian Utara.

Pada aspek demografi, jumlah penduduk DIY pada tahun 2022 adalah 3.677.446 Orang, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 1.820.400 orang (49.50%) dan penduduk perempuan 1.857.046 orang (50.50%). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 terhadap tahun 2022 mencapai 0.05% (1.784 penduduk), mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk periode 2020-2021 sebesar 0.12% (4.473 penduduk) dengan kepadatan penduduk yang tidak merata antara Kota Yogyakarta dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D.I. Yogyakarta memiliki 8 (delapan) kriteria untuk menggambarkan tingkat populasi dan kondisi kepadatan dalam satu wilayah. Memperhatikan hal tersebut maka Kota Yogyakarta memiliki 5 Kemantren yang termasuk dalam kategori “padat penduduk” dengan kepadatan penduduk ±20.000 jiwa/km2. Sejumlah besar Kemantren dan Kapanewon yang berada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul terutama daerah berbatasan Kota Yogyakarta memiliki kepadatan antara 2.000–15.000 jiwa/km2. Memperhatikan demografi kependudukan D.I. Yogyakarta akan terlihat ketidakmerataan kepadatan penduduk dengan luasan wilayah yang dimiliki terutama daerah di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Kondisi demografi Penduduk DIY terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.8. Kondisi Demografi Penduduk DIY

No	Komponen		Jumlah	No	Komponen		Jumlah
1	Penduduk seluruhnya		3.677.446	6	Kepandaian Membaca/Menulis		
2	Penduduk 7-12 th		316.246		a.	Dapat membaca	---
3	Penduduk 13-15 th		166.271		b.	Buta huruf	---
4	Penduduk 16-18 th		145.628	7	Angkatan kerja		
5	Partisipasi Sekolah				a.	Bekerja	2.228.523
	a.	Tidak/belum pernah sekolah	693.039		b.	Belum bekerja	106.432
	b.	Belum Tamat SD/MI	331.034	8	Bukan angkatan kerja		
	c.	Tamat SD	651.834		a.	Bersekolah	253.480
	d.	SMP/MTs	564.628		b.	Rumah tangga	472.342
		SMA/SMK/MA	1.007.439		c.	Lain-lain	115.012
		Diploma I/II	26.041	9	Penduduk Miskin		
		Akademi/ Diploma III/S.Mud	90.130		a.	Tahun 2021	11.91
		Diploma IV/Strata-1	280.133		b.	Tahun 2022 (Maret)	11.34
		Strata-2	29.508	10	Upah Minimal Provinsi (Rp.) 2022		
		Strata-3	3.660				
Sumber data: Kependudukan DIY Tahun 2021, dan Profil Pendidikan Disdikpora DIY Tahun 2022							

Berdasar data demografi diatas, sebanyak 628.145 anak (17.08%) Penduduk DIY adalah penduduk dalam usia wajib belajar. Urutan terbanyak penduduk DIY pada rentang usia sekolah ada pada usia 7-12 tahun. Diikuti oleh penduduk usia 13-15 th dan kemudian penduduk usia 16-18 th. Dilihat dari tingkat pendidikan maka tamatan pendidikan menengah (SMA, SMK dan MA) mencapai angka tertinggi, diikuti jumlah tamatan SD dan kemudian tamatan SMP.

**Tabel 2.9. Kondisi kemiskinan DIY
dibandingkan dengan kondisi nasional**

Periode	2021		2022	
	D.I.Yogyakarta	Nasional	D.I.Yogyakarta	Nasional
Semester 1 (Maret)	12.80	10.14	11.34	9.54
Semester 2 (September)	11.91	9.71	-	-
Sumber data: BPS Provinsi DIY 2021 dan 2022				

Perkembangan angka kemiskinan DIY periode Maret 2022 berada di angka 11.34% yang berada jauh di atas angka nasional, yakni 9.54%. Tingkat kemiskinan DIY masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan secara nasional namun penurunan kemiskinan di DIY lebih cepat dibandingkan penurunan kemiskinan secara nasional.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 11,34% dan turun 0.57 poin dibandingkan September 2021. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 454,76 ribu dan turun 19,7 ribu orang terhadap September 2021. Apabila dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 turun 51,7 ribu orang.

Penduduk miskin perkotaan Maret 2022 sebesar 10.565 dan turun 0.64 poin dibandingkan September 2021. Penduduk miskin pedesaan Maret 2022 sebesar 13.65% dan turun 0.34 poin dibandingkan September 2021.

II.3.2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, diperlukan suatu standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya, guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan meliputi partisipasi dan pemerataan Peserta Didik, kualitas hasil belajar Peserta Didik, untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik, serta kualitas dan pemerataan layanan pada satuan pendidikan.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan angka partisipasi kasar sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan bentuk lain yang sederajat, dan angka partisipasi sekolah anak usia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan Peserta Didik pada Pendidikan Khusus diukur melalui perhitungan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang mengikuti Pendidikan Khusus.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas hasil belajar Peserta Didik diukur melalui perhitungan kemampuan literasi Peserta Didik, kemampuan numerasi Peserta Didik, tingkat penyerapan lulusan SMK, dan budaya kerja lulusan SMK.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk pemerataan hasil belajar Peserta Didik diukur melalui perhitungan perbedaan nilai literasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan, perbedaan nilai literasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi, perbedaan nilai numerasi antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan, dan perbedaan nilai numerasi antara kelompok Peserta Didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah dan status sosial ekonomi tinggi.

Capaian pemenuhan SPM Pendidikan untuk kualitas dan pemerataan layanan diukur melalui perhitungan indeks iklim keamanan, dan indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas.

II.3.2.1. Perluasan Dan Pemerataan Peserta Didik

Perluasan dan pemerataan peserta didik adalah upaya untuk meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Perluasan peserta didik mencakup upaya untuk memperluas akses dan kesempatan pendidikan ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun lebih banyak sekolah, memperluas jaringan transportasi, dan memberikan bantuan finansial untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pemerataan peserta didik berarti mengurangi kesenjangan dalam hal kualitas pendidikan dan kesempatan belajar antara individu atau kelompok tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang sama bagi semua siswa, memberikan bantuan dan dukungan khusus untuk siswa yang membutuhkan, serta menyediakan kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa.

Perluasan dan pemerataan peserta didik sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan merata. Hal ini juga memiliki dampak positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi, seperti meningkatkan kemampuan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

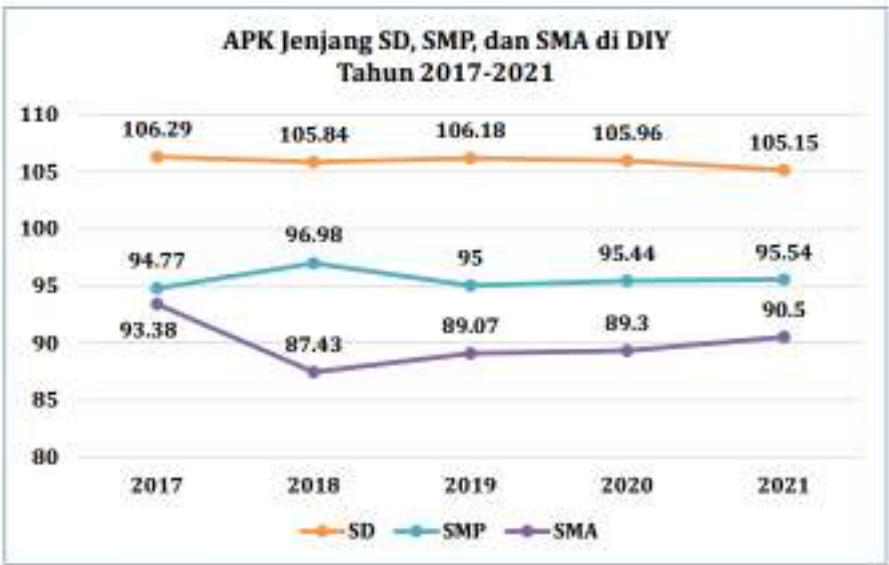
Dalam upaya perluasan dan pemerataan peserta didik, diperlukan dukungan dan kerjasama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini akan membantu meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Capaian perluasan dan pemerataan peserta didik dapat dilihat dari tiga indikator utama berupa Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

II.3.2.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat dari gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2.7.Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

Dari periode 2017-2021, capaian APK SD/sederajat menunjukkan capaian di atas 100%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terdapat anak yang sekolah di SD umurnya di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Sementara itu capaian APK SLTP DIY/sederajat belum 100% yang menunjukkan partisipasi penduduk pada jenjang tersebut masih belum optimal. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Tetapi melihat trend peningkatan APK jenjang SLTA dan sederajat menuju angka 100% menunjukkan semakin banyaknya anak usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA/sederajat.

II.3.2.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi

sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar 2.8. Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat meningkat, level APM terlihat semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini karena adanya kasus terlambat sekolah untuk jenjang SD dan tinggal kelas untuk jenjang SMP dan SMA. Capaian APM DIY untuk jenjang pendidikan SD dan SMP berkecenderungan mengalami penurunan dari tahun 2019 - 2021. Sementara itu, capaian APM tingkat SMA cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2019. Dilihat dari capaian APM per kabupaten/kota pada gambar 2.8, capaian APM jenjang SD pada tahun 2021 tertinggi di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 99,61% sedangkan yang terendah Kota Yogyakarta sebesar 98,93%. Capaian APM SD Kota Yogyakarta lebih rendah dikarenakan adanya peserta didik baru di Kota Yogyakarta yang masuk SD dengan usia dibawah 7 tahun. Hal ini juga berpengaruh pada capaian APM jenjang SMP dan SMA yang relatif lebih rendah daripada kabupaten lainnya.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar 2.9. Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2017-2022 di tiap kabupaten/kota DIY

II.3.2.1.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.



Sumber: BPS, diolah.

Gambar 2.10. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) semua Jenjang di DIY tahun 2017-2021

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk APS SD (usia 07-12 tahun) dan APS SMP (13-15 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian mendekati 100%. Sedangkan APS SMA (16-18) tahun menunjukkan trend meningkat menuju angka 90%. Untuk APS PT (19-24 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend stagnan di

kisarana 51% . dari hal tersebut maka perlu mendorong peningkatan APS SMA (16-18 tahun) dan APS PT (19-24 tahun).

II.3.2.2. Kondisi Mutu dan Kualitas Hasil Belajar

Peningkatan mutu dan kualitas hasil belajar merupakan tujuan utama dari pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik sehingga mereka dapat bersaing secara global dan menjadi pribadi yang mandiri serta berkontribusi dalam pembangunan negara. Peningkatan mutu dan kualitas hasil belajar dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Implementasi kurikulum yang efektif: Kurikulum yang efektif akan membantu siswa untuk belajar lebih baik dan memperoleh hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan kurikulum secara terus-menerus agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.
2. Penggunaan metode dan media pembelajaran yang bervariasi: Dalam pembelajaran, perlu digunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk memfasilitasi proses belajar. Metode dan media yang variatif akan membantu siswa untuk lebih tertarik dan memahami materi pelajaran dengan baik.
3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik: Guru yang berkualitas akan mampu membimbing siswa dalam belajar dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan terus-menerus bagi guru agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam mengajar.
4. Pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik: Selain fokus pada aspek akademik, perlu juga fokus pada pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, seperti moral dan etika.
5. Evaluasi dan monitoring hasil belajar secara terus-menerus: Evaluasi dan monitoring hasil belajar secara terus-menerus akan membantu pihak sekolah untuk mengetahui kualitas hasil belajar yang telah dicapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan melakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas hasil belajar tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di DIY dan menghasilkan peserta didik yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.

II.3.2.2.1 Capaian Literasi dan Numerasi Berdasar Hasil Asesmen Nasional

Asesmen Nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek meliputi dua aspek penting dalam pembelajaran, yaitu literasi dan numerasi. Literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tertulis dan non-tertulis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Sedangkan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, mengolah, dan menggunakan angka serta konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.

Dalam asesmen nasional, literasi dan numerasi diukur melalui tes yang dirancang khusus oleh Kemdikbudristek. Tes tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dan diberikan kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK. Hasil dari tes tersebut digunakan untuk mengevaluasi tingkat

literasi dan numerasi peserta didik serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pembelajaran.

Dalam mengukur literasi, tes yang diberikan mencakup berbagai aspek, antara lain pemahaman bacaan, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Sedangkan dalam mengukur numerasi, tes yang diberikan mencakup berbagai konsep matematika, seperti operasi hitung, aljabar, geometri, dan statistik.

Setelah dilakukan asesmen nasional, hasil yang diperoleh akan digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik dalam literasi dan numerasi. Kemudian, hasil tersebut akan menjadi acuan bagi pihak sekolah dan guru untuk merancang program pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik akan dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka, sehingga dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan di masa depan.



Sumber: data Kemdikbudristek

Gambar 2.11. Capaian Literasi dan Numerasi Hasil ANBK Jenjang SMA dan SMK di DIY Tahun 2022

Berdasarkan data capaian literasi dan numerasi hasil asesmen nasional di DIY untuk jenjang SMA dan SMK, dapat dikatakan bahwa rata-rata peserta didik memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Data capaian literasi DIY sebesar 2.08 menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik memiliki kemampuan literasi yang cukup baik, dengan skala nilai antara 1-3. Angka ini juga menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik di DIY memiliki kemampuan literasi yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya sebesar 1.80.

Sementara itu, capaian numerasi DIY sebesar 1.92 menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik memiliki kemampuan numerasi yang cukup baik, dengan skala nilai yang sama antara 1-3. Angka ini juga menunjukkan bahwa rata-rata peserta didik di DIY memiliki kemampuan numerasi yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya sebesar 1.67.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di DIY. Hasil asesmen nasional dapat menjadi acuan

bagi pihak sekolah dan guru untuk meningkatkan program pembelajaran dan strategi pengajaran yang lebih efektif. Selain itu, hasil asesmen nasional juga dapat menjadi acuan bagi pihak pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan yang tepat dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di DIY.

II.3.2.2.2. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kekurangan jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) akan menjadi permasalahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di DIY. Meskipun PTK DIY memiliki latar belakang pendidikan dan sertifikasi pendidik yang profesional dan berkualitas, penurunan jumlah PTK akan sangat berdampak pada pemenuhan layanan pendidikan. Kompetensi PTK dan ASN Dinas Dikpora DIY tidak perlu diragukan, namun seiring berjalannya waktu, ketidakseimbangan antara jumlah pegawai dan volume pekerjaan yang terus bertambah setiap tahunnya akan terjadi dan mulai mempengaruhi kinerja dan mutu layanan pendidikan itu sendiri. Dinas Dikpora DIY, yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menengah dan khusus di tingkat provinsi, memerlukan informasi mengenai ketersediaan guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.10. Jumlah Pendidik Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah Menurut Latar Belakang Pendidikan (Tahun 2022)

Wilayah	SMA					SMK				
	≤ SLTA	Diploma	D4/S1	≥ S2	Jml	≤ SLTA	Diploma	D4/S1	≥ S2	Jml
Bantul	22	6	825	175	1.028	39	28	1.288	144	1.499
Gunungkidul	20	5	422	101	548	35	28	1.124	140	1.327
Kulon Progo	4	2	356	51	413	18	24	844	73	959
Sleman	35	8	957	158	1.158	71	46	1.362	165	1.644
Yogyakarta	24	17	1.024	203	1.286	36	25	990	153	1.204
Jumlah	123	38	3.584	688	4.433	199	151	5.608	675	6.633

Wilayah	MA				
	≤ SLTA	Diploma	D4/S1	≥ S2	Jml
Bantul	21	7	481	109	618
Gunungkidul	19	1	179	28	227
Kulon Progo	3	1	161	28	193
Sleman	19	3	601	117	740
Yogyakarta	1	1	207	64	273
Jumlah	63	13	1.629	346	2.051
Sumber data: Profil Pendidikan Disdikpora DIY Tahun 2022					

Berdasarkan data terbaru, jumlah keseluruhan PTK mencapai 13.117 orang. Sebanyak 95,52% PTK memiliki latar belakang pendidikan D-4/S-1, yang menunjukkan bahwa jumlah PTK jenjang pendidikan menengah yang memiliki kualifikasi mengajar yang memadai. Sedangkan 4,48% PTK lainnya memiliki pendidikan setingkat Diploma 1-3, SMA atau lebih rendah, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan lebih lanjut. Namun, pada umumnya PTK yang memiliki latar belakang Diploma 1-3 dan SMA/lebih rendah berusia di atas 50 tahun dan sudah bekerja dalam waktu yang lama.

Sedangkan untuk status kepegawaian guru yang ada di DIY pada jenjang pendidikan menengah dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.11. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah Berdasar Status kepegawaian (Tahun 2022)

Wilayah	SMA					SMK				
	ASN	GTJ	GTT	Honor Daerah	Jml	ASN	GTJ	GTT	Honor Daerah	Jml
Bantul	637	154	236	1	1.028	623	469	404	3	1.499
Gunungkidul	338	108	101	1	548	495	524	304	4	1.327
Kulon Progo	304	35	72	2	413	365	369	217	8	959
Sleman	484	354	315	5	1.158	478	731	431	4	1.644
Yogyakarta	422	448	412	4	1.286	573	301	327	3	1.204
Jumlah	2.185	1.099	1.136	13	4.433	2.534	2.394	1.683	22	6.633

Wilayah	MA				
	ASN	GTJ	GTT	Honor Daerah	Jml
Bantul	163	281	173	1	618
Gunungkidul	35	154	38	0	227
Kulon Progo	119	15	59	0	193
Sleman	200	290	250	0	740
Yogyakarta	116	63	94	0	273
Jumlah	633	803	614	1	2.051
Sumber data: Profil Pendidikan Disdikpora DIY Tahun 2022					

Dari Tabel 2.11, terlihat bahwa jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Jenjang Pendidikan Menengah DIY yang memiliki status sebagai ASN sebanyak 5.352 orang atau sekitar 40,80%. Sementara itu, sekitar 56,48% sisanya memiliki status GTJ, GTT, dan tenaga honorer daerah. Data ini mencakup semua guru yang mengajar di sekolah negeri dan swasta, sehingga tidak mengherankan jika masih ada guru non-ASN. Meskipun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa ketika seorang guru menginginkan perubahan status yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan, maka sekolah swasta juga mengalami kesulitan dalam memenuhi jumlah guru, terutama jika guru yang sebelumnya berstatus GTT atau GTJ dan mengajar di sekolah swasta menjadi ASN dan ditempatkan di sekolah negeri.

Informasi tentang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pada jenjang pendidikan khusus, yang mencakup data mengenai guru dan tenaga kependidikan yang tersedia, serta sertifikasi pendidik pada jenjang pendidikan khusus disajikan dalam beberapa tabel berikut.

Tabel 2.12. Jumlah Pendidik dan Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus Menurut Latar Belakang Pendidikan (Tahun 2022)

Wilayah	Guru						Kepala Sekolah				
	SD-SMA	D1-3	S1	S2	No Ket	Jml	SD-SMA	D1-3	S1	S2	Jml
Bantul	10	1	294	19	0	324	0	0	16	4	20
Gunungkidul	8	8	138	7	0	161	1	0	12	0	13
Kulon Progo	2	5	96	6	0	109	0	0	6	2	8
Sleman	11	11	343	21	0	386	0	0	19	10	29
Yogyakarta	5	4	161	15	0	185	0	1	6	2	9
DIY	36	29	1.032	68	0	1.165	1	1	59	18	79
Sumber data: Profil Pendidikan Disdikpora DIY Tahun 2022											

Berdasarkan tabel 2.12, dapat diketahui bahwa 94,42% dari Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) pada Sekolah Luar Biasa (SLB) memiliki latar belakang pendidikan minimal D-4/S-1. Sementara itu, 97,47% dari Kepala Sekolah SLB juga memiliki latar belakang pendidikan minimal D-4/S-1. Terdapat 79 SLB, 9 SLBN, dan 70 SLBS di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan persentase ini menunjukkan kualitas dan kemampuan pengajar dan pendidik SLB yang tinggi di DIY. Meskipun demikian, dari total jumlah Guru dan Kepala Sekolah SLB, masih ada 67 orang (5,38%) yang memiliki latar belakang pendidikan di bawah D-4/S-1. Namun, angka ini menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, dan juga merupakan hasil dari kebijakan pembatasan pendidikan minimal D-4/S-1 dalam penerimaan PTK selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.13. Jumlah Pendidik dan Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus Yang Memiliki Sertifikasi Pendidik (Tahun 2022)

Wilayah	Guru			Kepala Sekolah		
	Sudah	Belum	Jml	Sudah	Belum	Jml
Bantul	210	114	324	18	2	20
Gunungkidul	62	99	161	7	6	13
Kulon Progo	56	53	109	7	1	8
Sleman	246	140	386	25	4	29
Yogyakarta	119	66	185	6	3	9
DIY	693	472	1.165	63	16	79
Sumber data: Profil Pendidikan Disdikpora DIY Tahun 2022						

Meski demikian, belum semua PTK SLB memiliki sertifikasi pendidik. Dari total keseluruhan PTK SLB baru sekitar 59.48% yang memiliki sertifikasi pendidik. Memperhatikan angka ini, membandingkan dengan persentase PTK SMA dan SMK, dimana jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Pemda DIY dengan capaian yang berkisar hampir sama maka dapat dikatakan program kerja peningkatan mutu dan kompetensi PTK DIY memiliki pola kerja dan capaian yang sama. Tidak dilakukan perbedaan perlakuan antara jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Peningkatan kompetensi PTK melalui sertifikasi pendidikan terbuka bagi semua PTK SMA, SMK dan SLB DIY.

Tabel 2.14. Jumlah Pendidik dan Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus Berdasar Status Kepegawaian (Tahun 2022)

Wilayah	Guru				Kepala Sekolah		
	PNS	GTY	GTT	Jumlah	PNS	GTY	Jumlah
Bantul	147	136	41	324	11	9	20
Gunungkidul	43	106	12	161	3	10	13
Kulon Progo	46	52	11	109	6	2	8
Sleman	164	207	15	386	20	9	29
Yogyakarta	113	39	33	185	5	4	9
DIY	513	540	112	1.165	45	34	79
Sumber data: Profil Pendidikan Disdikpora DIY Tahun 2022							

II.3.2.3. Kondisi Relevansi Pendidikan

Pendidikan vokasi di SMK adalah salah satu jenis pendidikan yang fokus pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan teknis dan praktis yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Relevansi pendidikan vokasi di SMK sangat penting dalam hubungannya dengan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja dan kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK.

Pertama, relevansi pendidikan vokasi di SMK sangat penting untuk meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja. Ketika kurikulum pendidikan vokasi di SMK disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dunia kerja, maka siswa akan mendapatkan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Hal ini akan membuat lulusan SMK lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Kedua, relevansi pendidikan vokasi di SMK juga penting dalam meningkatkan kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK. Dengan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri, lulusan SMK akan menjadi karyawan yang produktif dan berkontribusi positif bagi perusahaan. Hal ini akan meningkatkan kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK dan membuka peluang karir yang lebih baik di masa depan.

Oleh karena itu, penting bagi SMK untuk terus meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dengan terus memperbarui kurikulum dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri. SMK juga perlu bekerja sama dengan perusahaan untuk menyediakan magang dan kerja sama dengan perusahaan sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman kerja yang praktis. Dalam hal ini, siswa SMK perlu juga dilatih untuk mengembangkan keterampilan soft skills seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan problem-solving untuk mendukung kesuksesan di dunia kerja. Dengan demikian, relevansi pendidikan vokasi di SMK dapat meningkatkan keterserapan lulusan SMK di dunia kerja dan kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK.

Relevansi pendidikan terkait dengan keterserapan lulusan SMK dan kepuasan dunia kerja terhadap budaya lulusan SMK di DIY pada tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.15. Kondisi Relevansi Pendidikan di DIY pada Jenjang SMK

NO	Nama Indikator	Nilai DIY	Capaian	Rata-rata nasional
1	Penyerapan lulusan SMK	36.42%	Tinggi	27%
2	Kuliah	20.25%	Baik	18.57%
3	Bekerja	47.37%	Sedang	29.93%
4	Wirausaha	26.67%	Perlu Peningkatan	27.39%
5	Kesesuaian bidang kerja	36.8%	Cukup Sesuai	36.73%
6	Kompetensi lulusan SMK	42.4%	Cukup	33.6%
7	Lulusan dengan sertifikat keahlian	46.35%	Cukup	31.74%
8	Kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan	76.9%	Memadai	70.91%

II.3.3. Kondisi Kepemudaan dan Olahraga

Pengelolaan kepemudaan dan olahraga di suatu daerah sangat penting untuk memajukan kualitas hidup masyarakat, terutama generasi muda. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengelolaan kepemudaan dan olahraga penting:

1. Meningkatkan Kesehatan Fisik dan Mental: Olahraga adalah cara yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kegiatan olahraga dapat membantu mencegah berbagai penyakit, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Selain itu, olahraga juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental.
2. Mengembangkan Bakat Olahraga: Melalui pengelolaan olahraga yang baik, daerah dapat mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat olahraga yang ada di daerah tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan prestasi olahraga dan membuka peluang bagi atlet untuk berkarier di tingkat nasional maupun internasional.
3. Mendorong Kemandirian dan Kepemimpinan: Pengelolaan kepemudaan dan olahraga dapat membantu mendorong kemandirian dan kepemimpinan di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan seperti program mentoring dan pelatihan kepemimpinan, generasi muda dapat belajar mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan bekerja sama dalam tim.
4. Meningkatkan Pariwisata: Pengelolaan olahraga yang baik dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata. Daerah yang memiliki fasilitas olahraga yang baik dan prestasi olahraga yang mengesankan dapat menarik perhatian wisatawan untuk datang dan mengunjungi daerah tersebut.
5. Meningkatkan Kualitas Hidup: Kegiatan olahraga dan kepemudaan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain mengurangi risiko penyakit dan stres, olahraga juga dapat membantu mengurangi perilaku buruk, seperti kecanduan narkoba dan alkohol.

Dalam rangka memanfaatkan manfaat-manfaat tersebut, pengelolaan kepemudaan dan olahraga harus diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah yang lebih luas. Hal ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi olahraga setempat untuk membangun infrastruktur olahraga yang memadai, menyediakan pelatihan dan program mentoring untuk generasi muda, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan.

II.3.3.1. Kepemudaan

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah salah satu alat pengukur yang digunakan untuk menilai kemajuan dan perkembangan pemuda dalam suatu negara atau wilayah. IPP terdiri dari sejumlah variabel seperti tingkat pendidikan, kesehatan, keterlibatan sosial, ekonomi, dan keamanan.

IPP didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengembangan dan kesejahteraan pemuda. Melalui pengukuran IPP, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memperbaiki kebijakan dan program yang berhubungan dengan pemuda.

Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pengukuran IPP, antara lain:

1. Pendidikan: Tingkat pendidikan pemuda adalah salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan dan kesejahteraan pemuda. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kemungkinan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat.
2. Kesehatan: Kesehatan fisik dan mental adalah faktor penting dalam pembangunan pemuda. Oleh karena itu, IPP juga memperhitungkan tingkat kesehatan dan akses ke layanan kesehatan.
3. Keterlibatan sosial: Keterlibatan sosial adalah faktor penting dalam pembangunan pemuda karena dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam masyarakat dan membuat perubahan positif.
4. Ekonomi: Peningkatan ekonomi adalah hal penting bagi pemuda karena dapat membantu meningkatkan kemampuan finansial dan meningkatkan kemandirian.
5. Keamanan: Keamanan adalah faktor penting dalam pembangunan pemuda karena dapat mempengaruhi kesejahteraan dan stabilitas.

Setelah variabel-variabel tersebut dihitung dan dinilai, akan diperoleh nilai IPP. Nilai IPP yang lebih tinggi menunjukkan kemajuan yang lebih baik dalam pembangunan pemuda. Dalam prakteknya, IPP dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan kebijakan dan program yang memperhatikan kebutuhan dan harapan pemuda dalam suatu negara atau wilayah. Selain itu, IPP juga dapat membantu pemerintah dalam memonitor dan mengevaluasi kemajuan dan perkembangan pemuda dari waktu ke waktu.

II.3.3.2. Keolahragaan

Sport Development Index (SDI) adalah salah satu alat pengukur yang digunakan untuk menilai kemajuan dan perkembangan olahraga dalam suatu negara atau wilayah.

SDI mengevaluasi kemajuan dan perkembangan dalam olahraga melalui beberapa indikator seperti partisipasi, kebijakan, fasilitas, investasi, prestasi, dan lain-lain.

SDI mempertimbangkan tiga aspek utama dalam pengukuran, yaitu:

1. Partisipasi: Aspek partisipasi meliputi jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan olahraga, baik sebagai atlet, pelatih, maupun penggemar. Indikator-partisipasi meliputi jumlah atlet, klub olahraga, acara olahraga, dan jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan olahraga.
2. Kelembagaan: Aspek kelembagaan meliputi kebijakan, regulasi, dan lembaga terkait olahraga. Indikator kelembagaan meliputi struktur organisasi, program olahraga, kebijakan pemerintah, dan dukungan finansial dari pemerintah atau pihak swasta.
3. Prestasi: Aspek prestasi meliputi pencapaian atlet dan tim olahraga dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional. Indikator prestasi meliputi jumlah medali yang diperoleh dalam kejuaraan olahraga, prestasi individu dan tim, dan sejarah prestasi olahraga suatu negara.

II.3.4. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Sasaran OPD

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Realisasi %
1	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing dan non - diskriminatif	Rata-rata hasil ujian nasional SMA	58,41	N/A	N/A
		Rata-rata hasil ujian nasional SMK	58,29	N/A	N/A
		Persentase guru layak mengajar jenjang pendidikan menengah	98,63%	98,66%	100,03%
		Capaian APK Pendidikan Menengah	99,74%	119,58%	119,89%
		Capaian APK Pendidikan Khusus	86,50%	91,84%	106,17%
2	Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda	Persentase peningkatan pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan kepemudaan	11,8%	11,86%	100,51%
3	Meningkatnya kapasitas olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Prestasi cabang olahraga	Peringkat 8 POPNAS	N/A	N/A

Dari tabel 2.16 dapat dilihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, realisasi terhadap 4 (empat) indikator telah melebihi target yang ditetapkan, dan 3 (tiga) indikator tidak dapat diketahui realisasinya. Hal ini dikarenakan:

1. Tidak tersedia data rata-rata hasil ujian nasional SMA dan SMK pada tahun 2022 (N/A) karena sesuai ketentuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, ujian nasional ditiadakan mulai tahun 2021. Dengan demikian, persentase realisasi terhadap target tidak tersedia (N/A). Capaian target indikator pada tahun 2022 mencerminkan capaian tahun akhir perencanaan periode 2017-2022, namun data capaian tersebut tidak tersedia (N/A).
2. Pada tahun 2022, tidak ada penyelenggaraan POPNAS. Dengan demikian data capaian prestasi cabang olahraga dengan target peringkat yang diperoleh pada POPNAS tidak tersedia (N/A) sehingga persentase realisasi terhadap target tidak dapat dihitung (N/A).

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Tabel 2.17. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

No	Bidang	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Tantangan	Peluang/Opportunity
	Sekretariat	Pemenuhan layanan administrasi kebutuhan rumah tangga Dinas Dikpora DIY	Dinas Dikpora DIY merupakan kantor pemerintah yang menangani bidang pendidikan sehingga banyak menerima kunjungan baik dari instansi vertikal, instansi pemerintah dari daerah di luar DIY, <i>stakeholder</i> maupun masyarakat umum sehingga menjadikan Dikpora sebagai kantor yang cukup padat akan beban penyediaan layanan dan penyelesaian pekerjaan	Penyediaan meja layanan atau <i>help desk</i> sehingga tidak mengganggu kinerja kantor, dengan SDM yang dibekali cukup pengetahuan akan hal-hal dasar terkait pendidikan
			Beban pekerjaan yang padat dan hampir semua memiliki tenggang waktu yang cukup singkat maka perlu didukung oleh penyediaan sarana prasarana dimana peralatan dan perlengkapan yang tersedia saat ini tidak semuanya dalam kondisi optimal	Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan perkantoran yang memadai dan bisa digunakan secara optimal tanpa mengurangi waktu dan kemampuan kerja
		Administrasi pengelolaan keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Manajemen perkantoran dan penataan SDM sehingga setiap seksi/sub-bagian dan bidang/bagian dapat lebih maksimal dalam bekerja
			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang belum mampu diselesaikan secara <i>on time (real time report)</i>	Jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan tidak sebanding dengan jumlah SDM yang tersedia

No	Bidang	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Tantangan	Peluang/Opportunity
		Pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berikut penataan SDM sebagai upaya peningkatan tata kelola perkantoran	Penataan dan pengelolaan SDM yang semakin berkurang sedangkan beban pekerjaan semakin bertambah	Peningkatan kapasitas SDM sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan
	Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	Dinamika perencanaan dan penganggaran yang harus sesuai dengan kaidah peraturan dan dokumen perencanaan lainnya sebagai acuan dan rujukan penyusunan perencanaan perangkat daerah	Jadwal dan pola perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun dengan tenggat waktu yang selalu sempit dan singkat	Penyusunan jadwal kerja yang sesuai dengan kegiatan perencanaan daerah dan perencanaan pusat sehingga pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dinas dapat tepat waktu
		Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan	Beban pekerjaan yang banyak dan berat sehingga mengurangi waktu yang tersedia bagi pelaksana kegiatan untuk penyiapan laporan capaian dan realisasi kinerja	Sistem pelaporan capaian dan realisasi kinerja untuk setiap kegiatan dan sub-kegiatan yang bersifat <i>on time</i> sehingga data-data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi dan monitoring dapat tersedia tepat waktu
	Pendidikan Menengah	Pemenuhan layanan pendidikan menengah terkait peningkatan partisipasi, mutu pendidikan dan kualitas lulusan pendidikan menengah	Masih adanya penduduk DIY jenjang usia pendidikan menengah yang masih belum mengenyam bangku sekolah	Mengembalikan atau menyekolahkan penduduk DIY yang putus sekolah dan/atau belum bersekolah melalui pemberian beasiswa
			Masih adanya sekolah yang melakukan penahanan terhadap ijazah siswa atau lulusan diakibatkan belum melakukan pelunas biaya pendidikan	Menghilangkan praktik-praktik sepihak oleh sekolah yang merugikan peserta didik dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengaturan serta bantuan yang dibutuhkan bagi peserta didik dan/atau lulusan yang dirugikan oleh sekolah
			Masih adanya kesenjangan dalam memperoleh pendidikan antara siswa miskin dan siswa kaya baik terkait dengan fasilitas pendidikan yang dapat diakses dan/atau kebutuhan pendidikan lainnya	Pelaksanaan sistem PPDB yang mengedepankan asas terbuka, non-diskriminatif dengan aturan-aturan yang mendorong akses dan partisipasi dari masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan
				Pengurangan kesenjangan sosial dalam sekolah dengan mendorong prestasi melalui pembinaan minat dan bakat siswa tanpa melihat latar belakang sosial

No	Bidang	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Tantangan	Peluang/Opportunity
				Memberikan bantuan sosial kepada siswa miskin yang berbakat, cerdas dan mampu berprestasi dalam mengejar asa dan harapan bagi kehidupan mereka dikemudian kelak
			Masih adanya sekolah-sekolah yang belum berakreditasi A	Peningkatan mutu dan kualitas satuan pendidikan dengan mendorong adanya program dan kegiatan peningkatan standar pendidikan untuk memenuhi kriteria penilaian akreditasi A
			Manajemen sekolah selama pandemi Covid-19	Pengaturan pembelajaran jarak jauh selama <i>lockdown</i> dan status PPKM daerah naik ke level 3
				Penyediaan alokasi anggaran untuk berlangganan internet dan membeli kuota, maupun pembelian aplikasi yang memudahkan sistem pembelajaran jarak jauh
				Pengaturan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan memperhatikan level PPKM daerah dan kondisi sekolah mampu menerapkan prosedur kesehatan atau tidak, 100% apabila mampu dan 50% apabila tidak bisa menyediakan ruang kelas dengan meja berjarak dan hal lain terkait prosedur kesehatan.
				Mendorong program vaksinasi dengan sasaran siswa didik
			Menjaga hubungan kerja dengan lembaga/organisasi profesi pendidikan	Menciptakan dan menjalin serta memelihara hubungan kerja yang saling mendukung dalam membangun dunia pendidikan yang lebih baik dan bermanfaat
	Pendidikan Khusus	Pemenuhan layanan pendidikan khusus terkait peningkatan partisipasi, mutu pendidikan dan kualitas lulusan pendidikan khusus dan layanan khusus	Masih adanya penduduk DIY penyandang disabilitas yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan khusus	Upaya untuk mendorong penduduk disabilitas usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus baik berupa pengembalian maupun sebagai siswa baru
			Masih adanya rasa malu bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas sehingga tidak diberikannya kesempatan dalam kehidupan, disembunyikan oleh keluarga	Advokasi dan pendampingan bagi keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas bahwa ke-tuna-an bukanlah suatu sebab untuk tidak memberikan kesempatan hidup yang sama dan adil

No	Bidang	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Tantangan	Peluang/Opportunity
				sebagaimana orang "normal" lainnya
				Pengembangan kurikulum pendidikan khusus berupa penyesuaian ke-tuna-an dengan pendidikan kemandirian, daya guna dan bahkan kewirausahaan bagi lulusan pendidikan khusus
			Pendataan pendidikan khusus sebagai upaya pemetaan kondisi penduduk disabilitas dengan tingkat partisipasi peserta didik pada jenjang pendidikan khusus	Mengetahui dengan pasti kondisi disabilitas usia sekolah yang berada di DIY sebagai upaya mendorong peningkatan layanan pendidikan khusus
	Guru dan Tenaga Kependidikan	Pemenuhan kebutuhan pemetaan dan pendataan guru dan tenaga kependidikan	Belum adanya pendataan satu pintu terkait guru dan tenaga kependidikan sehingga sedikit menyulitkan pada saat mencari dan mengolah data GTK sebagai baseline	Pengembangan aplikasi GTK yang sudah ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan data yang dibutuhkan dalam upaya perencanaan dan penganggaran sebagai baseline kinerja untuk tahun-tahun berikutnya
			Belum adanya pengolahan data terkait kebutuhan dan pemenuhan GTK yang bersifat menyeluruh, meskipun ada masih bersifat parsial sehingga menyulitkan dalam menggunakan dan menganalisis data GTK terkait pemenuhan	Pengembangan "one door one source" data GTK sehingga dapat dilakukan pengelolaan terkait pemetaan, sebaran, kelebihan, dan kekurangan GTK pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
	Balai Pendidikan Menengah Kab/Kota	Koordinator dan fasilitator pelaksanaan dan pengawasan satuan pendidikan menengah Kab/Kota	Balai Dikmen sebagai perpanjangan kewenangan Dinas Dikpora terhadap satuan pendidikan kewenangan provinsi yang terletak di Kab/Kota belum didukung dengan SDM yang memadai baik jumlah maupun kapasitas terhadap beban pekerjaan yang dimiliki	Peningkatan kapasitas kemampuan dan kompetensi SDM Balai Dikmen sehingga meski didukung oleh jumlah yang tidak banyak namun mampu menyelesaikan beban dan volume pekerjaan yang ada dan pengaturan alur pekerjaan sehingga tidak menumpuk pada satu orang atau satu seksi dikarenakan Balai Dikmen bertanggungjawab selaku koordinator satuan pendidikan menengah kabupaten/kota
			Jarak dengan Dinas Dikpora yang berbeda-beda jauhnya sehingga dalam hal koordinasi yang membutuhkan respons cepat mengalami kendala	penggunaan sarana teknologi secara optimal untuk memudahkan koordinasi dan pemenuhan kebutuhan administrasi yang mesti dilakukan secara cepat dan <i>ontime</i>
	Balai Latihan dan Pendidikan Teknis	Penyediaan sarana prasarana pelatihan dan pendidikan sebagai daya dukung terhadap peningkatan mutu dan revitalisasi pendidikan vokasi	Alat-alat bengkel dan <i>workshop</i> yang masih belum semua mengikuti kebutuhan dan kemajuan perkembangan teknik dan teknis	Penyediaan peralatan dan perlengkapan bengkel/ <i>workshop</i> sesuai dengan tujuan dan kemajuan perkembangan teknik dan teknis sehingga dapat mendukung upaya BLPT sebagai lembaga sertifikasi

No	Bidang	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Tantangan	Peluang/Opportunity
	Balai Telekomunikasi Pendidikan	Peningkatan pemanfaatan dan penggunaan TIK sebagai metode dalam proses belajar mengajar	Penyediaan media pembelajaran dengan pemanfaatan TIK yang masih belum bisa diakses oleh seluruh masyarakat	Membuka lebih banyak kesempatan atau akses dengan menggunakan platform media sosial dan penyediaan <i>link</i> pada <i>website</i> BTKP sehingga guru maupun masyarakat dapat mendapatkan memanfaatkan media pembelajaran yang ada
			Penyesuaian antara kurikulum pendidikan dengan media belajar elektronik	Menambah jumlah media belajar yang diproduksi BTKP yang sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional sehingga makin banyak mata pelajaran yang terintegrasi metode pembelajarannya dengan media pembelajaran sistem TIK
			Peningkatan kapasitas, kemampuan dan ketrampilan guru dalam penggunaan gadget dan penyusunan materi mata pelajaran yang diampu	Program kegiatan yang menasar peningkatan mutu, kualitas, kapasitas dan ketrampilan guru dalam menggunakan peralatan teknologi sebagai media pembelajaran
	Balai Pemuda dan Olahraga	Upaya peningkatan peran serta dan kapasitas pemuda dalam pembangunan bangsa	Evaluasi keberhasilan pelatihan kewirausahaan pemuda untuk mengetahui seberapa banyak dari pemuda yang mendapat pelatihan yang sebenarnya mampu berwirausaha dalam artian sebenarnya	Mengetahui dengan pasti tingkat keberhasilan pelatihan dan pendampingan yang sudah diberikan dalam membentuk kemandirian kewirausahaan pemuda
			Pemanfaatan kondisi demography kependudukan yaitu "Bonus Demografi Penduduk"	Penciptaan kreasi kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan membentuk jaringan pengaman sehingga ada satu rangkaian dengan hasil akhir kepastian dimana pemuda dapat benar mandiri
				Menciptakan lingkaran dan jaring pengaman yang dibentuk dengan kerjasama <i>stakeholder</i> , dunia usaha dunia industri sehingga pemuda dapat tersalurkan melalui penciptaan lapangan kerja atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri
		Upaya peningkatan prestasi olahraga DIY baik terhadap atlet pelajar maupun atlet umum	Penambahan jumlah atlet pelajar yang berbakat dan berpotensi dalam cabang olahraga unggulan DIY	Penambahan pelaksanaan <i>event</i> kejuaraan olahraga <i>single</i> dan <i>multi event</i> untuk menjaring atlet-atlet berbakat berprestasi potensi emas yang dapat menjadi atlet elite nasional dan atau internasional
			Pembinaan dan peningkatan kapasitas kualitas atlet pelajar melalui KKO	Penataan jadwal pembelajaran KKO sehingga siswa dapat belajar sebagaimana siswa

No	Bidang	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Tantangan	Peluang/Opportunity
				umumnya dan juga dapat berlatih sesuai porsinya sebagai atlet
				Penyusunan kurikulum pembelajaran umum dan kurikulum olahraga sehingga terjadi keseimbangan antara kewajiban sebagai siswa dengan kewajiban sebagai atlet
			Mengembangkan " <i>Talent Pool</i> " atlet pelajar dan atlet umum untuk memudahkan pemetaan potensi dan pemusatan peningkatan kualitas atlet	Pengembangan <i>website</i> olahraga yang diupdate dengan kondisi terbaru terkait cabang olahraga, atlet, pelatih dan prestasi diraih sehingga terlihat kondisi prestasi DIY dan capaian prestasi yang diraih melalui cabang olahraga, kejuaraan dan medali sepanjang tahun berjalan
			Peningkatan minat masyarakat akan olahraga rekreasi melalui pemassalan olahraga dengan memanfaatkan ruang-ruang publik	Meningkatkan <i>event-event</i> olahraga rekreasi atau olahraga yang bersifat massal di ruang-ruang publik yang mudah diakses dan diikuti oleh masyarakat
			Peningkatan industri olahraga dan <i>Sport tourism</i> DIY	Meningkatkan jumlah <i>event</i> keolahragaan tingkat daerah, nasional maupun internasional melalui penyediaan sarana pendukung dan penggunaan sarana prasarana olahraga DIY
				Sarana prasarana olahraga DIY yang sudah memenuhi standar internasional sehingga dapat menjadi ikon baru bahwa DIY dapat menjadi pusat penyelenggaraan <i>event</i> olahraga yang memiliki bibit-bibit atlet berbakat kualitas internasional

Tabel 2.18. Kekuatan, Kesempatan, Keinginan dan Hasil (Analisis SWOT)

	Strength	No	Opportunities
1.	Kualitas SDM Dinas Dikpora DIY (Non-PTK) sebanyak 75,83% berada dalam Golongan III dan IV sehingga dapat diasumsikan bahwa sebagian besar SDM yang bekerja di Dinas Dikpora memiliki latar belakang pendidikan minimal S-1	1.	Tingkat latar belakang pendidikan ASN Dinas Dikpora (ini adalah ASN non-guru) yang minimal adalah S-1 maka dapat diasumsikan bahwa ASN Dinas Dikpora memiliki kemampuan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk mendukung capaian dan keterlaksanaan program kegiatan sebagai wujud kinerja layanan bidang pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	57,49% ASN Dinas Dikpora DIY berusia 50 tahun kebawah	2.	Dengan kekuatan ASN yang hampir 50% lebih masih berusia muda maka diharapkan adanya dinamika bekerja dengan semangat, efektif dan efisien dalam pelaksanaan dan penyelesaian

	Strength	No	Opportunities
			pekerjaan dengan tidak meninggalkan aturan, norma dan tata susila
3.	Dinas Dikpora DIY memiliki tenaga kontrak dengan latar belakang pendidikan tinggi (S-1) untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan program bidang pendidikan.	3.	Memiliki tenaga bantu/kontrak dengan latar belakang pendidikan S-1 maka diharapkan dapat berfungsi sebagai penyangga pada urusan administrasi sehingga pekerjaan dapat terlaksana baik secara fisik maupun non fisik seperti laporan dan penyelesaian dokumen-dokumen perkantoran lain yang dibutuhkan, berikut dengan kemampuan penggunaan peralatan perkantoran seperti komputer secara lebih cepat dan tepat.
4.	Kewenangan Dinas Dikpora DIY untuk jenjang pendidikan khusus dan pendidikan menengah, urusan pemuda dan olahraga serta urusan keistimewaan bidang kebudayaan	4.1	Sesuai dengan kewenangan maka Dinas Dikpora DIY merupakan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, urusan pemuda dan olahraga
		4.2	Dinas Dikpora DIY memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus melalui penyediaan satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus
		4.3	Dinas Dikpora DIY mengelola kebutuhan dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		4.4	Penyediaan kurikulum muatan lokal untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus melalui integrasi kurikulum nasional dengan nilai-nilai muatan lokal budaya Yogyakarta sebagai bagian dari pemenuhan urusan keistimewaan bidang kebudayaan
5.	Kinerja pendidikan Dinas Dikpora DIY untuk kinerja pemerataan, mutu dan efisiensi rata-rata sebesar 85,03% untuk tahun 2021	5.	Penyusunan program dan kegiatan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang disesuaikan antara tujuan dan sasaran prioritas nasional, tujuan dan sasaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada Renstra Kemendikbudristek 2020-2024, serta tujuan dan sasaran pemuda dan olahraga pada Renstra Kemenpora 2020-2024.
6.	Mutu layanan dan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan sebagai upaya mendorong angka partisipasi peserta didik dan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik	6.1	Penguatan dan peningkatan kemampuan pendidik dalam penyusunan materi pembelajaran literasi numerasi sehingga berfungsi efektif dalam kegiatan belajar, bekerja dan berinteraksi sepanjang hayat.
		6.2	Pengembangan literasi numerasi secara sistematis dan berkelanjutan, baik dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun pembelajaran di luar kelas (ekstrakurikuler)
7.	21.22% penduduk DIY adalah pemuda, dengan 1/5 kekuatan penduduk DIY adalah pemuda maka DIY memiliki kemampuan untuk lebih mendorong peningkatan dan pengembangan potensi daerah	7.1	Pemanfaatan dan mendorong "Bonus Demography" dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan sehingga pemuda DIY mampu bersaing dalam angkatan kerja dan peningkatan kualitas DIY melalui produktivitas pemuda DIY melalui sektor lapangan pekerjaan formal maupun wirausaha
		7.2	Pengelolaan dan penanaman nilai-nilai dan wawasan kebangsaan kepada pemuda sebagai pertahanan bangsa dalam melawan radikalisme, terorisme, penggunaan narkoba, perudungan, kekerasan terhadap anak dan perempuan serta penyakit menular sebagai bagian dalam menciptakan generasi muda penerus bangsa yang mampu mendorong dan

	Strength	No	Opportunities
			membawa bangsa dan negara khususnya DIY kearah yang lebih baik di masa depan
8.	Prestasi olahraga DIY pada tingkat nasional pada saat PON PAPUA 2021 pada 15 besar merupakan wujud nyata prestasi olahraga DIY	8.1	Pengelolaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sebagai bagian dari manajemen bersama antara Dinas Dikpora melalui BPO dengan organisasi olahraga daerah dan nasional
		8.2	Pelaksanaan <i>single</i> dan <i>multi event</i> kejuaraan olahraga yang dilaksanakan secara rutin sebagai seleksi atas atlet-atlet berbakat, berpotensi yang masih berusia muda dan dapat dibina sehingga dapat masuk dalam kategori atlet elite yang mampu bersaing pada kancah nasional dan internasional
		8.3	Penyediaan sarana prasarana infrastruktur olahraga dengan standar internasional sebagai bagian dari upaya peningkatan prestasi olahraga DIY dan pengembangan Sport Tourism DIY
9.	Peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman akan budaya sebagai nilai-nilai kehidupan yang hidup dalam masyarakat dan pribadi berkembang	9.1	Integrasi dan penanaman kembali nilai-nilai budaya Yogyakarta dalam metode pembelajaran mulai dari satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagai upaya pembentukan masyarakat DIY yang berpendidikan dan berkarakter dengan nilai agama dan budaya sebagai acuan dan pegangan dalam melaksanakan kaidah kehidupan sehari-hari
		9.2	Pemahaman dan penanaman pengertian akan definisi budaya, fungsi dan peran budaya kepada peserta didik (generasi muda) sehingga muncul adanya pemahaman bahwa budaya adalah keseluruhan aspek dan segi kehidupan itu sendiri dengan nilai dan kaidah serta arti hakiki hidup untuk memunculkan rasa hormat pada budaya dan kebudayaan yang timbul dari budaya itu sendiri.
10.	Jalinan kemitraan dengan <i>stakeholder</i> dan lembaga/organisasi pendidikan, pemuda maupun olahraga baik yang berlokasi di DIY, luar DIY maupun Internasional	10.1	Kemitraan dengan KONI dan NPC pada bidang olahraga untuk pembangunan olahraga dan olahraga para.
		10.2	Kemitraan dengan Kwarda untuk pembangunan pemuda melalui organisasi kepramukaan.
		10.3	Kemitraan dengan Dunia Usaha Dunia Industri untuk pengembangan dan peningkatan mutu layanan dan daya serap lulusan SMK pada Dunia Usaha Dunia Industri
		10.4	Kemitraan dengan Dewan Pendidikan dalam pembangunan pendidikan DIY yang berkualitas dan berkarakter khas Yogyakarta.
		10.5	Kemitraan dengan POKJA PAUD dalam mewujudkan Pendidikan Usia Dini yang Holistik Integral dengan mengedepankan nilai-nilai santun rukun.
		10.6	Kemitraan dengan Taman Siswa dalam upaya mengajarkan kembali ajaran dan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara dan Budaya Yogyakarta dalam pendidikan itu sendiri.
		10.7	Kemitraan dengan Melbourne Victoria Australia dalam pertukaran pelajar dan budaya
		10.8	Kemitraan dengan MKKS dalam peningkatan mutu dan kualitas Kepala Sekolah

	Strength	No	Opportunities
		10.9	Kemitraan dengan MGMP dalam peningkatan mutu dan kualitas guru mata pelajaran
No	Aspirations	No	Results
1.	Pembangunan pendidikan yang berkesinambungan dan terkoordinasi dengan baik antara pusat dan daerah sehingga hasil capaian dan prestasi DIY bidang pendidikan semakin tinggi.	1.	Indeks pembangunan manusia DIY baik
2.	Penilaian capaian kinerja yang sesuai dengan arah tujuan dan sasaran pembangunan secara nasional dalam bidang pendidikan sehingga memudahkan dalam mengarahkan hasil dan kualitas mutu hasil layanan pendidikan DIY	2.1	APK pendidikan menengah DIY mencapai di atas 100%
		2.2	APM pendidikan menengah DIY masuk dalam kategori tinggi , (75-85%)
3.	Peningkatan jumlah pemuda DIY yang mampu mandiri secara ekonomi, sosial dan budaya dengan bekerja pada sektor pemerintah atau sektor swasta dengan bekerja pada perusahaan swasta atau bekerja melalui wirausaha dan membuka/menciptakan lapangan kerja.	3.1	Indeks Pembangunan Pemuda DIY baik
		3.2	Jumlah pemuda yang bekerja dan/atau wirausaha
4.	Peningkatan prestasi olahraga DIY baik mengenai olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi baik dalam perolehan medali atau peringkat di tingkat nasional, pengembangan dan pembentukan <i>talent pool</i> dari atlet-atlet pelajar dan serta peningkatan jumlah masyarakat yang berolahraga secara massal, klub maupun individu.	4.1	Prestasi olahraga DIY masuk dalam 10 besar nasional
		4.2	Jumlah atlet pada cabang olahraga potensi emas pada kejuaraan tingkat nasional dan internasional bertambah
5.	Peningkatan karakter muda, kuat, toleran dan memiliki sifat tolong menolong, bertanggung jawab melalui organisasi pramuka.	5.	Jumlah peserta didik dan pemuda yang terlibat dan mengikuti kegiatan pramuka
6.	Pembangunan karakter penduduk DIY sejak usia dini melalui PAUD yang mengedepankan pendidikan secara menyeluruh dengan mengutamakan prinsip santun dan rukun.	6.	Jumlah penduduk DIY usia 0-6 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan usia dini meningkat
7.	Pengajaran dan pengenalan kembali nilai-nilai ajaran dan filosofi KI Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan yang berasal dari Yogyakarta sehingga lulusan DIY memiliki nilai lebih dalam memahami diri pribadi dan lingkungan alam sekitar.	7.	Sekolah Model Taman Siswa
8.	Pengembangan kualitas lulusan DIY dengan mempelajari dan mendapatkan pengalaman langsung untuk berinteraksi dan merasakan kehidupan mandiri dalam negara, daerah, budaya dan nilai-nilai sosial yang berbeda sehingga mampu menyiapkan diri sebagai bagian dari penduduk global.	8.	<i>Student transfer to stay and live in Victoria Melbourne Australia for roughly 16 days to gain experience and life learning based on real host family to get a better understanding of how other country, region and area culture, habits and customs also value, norm and attitude</i>
9.	Pengembangan mutu dan kualitas kepala sekolah sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas satuan pendidikan	9.	Jumlah KS yang memiliki CAKEP bertambah
10.	Pengembangan mutu dan kualitas guru mata pelajaran sebagai upaya peningkatan hasil belajar, sehingga siswa memiliki kemampuan dan kapasitas yang seharusnya.	10.	Jumlah guru yang memiliki sertifikat mengajar bertambah

Tabel 2.19. Analisa SOAR Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

Internal Eksternal	STRENGTH Daftar Faktor Kekuatan Internal		OPPORTUNITIES Daftar Faktor Peluang Eksternal	
	1	SDM Dikpora DIY 75.83% adalah golongan III dan IV, dan berpendidikan S1	1	Perkembangan teknologi <i>RI 4.0</i> dan <i>Society 5.0</i>
	2	Guru Pendidikan Menengah DIY 96.15% memiliki kelayakan mengajar dengan pendidikan D4/S1 dan S2, dan sebanyak 55.66% sudah memiliki sertifikasi pendidik	2	Revitalisasi pendidikan menengah khususnya SMK
	3	Guru Pendidikan Khusus DIY 94.56% memiliki kelayakan mengajar, berpendidikan S1 dan S2, serta sebanyak 57.44% sudah memiliki sertifikasi pendidik	3	Merdeka belajar pada ABK dengan memfokuskan pada peningkatan kemandirian, percaya diri dan mawas diri sesuai porsi dan kemampuan ABK berdasar jenis dan kategori ketunaan
	4	SMA DIY sebanyak 150 SMA sudah berakreditasi “A” dan 16 SMA berakreditasi “B” dari jumlah keseluruhan 168 sekolah.	4	Mutu dan kualitas lulusan SMA DIY tinggi dan mampu meneruskan ke perguruan tinggi
	5	SLB DIY sebanyak 65 SLB berakreditasi “A” dan 12 SLB berakreditasi “B” dari jumlah keseluruhan SLB 79 sekolah.	5	Lulusan SLB DIY memiliki kualitas dan kemampuan yang penuh percaya diri, mandiri, penuh semangat serta bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
	6	Kinerja pendidikan Dinas Dikpora DIY untuk kinerja pemerataan, mutu dan efisiensi rata-rata sebesar 85.03% untuk tahun 2021	6	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus DIY, serta urusan keistimewaan bidang kebudayaan
	7	21.22% penduduk DIY adalah pemuda, 1/5 kekuatan DIY adalah pemuda	7	“ <i>Bonus Demography</i> ” sebagai faktor pembangunan dan pendukung sektor ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan negara
	8	Prestasi olahraga DIY pada PON Papua 2021 berada pada peringkat 15 nasional	8	Pengembangan dan peningkatan jalinan kerjasama dengan <i>stakeholder/</i> lembaga/organisasi olahraga
<i>ASPIRATION</i>				
Pendidikan berkesinambungan dari pusat sampai daerah sehingga capaian prestasi DIY bidang pendidikan semakin tinggi	1.1	Meningkatkan kualifikasi SDM dari pendidikan S1 ke pendidikan S2 dan S3 untuk meningkatkan capaian prestasi DIY bidang pendidikan, pemuda dan olahraga	1.1	Meningkatkan prestasi DIY dalam bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi (<i>RI 4.0 dan Society 5.0</i>)
	1.2	Meningkatkan jumlah guru pendidikan menengah layak mengajar untuk	1.2	Meningkatkan mutu lulusan peserta didik pendidikan menengah DIY dengan

Internal Eksternal	STRENGTH Daftar Faktor Kekuatan Internal		OPPORTUNITIES Daftar Faktor Peluang Eksternal	
		mendapatkan sertifikasi pendidik		penguatan sistem belajar mengajar dengan memiliki pendidik layak mengajar dan memiliki sertifikat pendidik
	1.3	Meningkatkan jumlah guru pendidikan khusus layak mengajar untuk mendapatkan sertifikasi pendidik	1.2	Meningkatkan mutu lulusan peserta didik pendidikan khusus DIY dengan penguatan sistem belajar mengajar dengan memiliki pendidik layak mengajar dan memiliki sertifikat pendidik
	1.4	Meningkatkan mutu pendidikan dengan mendorong sekolah pendidikan menengah yang belum berakreditasi "A" untuk meningkatkan capaian penilaian standar pendidikan nasional	1.4	Meningkatkan standar capaian prestasi peserta didik pendidikan menengah melalui hasil <i>assesment</i> nasional diatas rata-rata nasional
	1.5	Meningkatkan mutu pendidikan dengan mendorong sekolah pendidikan khusus yang belum berakreditasi "A" untuk meningkatkan capaian penilaian standar pendidikan nasional	1.5	Meningkatkan standar capaian prestasi didik pendidikan khusus melalui hasil <i>assesment</i> nasional
	1.6	Memasukkan nilai-nilai budaya khas kejojgaan dalam materi pembelajaran dan penyusunan kurikulum muatan lokal	1.6	Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan DIY dengan memasukkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal melalui pendidikan khas kejojgaan sehingga lulusan DIY tidak hanya cerdas namun juga memiliki nilai-nilai kepribadian yang luhur, santun dan bersahaja
Kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi bidang pendidikan untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan DIY yang mengedepankan Pendidikan Khas Kejojgaan		Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan dan lulusan DIY dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur budaya dalam pendidikan khas kejojgaan		Kolaborasi, kerjasama dan peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga/organisasi bidang pendidikan dalam upaya mengedepankan pendidikan khas kejojgaan dalam pendidikan DIY
Kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi pusat sampai daerah yang berkesinambungan untuk pembangunan dan peningkatan capaian prestasi pemuda DIY		Peningkatan mutu dan kualitas prestasi pemuda DIY baik secara lokal maupun nasional melalui peningkatan karakter, kemandirian dan kompetensi pemuda pada sektor ekonomi, sosial dan budaya		Kolaborasi, kerjasama dan peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga/organisasi pemuda dalam upaya pembangunan pemuda DIY mandiri, cerdas dan berbudaya

Internal Eksternal	STRENGTH Daftar Faktor Kekuatan Internal		OPPORTUNITIES Daftar Faktor Peluang Eksternal	
Kemitraan dan kerjasama dengan lembaga/organisasi pusat sampai daerah yang berkesinambungan untuk pembangunan dan peningkatan capaian prestasi olahraga DIY		Peningkatan mutu dan kualitas prestasi olahraga DIY baik terhadap olahraga prestasi, olahraga pendidikan maupun olahraga rekreasi sebagai upaya pembangunan ketahanan dan kesehatan masyarakat DIY		Kolaborasi, kerjasama dan peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga/organisasi olahraga dalam upaya mengedepankan dan memajukan capaian prestasi olahraga DIY pada tingkat nasional dan internasional
<i>RESULTS</i>				
APK pendidikan menengah mencapai 100%	a	Peningkatan jumlah partisipasi peserta didik secara terbuka dan non-diskriminatif pada pendidikan menengah sebagai upaya peningkatan kinerja pemerataan pendidikan	a.1	Pemanfaatan dan penggunaan perkembangan teknologi <i>RI 4.0</i> dan <i>Society 5.0</i> dalam sistem penerimaan peserta didik baru
			a.2	Penambahan ruang kelas/ rombongan belajar pada satuan pendidikan menengah untuk menambah kuota peserta didik baru
APM pendidikan menengah DIY masuk dalam kategori tinggi (75-85%)	a	Peningkatan jumlah penduduk usia 16-18th yang bersekolah sesuai usia dan layanan pendidikan yang diharapkan sebagai upaya peningkatan kinerja pemerataan pendidikan	a.1	Mendorong adanya kemudahan dalam penerimaan peserta didik baru sehingga penduduk DIY usia 16-18 thn mendapatkan layanan pendidikan sesuai antara usia dan jenjang pendidikan yang seharusnya
			a.2	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik pendidikan menengah untuk mengurangi angka putus sekolah
Pendidikan Holistik Integral mulai dari PAUD, Dikdas, Dikmen, Diksus dan Perguruan Tinggi dengan mengedepankan Pendidikan Khas Kejojgaan	a	Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan DIY pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus melalui penilaian akreditasi sekolah	a.1	Prestasi sekolah yang ditunjukkan melalui mutu lulusan yang diterima pada perguruan tinggi dan animo masyarakat pada saat PPDB terhadap satuan pendidikan menengah DIY
	b	Penambahan kapasitas dan kualitas pendidik dengan materi pembelajaran yang mengandung muatan lokal dengan mengedepankan pendidikan khas kejojgaan	b.1	Penambahan pengetahuan dan pengayaan terhadap peserta didik melalui pendidikan khas kejojgaan sehingga mutu lulusan DIY memiliki nilai tambah selain prestasi akademik
Indeks pembangunan pemuda DIY kategori baik/tinggi	a	Peningkatan mutu kualitas pemuda DIY sehingga indeks pembangunan pemuda DIY masuk dalam kategori baik/tinggi	a.1	Pengembangan program dan kegiatan dengan memfokuskan pada pembangunan dan pemanfaatan " <i>bonus</i>

Internal Eksternal	STRENGTH Daftar Faktor Kekuatan Internal		OPPORTUNITIES Daftar Faktor Peluang Eksternal	
				<i>demography</i> " pada sektor ekonomi, sosial dan budaya
			a.2	Peningkatan hubungan kerjasama dan koordinasi antar instansi dan antar mitra organisasi untuk peningkatan mutu kualitas pemuda DIY
Prestasi olahraga DIY masuk dalam peringkat 10 besar nasional	a	Peningkatan prestasi olahraga DIY dari 15 besar di tahun 2021 menjadi 10 besar pada pelaksanaan PON 2024	a.1	Peningkatan hubungan kerjasama dan koordinasi antar instansi dan antar mitra organisasi untuk peningkatan capaian prestasi olahraga DIY
			a.2	Peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi atlet elite DIY yang mampu bertanding dan mengikuti kejuaraan/ <i>event</i> nasional/ internasional
			a.3	Peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi pelatih dan tenaga keolahragaan sebagai upaya peningkatan kemampuan dalam melatih dan mendorong lebih potensi atlet berbakat DIY

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasar pada tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY maka akan terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu identifikasi permasalahan umum dan identifikasi permasalahan spesifik pelayanan pendidikan. Masing-masing kategori akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Identifikasi Permasalahan Umum

a) Bencana Alam

Pendidikan kebencanaan dan upaya mitigasi bencana menjadi kebutuhan nyata karena DIY memiliki beberapa bencana alam, sekurangnya terdapat tujuh kawasan rawan bencana, antara lain;

- Kawasan rawan letusan gunung berapi di lerang Gunung Merapi Kabupaten Sleman;
- Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul;
- Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul;
- Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul;
- Kawasan rawan angin topan di seluruh Kabupaten/Kota;
- Kawasan rawan gempa bumi di seluruh Kabupaten/Kota;
- Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.

b) Gangguan Ketertiban dan Keamanan

Meningkatnya kenakalan remaja, baik dari segi jumlah maupun jenisnya, sering menjadi topik pemberitaan di surat kabar lokal. Perilaku remaja seperti Klithih yang mencuri uang untuk bersenang-senang, menganiaya teman atau orang lain hanya karena bertatapan mata, bahkan pembunuhan oleh remaja usia sekolah, dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana berat yang sangat memprihatinkan. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa anak-anak sekolah melakukan tindakan kriminal tersebut apakah disebabkan oleh sistem pendidikan yang hanya fokus pada kuota dan bukan pada kualitas, pendidik yang hanya mengejar jam mengajar, orang tua yang terlalu bergantung pada sekolah dan tidak memainkan peran sebagai orang tua yang sebenarnya, atau masyarakat yang terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga tidak ada lagi kontrol sosial yang efektif.

Anak-anak sekolah yang dibiarkan berkeliaran di luar jam belajar, bergaul tanpa pengawasan keluarga, dan kurang memiliki empati dan simpati terhadap kondisi dan situasi baik di keluarga, sekolah, dan masyarakat, dipengaruhi oleh pergaulan dengan teman sebaya yang cenderung

mengkhawatirkan. Mereka berpikir bahwa bergabung dengan geng akan membuat mereka terlihat keren.

Gangguan ketertiban dan keamanan yang berhubungan dengan perilaku anak sekolah, terutama sebagai pelaku kriminal, harus ditangani dengan serius. Hal ini memerlukan perubahan pada sistem pendidikan yang menekankan pada nilai-nilai luhur dan budi pekerti, serta mengakui kondisi riil masyarakat.

c) Tumbuhnya Kota Lain Sebagai Pusat Pendidikan

Dengan populasi penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta, pendidikan menjadi aspek yang penting. Meskipun D.I. Yogyakarta telah diakui sebagai Kota Pendidikan, wilayahnya yang terbatas tidak dapat memenuhi seluruh permintaan dan harapan untuk menempuh pendidikan di daerah tersebut. Situasi ini mengakibatkan berbagai daerah lain mulai menjadi penyelenggara, pengelola, dan pelaksana pendidikan sehingga daerah-daerah tersebut menjadi pusat pendidikan tersendiri. Sebagai Kota Pendidikan, D.I. Yogyakarta berhasil memposisikan dirinya sebagai tujuan utama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi. Namun, untuk mempertahankan julukan ini dan membuktikan bahwa Kota Pendidikan hanya ada di DIY, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing, kompetensi, kualitas, dan kuantitas pendidikan dengan memperkuat pendidikan Yogyakarta yang berbasis budaya.

d) Meningkatnya Peluang Penyalahgunaan Narkoba, Teknologi Informasi & Komunikasi, Pergaulan Bebas, HIV & AIDS

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk karakter dan kepribadian individu serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia secara positif. Namun, terdapat berbagai permasalahan di bidang pendidikan yang terkait dengan meningkatnya peluang penyalahgunaan narkoba, teknologi informasi dan komunikasi, pergaulan bebas, HIV dan AIDS.

Permasalahan yang pertama adalah meningkatnya peluang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti lingkungan yang kurang mendukung, tekanan sosial, serta kurangnya pemahaman mengenai bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Akibatnya, para pelajar cenderung terjerumus ke dalam lingkaran kecanduan narkoba yang berdampak pada prestasi akademik mereka.

Permasalahan selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pelajar, seperti penggunaan gadget secara berlebihan, akses internet yang tidak terkontrol, dan penyebaran konten negatif melalui media sosial. Hal ini dapat mengganggu proses belajar-mengajar, merusak konsentrasi, serta memicu terjadinya kejahatan cyber. Selain itu, penggunaan gadget juga berdampak pada kesehatan mental dan fisik pelajar.

Permasalahan ketiga adalah pergaulan bebas yang dilakukan oleh pelajar. Fenomena ini dapat mengakibatkan penurunan moral dan etika serta berdampak negatif pada kegiatan belajar-mengajar. Pergaulan bebas juga meningkatkan risiko terjadinya tindak kejahatan seperti pelecehan seksual dan penganiayaan.

Permasalahan terakhir yang berkaitan dengan pendidikan adalah meningkatnya kasus HIV dan AIDS di kalangan pelajar. Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai cara penularan HIV dan AIDS, serta perilaku seksual yang tidak sehat. Kondisi ini dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan mempengaruhi prestasi akademik pelajar.

e) Adanya fenomena yang mengindikasikan penyebaran berbagai paham yang potensial untuk memecah belah maupun menumbuhkan pola kehidupan yang eksklusif baik sebagai individu maupun kelompok

Permasalahan di bidang pendidikan saat ini terkait dengan fenomena penyebaran berbagai paham yang berpotensi untuk memecah belah dan menumbuhkan pola kehidupan yang eksklusif baik sebagai individu maupun kelompok. Fenomena ini terjadi karena terdapat kelompok-kelompok atau individu-individu yang mengambil keuntungan dari kelemahan dan ketidakpastian masyarakat, khususnya dalam hal pendidikan.

Salah satu contoh paham yang berpotensi memecah belah adalah radikalisme. Fenomena ini terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa yang menerima paham radikal melalui media sosial atau ceramah di luar kampus. Paham ini dapat memicu tindakan kekerasan dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selain itu, terdapat pula fenomena intoleransi yang muncul di kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini terlihat dari adanya kelompok-kelompok yang menganggap bahwa pendapat mereka adalah yang benar dan orang lain yang berbeda pendapat dianggap salah. Fenomena ini dapat menghambat dialog dan kerja sama yang seharusnya terjadi di lingkungan pendidikan.

Permasalahan lain yang terkait dengan fenomena ini adalah meningkatnya kecenderungan untuk hidup secara eksklusif. Misalnya, beberapa kelompok pelajar dan mahasiswa hanya berinteraksi dengan orang yang seagama, sebangsa, atau sejenis saja. Hal ini berdampak pada penurunan toleransi dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang.

Dalam hal ini, peran pendidikan sangat penting untuk mengatasi fenomena ini. Pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk belajar dan berkembang, serta meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, pendidikan juga harus mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga siswa dapat menjadi generasi yang menghargai keberagaman dan merespons berbagai paham dengan bijak dan rasional.

2) Identifikasi Permasalahan Khusus

a) Peningkatan jumlah partisipasi penduduk usia sekolah untuk mendapatkan Pendidikan yang layak dan sesuai

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022, daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses dan kemudahan dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang usia. Membuka kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan layanan minimal yang harus diberikan sebagai bentuk kewajiban di bidang pendidikan. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2021, tercantum bahwa Target dan Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk Indikatr Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah dan Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus ditetapkan sebesar 100%, sehingga diharapkan bahwa partisipasi peserta didik sebagai harus mencapai 100% sebagai perwujudan dari perluasan pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai merupakan hal yang sangat penting. Pendidikan yang layak dan sesuai adalah hak bagi setiap anak untuk mengejar masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang layak, anak-anak dapat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang produktif dan sukses di masa depan.

Selain itu, peningkatan jumlah penduduk usia sekolah yang mendapatkan pendidikan yang layak juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan yang baik dapat mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan terampil, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global.

Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun karakter dan nilai-nilai positif pada generasi muda. Pendidikan yang layak dapat membentuk individu yang bertanggung jawab, memiliki integritas, dan berperilaku baik. Dengan jumlah penduduk usia sekolah yang mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai, maka diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih baik, berkembang dan maju.

Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan komitmen dari semua pihak terkait dalam mendukung peningkatan kualitas dan akses pendidikan yang layak dan sesuai bagi seluruh anak usia sekolah di negara ini. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan program pendidikan yang inovatif, peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.

b) Penerapan nilai-nilai budaya khas Yogyakarta sebagai upaya meningkatkan serta memperbaiki karakter peserta didik agar menjadi individu yang unggul, berkebudayaan, berkarakter, dan berpendidikan.

Penerapan nilai-nilai budaya pada peserta didik menjadi semakin penting di tengah kemajuan dan tuntutan teknologi yang terus berkembang. Ada beberapa permasalahan yang muncul dalam penerapan nilai budaya pada peserta didik di era digital ini, antara lain:

1. Minimnya Pemahaman tentang Nilai Budaya: Seiring dengan berkembangnya teknologi, budaya menjadi semakin tergusur dan dianggap kurang relevan. Oleh karena itu, banyak peserta didik yang kehilangan pemahaman tentang nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Hal ini dapat mengakibatkan generasi muda kehilangan rasa memiliki dan kecintaan terhadap budaya serta kurang menghargai nilai-nilai budaya yang telah diwariskan.
2. Tidak Terintegrasi dalam Pembelajaran: Kurangnya integrasi nilai-nilai budaya dalam kurikulum dan pembelajaran juga menjadi masalah di era teknologi ini. Banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang lebih fokus pada pembelajaran teknologi daripada nilai-nilai budaya, sehingga peserta didik kurang mendapatkan pengenalan dan pembelajaran tentang budaya.
3. Tuntutan Teknologi yang Mengabaikan Budaya: Dalam era teknologi, peserta didik seringkali lebih tertarik dengan penggunaan teknologi daripada menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya. Teknologi membuat peserta didik tergoda untuk mengabaikan nilai-nilai budaya yang mereka miliki.
4. Perubahan Nilai Budaya: Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat mempengaruhi perubahan nilai budaya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya antara generasi sebelumnya dan generasi sekarang.

Dalam menghadapi permasalahan penerapan nilai budaya pada peserta didik di tengah kemajuan dan tuntutan teknologi, maka diperlukan upaya yang lebih aktif dan terpadu dalam melestarikan nilai budaya sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pendidik perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai budaya, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pembelajaran, dan mengajak peserta didik untuk mempertahankan serta menghargai nilai-nilai budaya yang telah ada.

c) Revitalisasi Pendidikan vokasi

Pendidikan vokasi di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) memiliki peran penting dalam mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pentingnya pendidikan vokasi di SMK, antara lain:

1. Minimnya peminatan terhadap jurusan vokasi di SMK
Masih banyak siswa yang lebih memilih jurusan umum di SMA daripada jurusan vokasi di SMK. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai peluang kerja setelah lulus atau stigma negatif terhadap jurusan vokasi. Sehingga, diperlukan upaya untuk meningkatkan informasi

mengenai peluang kerja di bidang vokasi dan menghilangkan stigma negatif tersebut.

2. Kurangnya keterampilan dan kompetensi siswa SMK

Beberapa siswa SMK memiliki keterampilan dan kompetensi yang kurang memadai untuk memasuki dunia kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan industri, atau kurangnya fasilitas dan peralatan yang memadai di SMK. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri dan meningkatkan fasilitas dan peralatan di SMK.

3. Keterbatasan peluang kerja

Meskipun lulusan SMK memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, namun masih terdapat keterbatasan peluang kerja yang tersedia di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan di daerah setempat atau kurangnya keterampilan yang dibutuhkan oleh industri di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah tersebut.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di SMK. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan informasi mengenai peluang kerja di bidang vokasi, mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, meningkatkan fasilitas dan peralatan di SMK, menciptakan lapangan pekerjaan baru di daerah setempat, dan meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Dengan demikian, diharapkan lulusan SMK memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang baik dan mendukung perekonomian.

d) Pemanfaatan dan peningkatan fungsi UKS pada sekolah sebagai upaya menjaga sekolah tetap sebagai tempat yang aman, nyaman dan sehat

UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan sekolah serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga kesehatan. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait UKS di sekolah, di antaranya:

1. Kurangnya perhatian dari pihak sekolah: Beberapa sekolah mungkin kurang memperhatikan program UKS sehingga tidak memberikan dukungan yang cukup. Hal ini dapat mengakibatkan program UKS tidak berjalan dengan optimal dan tidak terlaksana secara merata di seluruh siswa.
2. Tidak adanya perencanaan yang matang: Program UKS yang sukses memerlukan perencanaan yang matang, termasuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang muncul di sekolah, menentukan prioritas, dan menentukan kegiatan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran siswa.
3. Kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat: Orang tua dan masyarakat sekitar sekolah juga harus mendukung program UKS. Jika

tidak ada dukungan dari masyarakat, program UKS tidak akan efektif dan terkadang kurang disadari oleh siswa.

4. Kurangnya sumber daya: Program UKS memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk tenaga kesehatan dan dana. Kurangnya sumber daya dapat mengakibatkan program UKS tidak berjalan dengan baik dan kurang memberikan dampak yang signifikan.
5. Tidak adanya evaluasi: Evaluasi program UKS yang teratur sangat penting untuk mengetahui apakah program tersebut berjalan dengan baik dan efektif. Tanpa evaluasi, sulit untuk mengetahui apakah program UKS memberikan manfaat yang optimal bagi siswa.

e) Peningkatan prestasi dan penambahan *talent pool* bagi atlet berprestasi DIY

Penambahan *talent pool* olahraga di DIY sangatlah penting dalam pengembangan olahraga berprestasi di daerah tersebut. Dengan meningkatkan jumlah atlet muda yang berkualitas, DIY akan memiliki potensi besar untuk meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional.

Salah satu cara untuk menambah *talent pool* olahraga di DIY adalah dengan meningkatkan jumlah sekolah yang memiliki program olahraga yang berkualitas. Pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap sekolah-sekolah yang memiliki program olahraga yang baik, seperti memberikan bantuan dana untuk pengembangan fasilitas olahraga, memperbanyak pelatihan untuk tenaga pengajar dan pelatih olahraga, serta memberikan penghargaan kepada siswa yang berhasil meraih prestasi di bidang olahraga.

Dalam jangka panjang, penambahan *talent pool* olahraga di DIY akan dapat meningkatkan daya saing di bidang olahraga. Selain itu, peningkatan *talent pool* olahraga juga dapat berdampak positif bagi pembangunan ekonomi daerah, seperti meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke DIY untuk melihat atau berpartisipasi dalam event olahraga yang diselenggarakan di DIY.

III.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

RPJMD DIY 2022-2027 diformulasikan dalam konteks merumuskan visi dan misi pemerintah, di mana Gubernur Yogyakarta langsung diangkat oleh pemerintah pusat. Perumusan RPJMD DIY menggabungkan pemikiran dan arahan gubernur dengan realitas masalah dan potensi yang dihadapi oleh masyarakat Yogyakarta, baik secara internal maupun eksternal. Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), visi RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan visi sebelumnya, yaitu "Among Tani Dagang Layar" (2012-2017) dan "Menyongsong Abad Samudera" (2017-2022). Ketiga dokumen perencanaan tersebut menekankan filsafat Hamemayu Hayuning Bawana sebagai dasar bagi pembangunan di Yogyakarta, yang berarti melindungi dan memelihara keamanan alam dan gaya hidup masyarakat Yogyakarta, Indonesia, dan dunia. Hubungan antara pembangunan manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan harus selaras untuk mencapai keberlanjutan Yogyakarta di masa depan.

Program-program besar yang diuraikan dalam RPJPD 2005-2025, RPJMD 2012-2017, dan RPJMD 2017-2022 seperti program maritim dan kelautan, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan regional, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, budaya, tata ruang yang berkelanjutan, dan infrastruktur adalah arah program berkelanjutan dari RPJPD 2005-2025 hingga RPJMD 2017-2022. Berdasarkan kontinuitas antara RPJPD 2005-2025, RPJMD 2012-2017, dan RPJMD 2017-2022, tema "Menyongsong Abad Samudera Hindia" akan diangkat kembali sebagai tema utama untuk rencana pembangunan 2022-2027. Tema ini masih relevan dengan isu-isu saat ini dan masa depan terkait posisi Yogyakarta dalam konteks nasional dan global.

Dalam konteks nasional, tujuan pembangunan nasional saat ini diarahkan untuk mencapai **Indonesia Emas 2045**, dengan pencapaian sebagai berikut:

- Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai IPTEK
- Ekonomi yang maju dan berkelanjutan
- Pembangunan yang merata dan inklusif
- Negara yang demokratis, kuat dan bersih

Terhadap isu nasional tersebut, DIY diharapkan mampu berperan serta dan memberikan kontribusi yang cukup massif terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Guna membangun konsistensi dan kesinambungan substansi pemikiran-pemikiran yang telah terkandung dalam Visi Menyongsong Abad Samudera Hindia dan terkait dengan isu-isu global dan nasional, maka Visi Gubernur untuk kurun waktu lima tahun ke depan (2022-2027) memiliki relatifitas terhadap realita yang dihadapi dengan tujuan utama yaitu **untuk lebih mewujudkan kekurangan pencapaian pada visi-Misi sebelumnya** (yaitu "*Renaissance Yogyakarta /Among Tani Dagang Layar 2012-2017*" dan "*Menyongsong Abad Samudera untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017-2022*"), yang kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Pancamulia), serta sekaligus menanggapi isu-isu nasional maupun global saat ini.

Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di atas, maka Visi Gubernur DIY 2022-2027 adalah:

*Terwujudnya **PANCAMULIA** Masyarakat Jogja melalui Reformasi
Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya
Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.*

Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungan, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terwujudnya Pancamulia, menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti:

- 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan
- 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan

- 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram
- 4) Kehidupan ekonomi yang layak
- 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)
- 6) *Good Governance* pada berbagai tingkatan.

Kawasan selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Kawasan ini mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul sebagai wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relative tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Kawasan selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan territorial (*territorial speciality*), yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan territorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Reformasi Kalurahan diletakan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situaso, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Secara empiris, kondisi tersebut diatas telah membawa perubahan-perubahan besar pada tatanan sosial, tatanan budaya, tatanan ekonomi dan bahkan tatanan ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan menjadi solusi untuk menjawab kompleksitas perubahan, serta menjawab permasalahan dan tantangan yang muncul. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta menjadi pilihan yang tepat sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman masalah yang dihadapi.

Lembaga Kalurahan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Peran Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi adalah alat untuk mempercepat transformasi spansial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengelolaan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

MISI: berdasarkan **Visi** yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan Misi. Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang

harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari Visi *Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Bidang Pendidikan Tahun 2022-2027

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1.1) Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)			6.22	6.32	6.42	6.52	6.62	6.72
			1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,22	80,63	81,01	81,36	81,6B	81,97
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	73,39	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18
3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI	3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi			A	A	A	A	A	A
			3.1.1) Meningkatnya Good Governance	SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA

III.3. Telaahan Renstra K/L

III.3.1. Telaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Tabel 3. 2. Visi dan Misi RPJMN 2020-2024

VISI	MISI (NAWACITA KEDUA)
TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG	Peningkatan kualitas manusia Indonesia
	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
	Pembangunan yang merata dan berkeadilan
	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

- a. **Pembangunan SDM** adalah membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- b. **Pembangunan Infrastruktur** adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- c. **Penyederhanaan Regulasi** adalah menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- d. **Penyederhanaan Birokrasi** adalah memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

- e. **Transformasi Ekonomi** adalah melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 68.6 persen atau 181,3 juta jiwa dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 45,7. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018, ditemukan bahwa masih terdapat sekitar 4,4 juta anak usia 7-18 tahun di Indonesia yang tidak atau belum mendapatkan layanan pendidikan (anak tidak sekolah/ATS). Hal ini disebabkan oleh rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak kebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.

Selain itu, partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Tinggi (PT) juga masih sangat rendah, yaitu masing-masing sebesar 36.06 persen, dan 30.19 persen. Adanya kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Terlihat pada rasio APK 20 persen penduduk termiskin dibandingkan 20 persen terkaya pada jenjang menengah dan tinggi pada tahun 2018, masing-masing sebesar 0.67 dan 0.16. Selain itu, kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah juga masih tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lintas sektor yang lebih optimal untuk meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis yang menjadi penyebab ATS. Selain itu, perlu juga diupayakan peningkatan kualitas layanan pendidikan untuk anak kebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.

Dalam hal ini, pemerintah harus mengoptimalkan partisipasi pendidikan pada jenjang PAUD dan PT dengan mengadakan program-program yang mampu memotivasi masyarakat untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah. Pemerintah juga harus memperhatikan kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi dan antarwilayah dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Peningkatan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*) belum berjalan secara optimal dan merata antarwilayah. Meskipun telah dilakukan upaya, namun hasil *Program for International Students Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa proporsi siswa yang mampu melebihi standar minimum kompetensi matematika, sains, dan literasi selama periode 2006-2018 masih tergolong rendah. Pada PISA 2018, proporsi siswa yang mampu melebihi standar minimum kompetensi matematika dan membaca masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.



Gambar 3.1. Proporsi Anak Kelas 9 di Atas Standar Minimum Kemampuan Matematika, Sains, dan Membaca pada Tes PISA

Prestasi olahraga juga menjadi salah satu indikator daya saing SDM Indonesia. Namun, capaian prestasi olahraga Indonesia masih tertinggal dan belum didukung oleh budaya olahraga yang baik. Indonesia telah sukses sebagai tuan rumah pada Asian Games 2018 dan berhasil memperoleh peringkat ke-4 dari sebelumnya peringkat ke-17 pada Asian Games tahun 2014. Akan tetapi di tingkat dunia, Indonesia hanya mampu memperoleh satu medali emas pada Olimpiade tahun 2016 di Brazil. Budaya olahraga masyarakat yang belum naik ditunjukkan oleh penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir sebesar 31,39 persen pada tahun 2018, meningkat sedikit dari 27,61 persen pada tahun 2015 (MSBP-BPS). Pembangunan budaya olahraga perlu ditempuh melalui pemassalan olahraga untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

III.3.2. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sebagai kementerian yang mengembang amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi

Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.



Gambar 3.2. Profil Pelajar Pancasila

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai NAWACITA KEDUA, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita Kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan Bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemendikbud pada tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter	Menguatnya karakter peserta didik
4.	Pelestarian dan pemajuan budaya, Bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan
5.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

No	Tujuan	Sasaran Strategis
	partisipatif, transparan, dan akuntabel	

**Tabel 3.4. Agenda Pembangunan RPJMD 2020-2024
yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kemendikbud**

No	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan		Strategi
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1.	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
			2.	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun;
			3.	Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
			4.	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah;
			5.	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.
		Meningkatkan produktivitas dan daya saing	1.	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industry; dan
			2.	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas.
2.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1.	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
			2.	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsive;
			3.	Pembinaan ideology Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.
		Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan	1.	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antarwarga;

No	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan		Strategi
		kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia		
			2.	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
			3.	Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
			4.	Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
			5.	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan
		Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas	1.	Peningkatan budaya literasi
			2.	Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan
			3.	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.



Gambar 3.3. Kebijakan Merdeka Belajar

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbudristek untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbudristek Periode 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
1.	Optimalisasi angka partisipasi pendidikan	a)	Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat	1)	Meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita
				2)	Membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD
				3)	Menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD
				4)	Mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD
				5)	Menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (crowdfunding)
				6)	Menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD
		b)	Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat	1)	Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana
				2)	Mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana
				3)	Membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun
				4)	Melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
					a. Melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
					<ul style="list-style-type: none"> b. membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri c. menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama d. memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum e. melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal
		c)	Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat	1)	Meningkatkan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi
				2)	Meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universitas Terbuka sebagai platform pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh
				3)	Meningkatkan peran akademi komunitas sebagai bagian dari penyedia layanan pendidikan tinggi
				4)	Menyediakan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin melalui KIP Kuliah
				5)	Mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi
2.	Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan	a)	Kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (instructional leadership) menguat	1)	Memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah
				2)	Mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap guru
		b)	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat	1)	mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak
				2)	mengembangkan Balai Guru Penggerak (Center of Excellence) di setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif,

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
					kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah
				3)	melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui seleksi masuk yang lebih baik, kurikulum yang berorientasi pada praktik dan penggunaan teknologi, pengajar yang menguasai praktik di sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi
				4)	berkonsultasi dengan pemerintah daerah agar Guru Penggerak dapat diarahkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, seperti menjadi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan
				5)	bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan
				6)	menerapkan berbagai inovasi termasuk multi-subject teaching untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas
				7)	membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan di luar APBN seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak ke-3 (contoh: Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
		c)	Percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana	1)	meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
				2)	memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya)
				3)	merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan
				4)	mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja
				5)	memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan
				6)	memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
		d)	Mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat	1)	menyiapkan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD
				2)	memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan bermutu satu tahun pra-SD
				3)	menyiapkan mekanisme dan sistem insentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu layanan PAUD
				4)	mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memiliki relevansi dan implementasi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan pemenuhan capaian SDG
		e)	Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan	1)	mengembangkan platform pembelanjaan barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelanjaan lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa
				2)	mengembangkan platform identifikasi guru penggerak dari seluruh Indonesia secara massal untuk selanjutnya dimobilisasi menggerakkan guru-guru lain
				3)	mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar
				4)	menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (preloaded) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet
				5)	menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong peer-review praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru
				6)	meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan
		f)	Penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna	1)	menyesuaikan dan mengutamakan standar nasional pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja dan akuntabilitas guru
				2)	mengembangkan kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah (internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah (school excellence) dan menggunakan data akreditasi, penjaminan mutu, evaluasi diri guru/sekolah dan hasil belajar siswa (formative assessment), untuk mengidentifikasi langkah-langkah

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
					peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praktik-praktik baik global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI
				3)	memperkuat peran dan pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan) dalam peningkatan mutu pendidikan
				4)	mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru
				5)	Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta memanfaatkan informasi diagnostik dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar guna meningkatkan proses pembelajaran
				6)	mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan 48 pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uji kompetensi
				7)	menyederhanakan sistem akreditasi perguruan tinggi menjadi bersifat otomatis bagi yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat
				8)	mengembangkan lembaga akreditasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI, profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela
		g)	proses pembelajaran meningkat mutunya	1)	mendorong guru untuk mengubah strategi pembelajaran yang berlandaskan paradigma pengajaran (teaching) menjadi strategi pembelajaran kreatif berlandaskan paradigma pembelajaran (learning), berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik untuk saling berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi
				2)	memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain
				3)	membina guru agar dapat menyiapkan rencana pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing peserta didik (normal, remedial, dan pengayaan)

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
				4)	mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan yang dapat didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah yang didasarkan atas kebutuhan, konteks dan karakteristik daerah
				5)	melakukan program-program khusus kepada siswa-siswa yang memiliki kompetensi kurang atau di bawah standar minimum
				6)	melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk melakukan penguatan dan pendampingan pada satuan pendidikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan
				7)	pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di perguruan tinggi, melalui experiential learning di industri, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional, masyarakat (membangun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang dapat diakui sebagai bagian dari Satuan Kredit Semester (SKS) program pendidikan
				8)	pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan
		h)	Kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah meningkat	1)	mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti AKM, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru
				2)	meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi diagnostik untuk peningkatan pembelajaran dari program-program penilaian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti AKM
				3)	mendorong penerapan penilaian portofolio yang relevan untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa yang bersifat performatif, artistik, kreatif, dan inovatif
				4)	meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan penilaian formatif dan portofolio dalam kelas guna meningkatkan proses pembelajaran
				5)	mengizinkan dan mendorong penggunaan portofolio dan asesmen yang lebih otentik untuk penilaian sumatif kelulusan jenjang sekolah
		i)	Jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah	1)	mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi,

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
					yakni sebagai research university, teaching university, atau vocational university
				2)	merasionalkan jumlah perguruan tinggi (right sizing) dan meningkatkan kesehatan serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi PTN dengan menjadi PTN BH
				3)	meningkatkan kerja sama antar perguruan tinggi dalam negeri, dan antara perguruan tinggi dengan DU/DI dan pemerintah
				4)	menetapkan beberapa perguruan tinggi sebagai Centers of Excellence dalam rangka percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi lain yang sedang berkembang
				5)	meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan serta DU/DI untuk penguatan knowledge/innovation-based economy yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan
				6)	meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup
				7)	meningkatkan kerja sama dengan universitas kelas dunia (Top 100 QS/THES) dalam pengembangan pendidikan dan penelitian
				8)	meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/startup berbasis karya iptek
				9)	membangun Science Techno Park di 5 (lima) universitas: UGM, UI, ITB, IPB, dan ITS
				10)	melibatkan industri/masyarakat sebagai penopang dalam 'pentahelix' untuk mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek mahasiswa serta kontribusi pendanaan
				11)	mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI
				12)	meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal ilmiah dalam negeri agar berkelas dunia, meningkatkan visibilitas karya perguruan tinggi secara internasional
				13)	mendorong dukungan dari DU/DI melalui kesempatan magang, kerja sama penelitian dan komersial, berbagi sumber daya, dan pendanaan

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
				14)	mengembangkan future skills platform bersama dengan masyarakat dan DU/DI untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan tinggi
				15)	melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan pengalaman di industri/masyarakat bagi mahasiswa diploma atau S1
				16)	memfasilitasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industr
		j)	Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri	1)	membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri
				2)	membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri
				3)	mengembangkan beberapa SMK menjadi Centers of Excellence guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia
				4)	memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi
				5)	meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode problem-based learning agar peserta didik dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar DU/DI
				6)	mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat
				7)	peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical skills sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI
				8)	mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi
				9)	memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
				10)	memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI
				11)	memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
				12)	membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat
				13)	menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK.
3.	Peningkatan Relevansi Pendidikan	a)	kemampuan literasi dan numerasi meningkat	1)	melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi
				2)	mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numerasi secara menyeluruh (kelas 1-12)
				3)	mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI)
				4)	menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan
				5)	memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal
		b)	perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja terlaksana	1)	memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan standar DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM (guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik
				2)	memfasilitasi exchange of information dari DU/DI dan pendidikan dan pelatihan vokasi mengenai kebutuhan kompetensi atau profesi di pasar tenaga kerja melalui platform yang dapat digunakan seluruh peserta didik
				3)	melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi melalui data yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi melalui tracer study
				4)	mengembangkan kurikulum pada SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (demand driven); (2) Kebersambungan (link) antara

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
					pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan kejuruan serta; dan (3) Kecocokan (match) antara pekerja dengan pemberi kerja
				5)	mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan DU/DI
				6)	menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan DU/DI
				7)	mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan pendidikan tinggi vokasi
				8)	memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagi guru/instruktur SMK dan dosen/instruktur pendidikan tinggi vokasi
				9)	meningkatkan keterhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari jenjang Pendidikan SMK dan pendidikan tinggi vokasi
				10)	mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi dan pendidikan akademik melalui skema Multi Exit, Multi Entry System, untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan dunia kerja
				11)	memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berinovasi dan berkembang
				12)	mendorong peningkatan citra pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan praktisi komunikasi
				13)	mendorong SMK dan pendidikan tinggi vokasi untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya yang memiliki bidang keahlian yang sama
				14)	melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset gabungan (joint research) dan/atau proyek (project work) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat
		c)	kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat	1)	memberikan kesempatan DU/DI untuk turut memberikan pengakuan terhadap kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi
				2)	selain memastikan pengembangan technical skills, juga menitikberatkan pengembangan soft skills, penanaman values budaya kerja, serta kemampuan berwirausaha pada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi, sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja
				3)	mendorong pembelajaran, project work, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI melalui pengembangan teaching factory dan teaching

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
					industry agar sekolah bermitra dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi memastikan hasil produksinya memenuhi standar industri
				4)	memfasilitasi praktik kerja industri dan/atau project work peserta didik baik di SMK maupun pendidikan tinggi vokasi
				5)	menata asesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja
				6)	memperlengkapi tenaga pendidik dan kependidikan di SMK, pendidikan tinggi vokasi dan instruktur di pelatihan vokasi dengan kemampuan mengembangkan kompetensi teknis dan non-teknis peserta didik mereka
				7)	memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yang dikembangkan bersama DU/DI dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni
				8)	menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui koordinasi K/L terkait dan pemerintah daerah
				9)	memfasilitasi penyampaian informasi dan peningkatan pemahaman peserta didik terkait dunia kerja melalui platform teknologi
				10)	menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam pendidikan dan pelatihan vokasi
4.	Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter	a)	nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesia menjadi aspek-aspek utama pendidikan karakter	1)	<p>membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, yang memiliki ciri sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya malu yang positif; b. menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta multi budaya; c. mengutamakan gotong royong, saling menghormati dan saling membantu; d. menghormati hak-hak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan menghormati penegakan hukum; e. menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budaya luar; dan

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
					f. menyesuaikan pendidikan karakter dalam konteks lokal bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan
				2)	memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah
				3)	mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (children wellbeing)
		b)	peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikan menjadi semakin kuat	1)	melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti Seni Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal
				2)	melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia di semua mata pelajaran – terutama yang banyak mengadopsi istilah-istilah asing (Sains, Matematika dan Pendidikan Agama)
				3)	melakukan penguatan dan pemutakhiran konten-konten sejarah untuk memperkuat pemahaman, penerimaan, dan aktualisasi identitas bangsa Indonesia
				4)	mendorong kegiatan pertukaran antar pelaku budaya dari latar belakang yang berbeda untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem kebudayaan di Indonesia
				5)	memperkuat inisiatif mandiri masyarakat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator yang menunjang gerakan pelestarian dan pemajuan budaya
				6)	melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai-nilai seni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis di dunia modern
				7)	membantu pengembangan muatan lokal - terutama bahasa daerah - dengan penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat lokal
		c)	cagar budaya dikelola dengan baik	1)	memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik
				2)	menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi budaya UNESCO

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
				3)	memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya
		d)	kegiatan dan juga upaya-upaya diplomasi budaya menjadi lebih efektif dan terlaksana dengan baik	1)	fokus pada nilai-nilai positif bangsa Indonesia untuk mendorong pemahaman akan identitas bangsa Indonesia
				2)	memperkenalkan budaya Indonesia sebagai kekayaan budaya regional (Asia Tenggara) dan juga dunia
				3)	menguatkan nilai ekonomi seni budaya dan wisata sebagai salah satu modal bangsa di luar sumber daya alam dan ekonomi
		e)	sistem perbukuan nasional menjadi lebih efektif dan optimal	1)	mendorong ketersediaan bahan bacaan berkualitas melalui penguatan ekosistem perbukuan
				2)	melakukan pengayaan materi bacaan berjenjang baik dalam tahapan kemampuan baca atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengan usia
				3)	mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari konten-konten bermutu rendah (berisi materi yang mendorong radikalisme dan diskriminasi berdasarkan SARA, berisi 55 materi yang tidak sejalan dengan integritas dan nilai bangsa Indonesia, atau bersifat plagiat
5.	Penguatan Tata Kelola Pendidikan	a)	implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat	1)	melakukan koordinasi dengan Kemensos dalam mengelola program pendanaan pendidikan afirmatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolah
				2)	mengembangkan mekanisme dengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran pendidikan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. formasi dan perekrutan guru berdasarkan kinerja akademis dan kualitas pribadi, serta pengelolaan sumber daya guru; dan b. pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk BOS, BOS Afirmasi, TPG, DAK fisik, dan DAK non-fisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayaran non-tunai (cashless).
				3)	mengundang partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi, penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri, pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi
		b)	efisiensi satuan pendidikan meningkat	1)	mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi

No	Arah Kebijakan	Kondisi yang ingin dicapai		Strategi	
		c)	akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat	1)	melakukan pendekatan asimetris untuk memenuhi kebutuhan setiap pemerintah daerah, alih-alih pendekatan 'one-size fits all' di seluruh pemerintah daerah
				2)	pemerintah pusat sebagai penunjang, fasilitator, dan konsultan untuk pemerintah daerah
		d)	perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik	1)	membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis Perangkat Daerah (PD) Pendidikan
				2)	memberikan masukan kepada daerah untuk menyusun program tahunan, menentukan sasaran dan menyelaraskan kebijakan
				3)	membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran pendidikan kabupaten/kota

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setia sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program.

Tabel 3. 6. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja
Kemendikbudristek Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS.1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40.20	42.62	45.21	47.81	53.10
IKSS 1.2	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105.97	104.48	102.98	101.49	100
IKSS 1.3	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92.46	94.34	96.23	98.11	100
IKSS 1.4	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86.18	88.39	90.59	92.80	95
IKSS 1.5	Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33.47	34.56	35.62	36.64	37.63
SS.2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3.25	3.5	3.7	4
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57.2	58.2	59.2	60.2	61.2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai assesmen kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26.5	27.4	28.3	29.2	30.1
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA : Membaca	Nilai	-	394	-	-	396
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	-	385	-	-	388
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai	-	399	-	-	402
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47.10	48.30	49.70	51.10	52.60
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT uang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64.77	65.25	65.72	66.20	66.70
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47.43	48.33	49.22	50.11	51
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industry atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industry	%	12	18	23	31	40
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69	71.8	74.6	77.4	80
SS.3	Menguatnya karakter peserta didik						
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30	35	40	45	50

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10	15	22.5	31	40
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar	%	10	15	22.5	31	40
SS.4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan						
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda Bahasa daerah	orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
IKSS 4.3	Indeks pembangunan kebudayaan	indeks	55.5	57.3	59.1	60.9	62.7
SS.5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks efektifitas pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71.5	73	74.5	76	77.5
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	indeks	81	82	82	83	84
IKSS 5.4	Indeks reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	78	81	85	87	91

III.3.3. Telaah Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemenpora mempunyai **tugas** menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kemenpora menyelenggarakan **fungsi**:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenpora.
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga serta peningkatan prestasi olahraga.
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenpora.
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemenpora.

Dalam menjabarkan target yang tertuang di dalam RPJMN 2020 – 2024, Kemenpora memiliki 5 (lima) program prioritas, yaitu:

- Perbaiki tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan layanan publik.

- Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan.
- Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.
- Pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat
- Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

Mengacu dari tema dan prioritas RPJMN 2020-2024, arah kebijakan nasional saat ini adalah “Indonesia berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, yang diharapkan dapat dicapai melalui strategi Prioritas Nasional (PN) agenda pembangunan. Kemendikpora sendiri mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020 – 2024, yaitu:

1. PN-1; Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas meliputi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
2. PN-3; Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing meliputi peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui peningkatan kualitas pemuda dan peningkatan produktivitas dan daya saing melalui peningkatan prestasi olahraga.
3. PN-4; Membangun kebudayaan dan karakter bangsa meliputi revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui revolusi mental dalam sistem pendidikan.
4. PN-7; Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik meliputi menjaga stabilitas keamanan nasional melalui peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut arah kebijakan dan strategi nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait langsung dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- A. Arah kebijakan nasional kepemudaan yakni “Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda” dengan strategi peningkatan kualitas pemuda melalui:
 - a) Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda.
 - b) Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan.
 - c) Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.
- B. Arah kebijakan nasional keolahragaan yakni “Meningkatkan produktivitas dan daya saing” dengan strategi peningkatan prestasi olahraga melalui:
 - a) Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan
 - b) Pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan.

- c) Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan pendidikan dengan olahraga prestasi, berbasis cabang olahraga olimpiade dan potensi daerah didukung penerapan *sport science*, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan.
- d) Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan.
- e) Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional, peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel.
- f) Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan dan industri olahraga.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, telah mengakomodir respon yang diperlukan dalam menangani merebaknya *pandemiCoronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang berimbas pada perubahan kebijakan pembangunan kepemudaan, pendidikan kepramukaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional. Arah kebijakan dan strategi Kemenpora menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk menguiah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan.

III.3.3.1. Kepemudaan

Pemuda digunakan untuk merujuk pada penduduk dengan rentang usia 16-30 sesuai dengan definisi dalam UU Kepemudaan. Pada tahun 2019, berdasar data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) jumlah pemuda yang berumur 16-30 thn yakni sebanyak 64,19 juta jiwa atau sekitar 24% dari populasi. Proporsi jenis kelamin seluruh pemuda di Indonesia cukup berimbang, walaupun jumlah laki-laki sedikit melampaui jumlah perempuan. Distribusi pemuda cenderung lebih banyak pada kelompok rumah tangga dengan kesejahteraan yang lebih baik. Dari sebaran lokasi, lebih banyak pemuda tinggal di perkotaan, sedangkan remaja lebih tersebar antara perkotaan dan pedesaan. Pulau Jawa dan Sumatra merupakan pulau-pulau tempat tersebarnya sekitar tiga perempat pemuda dan remaja Indonesia.

Pemuda berkontribusi terhadap pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Semakin memantapkan ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan ideologi Pancasila. Keberhasilan dalam pembangunan manusia Indonesia dapat dilihat melalui meningkatnya Indeks Pembangunan Masyarakat. Dimana IPP pada tahun 2019 sebesar 71.92 (BPS 2020) dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada tahun 2018 sebesar 53.74 (kemendikbud 2019).

Gerakan pramuka sebagai wadah pendidikan kepanduan dan kepramukaan merupakan pranata yang tepat untuk menanamkan nilai budaya kepada anak didik dan pada akhirnya akan memperkuat kebudayaan Indonesia termasuk budaya berolahraga. Pramuka juga menjadi tempat mendidik anggota untuk menjadi benteng ideologi Pancasila yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan yang tangguh. Gerakan pramuka selain untuk menjadi mandiri, ketrampilan, memiliki jiwa sukarelawan, tolong menolong, juga sangat diperlukan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila,

pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara terhadap generasi muda bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan.

Rumusan arah kebijakan dan strategi untuk urusan kepemudaan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara kementerian pemuda dan olahraga dengan lembaga-lembaga lainnya dan *stakeholders* terkait dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
3. Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam tingkat global.
4. Peningkatan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda.
5. Peningkatan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila
6. Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila, serta upaya pencegahan pemuda dari perilaku berisiko mencakup bahaya narkoba, psikotropika, merokok, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi, prostitusi, penurunan kualitas moral, perudungan, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

III.3.3.2. Keolahragaan

Olahraga, dalam pengertian umum mencakup “aktivitas yang terorganisir secara formal dan tidak formal” dimaknai sebagai sumber daya (*resources*) untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga olahraga “tidak hanya sebatas mencapai prestasi dan perolehan medali”, tetapi untuk meraih tujuan manfaat bagi kehidupan individu dan kelompok yang sejahtera, berkualitas, dan berketahanan (*resilience*) dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manfaat ini hanya diraih bila kegiatan olahraga dikelola dengan baik dan benar.

Olahraga merupakan segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial (UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Terdapat 3 (tiga) pilar sistem keolahragaan nasional yaitu: Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi, dimana ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait satu sama lainnya. Keberhasilan atau kegagalan salah satu pilar, akan berpengaruh terhadap pilar lainnya. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga nasional harus dilakukan secara serentak atas ketiga pilar tersebut.

Pembangunan olahraga di Indonesia diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, tujuan ini dapat dijumpai di negara-negara sistem politik sejahtera (*welfare state*). Peningkatan kesejahteraan ini sejalan dengan peningkatan kualitas manusia diantaranya mencakup kesehatan dan kebugaran, nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin dan prestasi, serta kualitas manusia. Sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan amanat Mukadimah UUD 1945, maka pengelolaan sistem keolahragaan nasional yang baik dan benar sangat

mendukung arah kebijakan pembangunan nasional pada RPJMN 2020-2024, yaitu mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Rumusan arah kebijakan dan strategi pencapaian bidang keolahragaan adalah:

1. Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan
2. Penataan kebijakan pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi
3. Peningkatan pembudayaan olahraga untuk kesehatan dan kebugaran melalui pemassalan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pemajuan olahraga tradisional, dan layanan khusus, serta pengembangan industri olahraga, termasuk pariwisata olahraga (*Sport tourism*).
4. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade sesuai dengan tahapan *Long Term Athlete Developmnet* (LTAD) didukung penerapan iptek keolahragaan, standar nasional keolahragaan serta sistem penghargaan dalam kerangka Desain Besar Olahraga Nasional.
5. Peningkatan pembinaan prestasi persepakbolaan nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan kelembagaan dan organisasi keolahragaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian prestasi keolahragaan guna meminimalisir adanya tumpang tindih tugas dan fungsi pembinaan olahraga.
7. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan yang berkualifikasi dan bersertifikat kompetensi untuk menjamin prestasi olahraga pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.
8. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi serta olahraga disabilitas yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga.
9. Pengelolaan dana dan pengembangan usaha keolahragaan yang profesional dan akuntabel dalam mendukung sistem pembinaan keolahragaan nasional.

III.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pendidikan merupakan hal penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target yang ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) bidang pendidikan, yaitu memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, serta memperluas kesempatan untuk pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Namun, keberhasilan dalam mencapai target-target tersebut tidak bisa diabaikan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan di bidang pendidikan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Capaian SDG's bidang pendidikan di DIY terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian SDG's tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.7. Capaian DIY dalam SDG's di bidang Pendidikan dari Tahun 2020 – 2021

No	Indeks	Nasional		DIY		Sumber data
		2020	2021	2020	2021	
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,94	72,29	79,97	80,22	BPS
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,48	8,54	9,55	9,64	BPS
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,98	13,03	15,59	15,64	BPS

Pencapaian SDG's sampai tahun 2021 dalam setiap pilarnya dapat dilihat sebagai berikut. Dari empat pilar pembangunan berkelanjutan di DIY, pilar sosial merupakan pilar yang memiliki jumlah indikator yang paling banyak tercapai, yaitu sebanyak 48 indikator. Namun demikian, pilar sosial juga merupakan pilar yang membutuhkan perhatian yang lebih karena masih terdapat 14 indikator yang belum tercapai dan 8 indikator lainnya yang belum memiliki data. Pilar lingkungan menempati posisi kedua dengan jumlah indikator tercapai sebanyak 24 indikator, namun 11 indikator lainnya masih perlu perhatian. Informasi tentang capaian di setiap pilar TPB dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Evaluasi TPB DIY 2022, diolah

Gambar 3.4. Status Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2021

Masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mencapai target SDG's bidang pendidikan yang termasuk dalam Pilar Sosial. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan di bidang literasi dan numerasi, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota. Selain itu, masih terdapat kesenjangan aksesibilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. Aksesibilitas Pendidikan
Dalam hal aksesibilitas pendidikan, DIY telah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah hingga mencapai 96,6% pada tahun 2021, yang mengindikasikan bahwa hampir semua anak di DIY mendapat kesempatan untuk bersekolah. Namun, masih ada sejumlah anak yang tidak dapat mengakses

pendidikan, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat miskin yang kurang mampu. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi mereka yang belum terjangkau.

2. Kualitas Pendidikan

Dalam hal kualitas pendidikan, DIY telah memperlihatkan peningkatan dalam beberapa indikator seperti angka melek huruf dan rasio murid-guru. Namun, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi seperti kualitas guru yang perlu ditingkatkan, kurangnya fasilitas dan sumber daya di sejumlah sekolah, dan ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DIY agar dapat memenuhi standar yang diharapkan dan mampu bersaing secara global.

3. Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Dalam hal revitalisasi pendidikan vokasi, DIY telah memperlihatkan kemajuan dalam meningkatkan jumlah lulusan SMK yang terserap di dunia kerja, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya kualifikasi tenaga kerja, ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja, dan kurangnya keterampilan digital yang diperlukan dalam era digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di DIY agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja dan membantu mengurangi angka pengangguran di DIY.

Berdasarkan analisis KLHS, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan pencapaian SDGs di bidang pendidikan di DIY, antara lain:

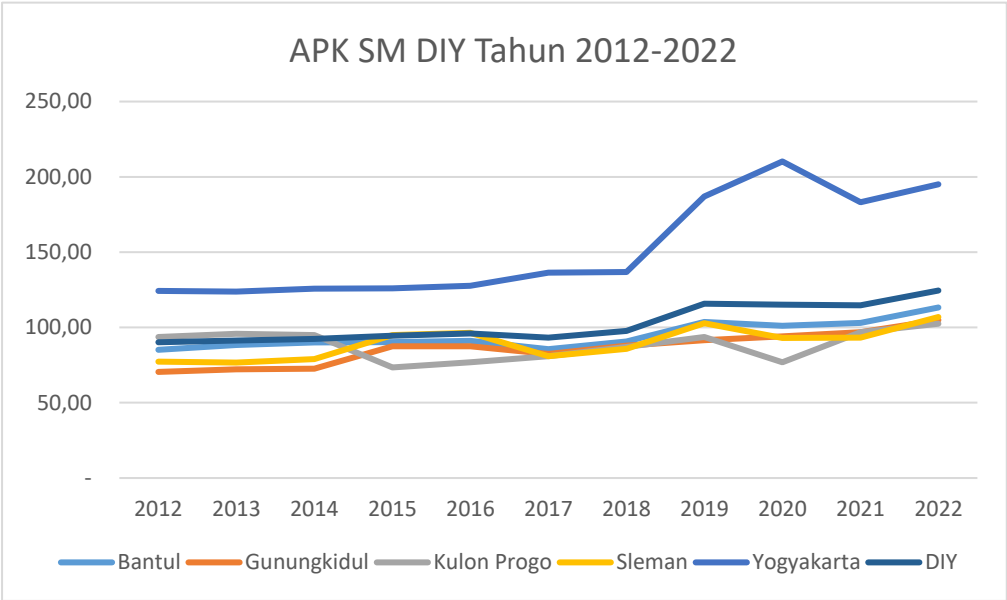
1. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui program beasiswa untuk siswa yang kurang mampu serta pembangunan sekolah di daerah yang terpencil.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan kualitas guru dan tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Memperkuat revitalisasi pendidikan vokasi dengan mengembangkan keterampilan dan kompetensi siswa yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pemantauan kebijakan pendidikan melalui forum partisipasi masyarakat dan advokasi publik.
5. Mengintegrasikan pendekatan keberlanjutan lingkungan hidup dalam pendidikan, sehingga mampu menciptakan generasi yang peduli lingkungan dan berkelanjutan.

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

III.5.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Dikpora DIY dalam bidang pendidikan dapat diketahui melalui capaian layanan partisipasi peserta didik dan capaian Standar Pelayanan Minimal

III.5.1.1. Capaian Layanan Partisipasi Peserta Didik

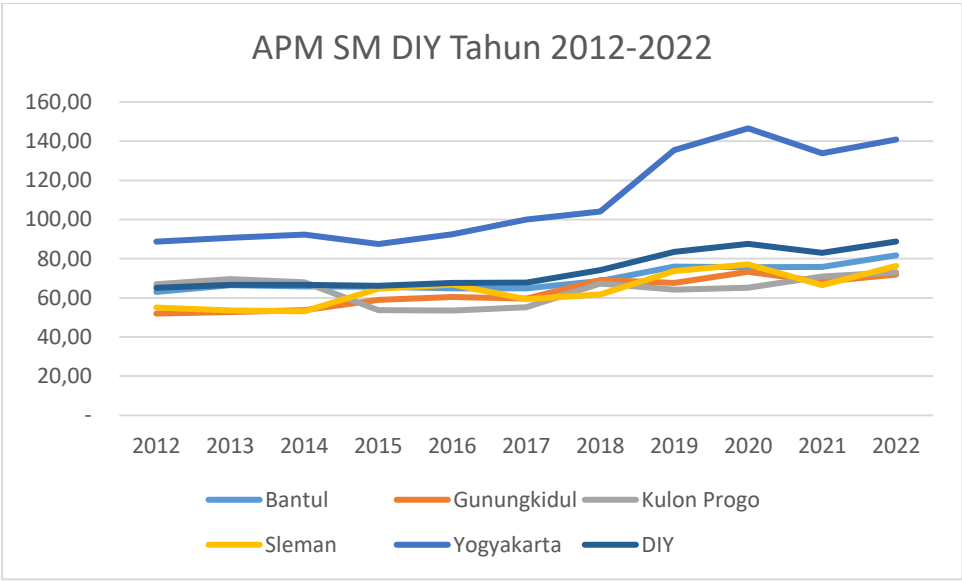


Sumber data: Profil Pendidikan Disdikpora DIY 2012-2022

Gambar 3.5. Capaian APK Pendidikan DIY Tahun 2012-2022

Selama satu dekade terakhir, layanan pendidikan di DIY telah menunjukkan peningkatan dalam jumlah peserta didik yang terlayani di jenjang pendidikan menengah. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang menunjukkan adanya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah DIY. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19, namun APK Sekolah Menengah mulai menanjak kembali pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk DIY usia 16-18 tahun dapat mengakses pendidikan sesuai dengan usia dan jenjang, meskipun jumlah peserta didik sempat mengalami penurunan. Penurunan jumlah peserta didik ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan sebab-sebab lainnya.

Sebagai upaya untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018, dan PMDN Nomor 59 Tahun 2021, penyediaan dan pemerataan aksesibilitas pendidikan pada jenjang pendidikan menengah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Dikpora DIY.

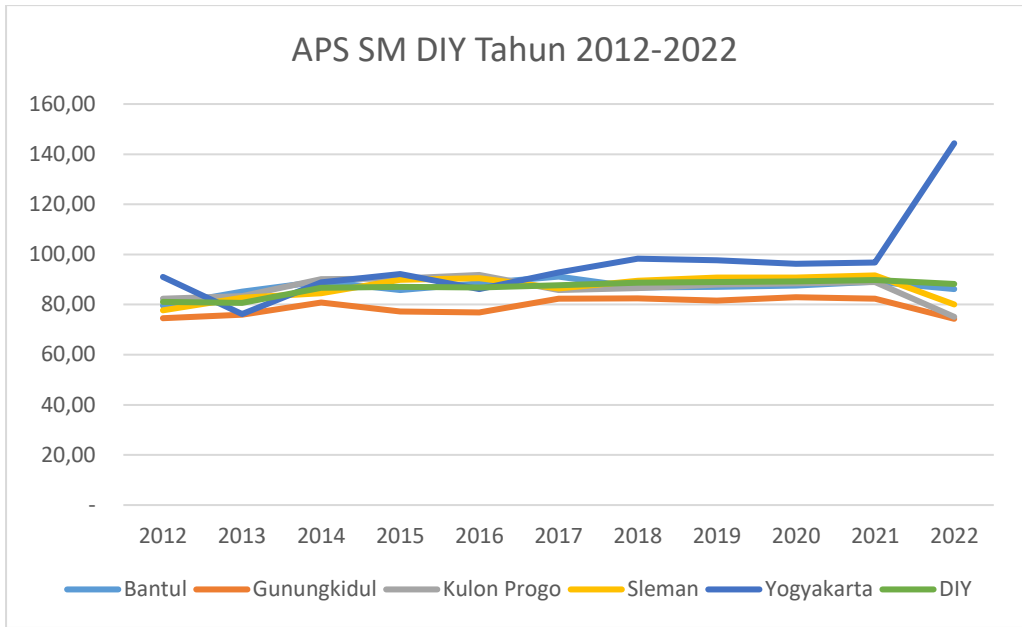


Sumber data: Profil Pendidikan Disdikpora DIY 2012-2022

Gambar 3.6. Capaian APM Pendidikan DIY Tahun 2012-2022

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan adanya peningkatan sejak tahun 2014, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 dan faktor lainnya. Namun, pada tahun 2021, capaian APM kembali meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan menengah telah menysasar penduduk dengan jenjang usia yang sesuai sejak program wajib belajar 12 tahun diterapkan pada tahun 2014. Meski kenaikan persentase tidak besar, kesesuaian antara usia dengan jenjang pendidikan dapat dipertahankan.

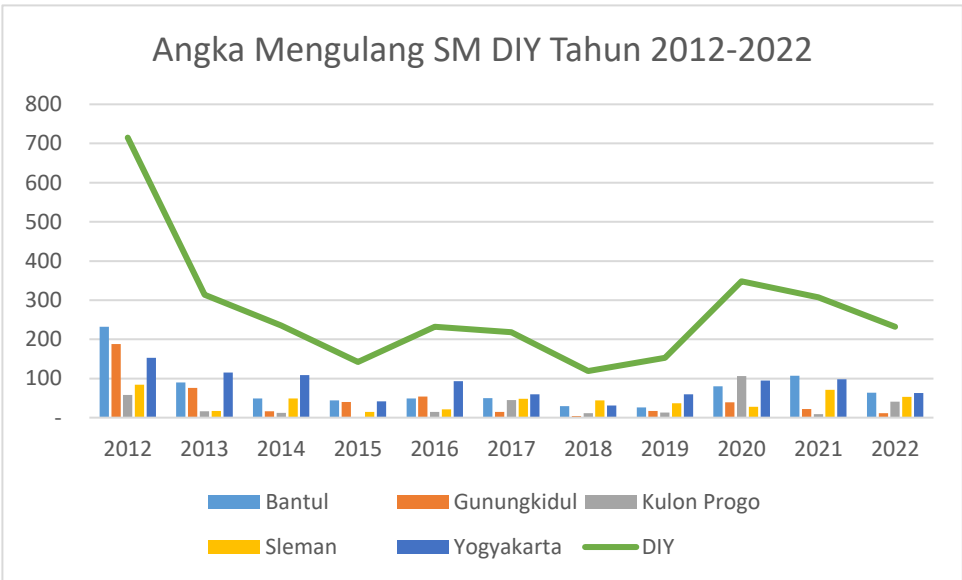
Meskipun demikian, capaian APM pada penduduk usia 16-18 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mencapai 100%. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan yang lebih rendah atau bersekolah di satuan pendidikan keagamaan lainnya yang tidak terdaftar dalam sistem EMIS di Kementerian Agama. Selain itu, penduduk usia tersebut juga terdiri dari mereka yang memiliki disabilitas dan masuk dalam perhitungan layanan pendidikan khusus, serta mereka yang merupakan bagian dari angkatan kerja DIY usia 15-19 tahun. Oleh karena itu, perlu diperhatikan berbagai kondisi dan aspek lainnya yang mempengaruhi capaian APM pada penduduk usia 16-18 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber data: Profil Pendidikan Disdikpora DIY 2012-2022

Gambar 3.7. Capaian APS Pendidikan DIY Tahun 2012-2022

Untuk capaian partisipasi sekolah maka pada jenjang pendidikan menengah selalu mengalami peningkatan, tren positif peningkatan APS secara stabil dimulai sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 mengalami sedikit penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2021 yaitu penurunan sebesar 1.59 poin.

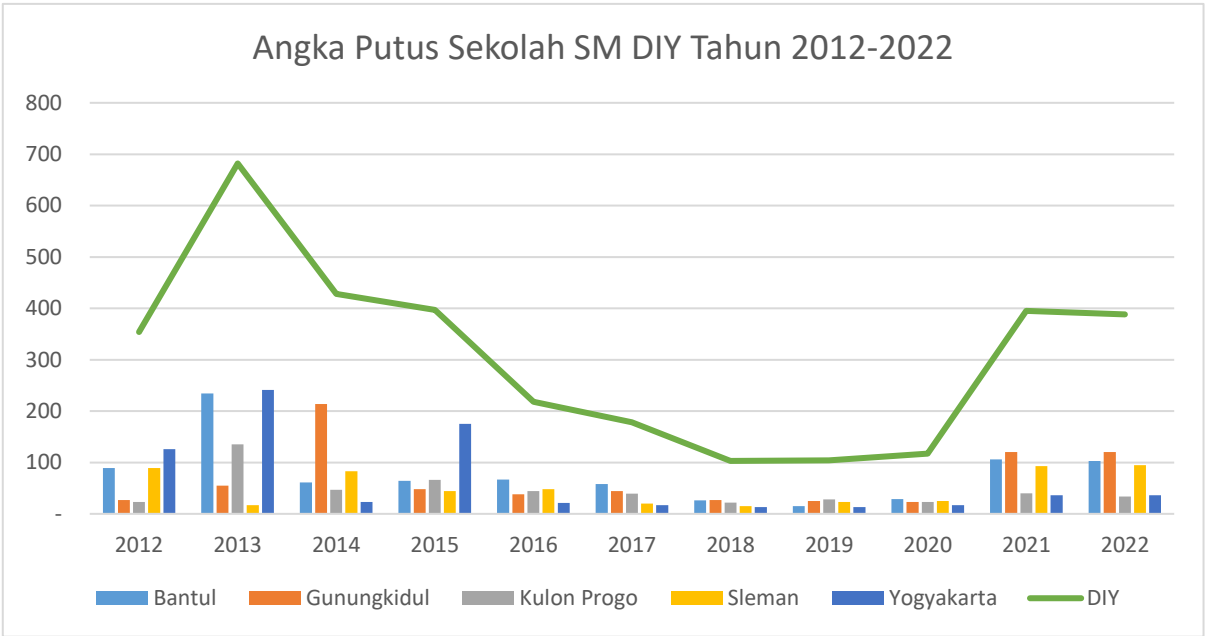


Sumber data: Profil Pendidikan Disdikpora DIY 2012-2022

Gambar 3.8. Angka mengulang DIY Tahun 2012-2022

Pada periode tahun 2012 hingga 2015, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah siswa yang mengulang, namun kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan turun lagi pada tahun 2017. Selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 hingga 2020, angka mengulang kembali mengalami peningkatan. Dugaan penyebab kenaikan angka mengulang ini adalah perubahan sistem belajar mengajar yang beralih dari tatap muka menjadi belajar jarak jauh pada masa pandemi COVID-19, yang menyulitkan proses belajar mengajar. Pada tahun 2021, adaptasi terhadap sistem belajar jarak jauh

mulai terlihat dengan adanya penurunan angka mengulang. Meskipun perubahan sistem dan pola belajar dapat diasumsikan sebagai salah satu penyebab kenaikan angka mengulang, namun dengan adaptasi dan waktu, baik proses belajar mengajar secara tatap muka maupun jarak jauh menjadi pilihan yang dinamis dan bergerak seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban dan teknologi.



Sumber data: Profil Pendidikan Disdikpora DIY 2012-2022

Gambar 3.9. Angka putus sekolah DIY Tahun 2012-2022

Dalam beberapa tahun terakhir, angka putus sekolah di jenjang pendidikan menengah di DIY telah mengalami peningkatan kualitas layanan dengan mengurangi jumlah siswa yang putus sekolah. Pada tahun 2012, hampir 1000 siswa di DIY putus sekolah, namun jumlah ini telah berhasil diturunkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, angka putus sekolah kembali mengalami peningkatan, yang diduga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021. Meski demikian, pada tahun 2022, angka putus sekolah mulai berkurang kembali.

Kondisi ekonomi yang menurun dapat menjadi penyebab peningkatan angka putus sekolah, karena dapat memengaruhi kemampuan orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Untuk mengurangi angka putus sekolah, Dinas Dikpora DIY telah menyediakan program beasiswa untuk siswa miskin. Meskipun program ini belum dapat menjangkau dan mencakup seluruh siswa miskin di DIY, diharapkan program beasiswa ini dapat membantu mengurangi angka putus sekolah di DIY.

III.5.1.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan SPM yang merupakan ketentuan

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan SPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2018, jenis SPM terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, jenis pelayanan dasar pada SPM Daerah Provinsi bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1. pendidikan menengah; dan
- 2. pendidikan khusus

Dalam penerapan SPM di DIY, terdapat beberapa kendala khusus. Salah satunya adalah belum optimalnya pemenuhan SPM pada bidang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh basis data siswa yang tidak sekolah atau putus sekolah yang belum terkonsolidasi dengan valid, termasuk siswa yang menempuh pendidikan di bawah Kementerian Agama dan siswa penyandang disabilitas. Kendala lainnya adalah pemenuhan SDM pendidik guru. Jumlah guru yang berkurang karena pensiun tidak seimbang dengan penambahan guru baru. Selain itu, kebijakan pembatasan rekrutmen guru honorer juga mempengaruhi ketercukupan SDM pendidik.

Capaian kinerja terhadap indikator Standar Layanan Minimal bidang pendidikan pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.8. Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MADYA			80.23 %
1.	Pendidikan Menengah				78.96 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	63.67 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	151.551	120.622	30.929	79.59 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				15.28 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	76.42 %
	1 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	168	167	1	99.40 %
	2 . Buku teks pelajaran	1	1	0.00	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Perlengkapan belajar	1	1	0.00	100.00 %
	4 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	5.226	5.226	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan biaya personil peserta didik	130.357.324.558	130.357.324.558	-	100,00
	6 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	11.852	11.280	572	95.17 %
	7 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	381	284	97	74.54 %
	8 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	4.191	1.769	2.422	42.21 %
	JUMLAH	138,502,745,077	18,728	138,502,726,349	611.32 %
2 .	Pendidikan Khusus				81.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	66.71 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	5916	4933	983	83.38 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				14.80 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	74.00 %
	1 . Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	79	44	35	55.70 %
	2 . Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	483	310	173	64.18 %
	3 . Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	1	1	0.00	100.00 %
	4 . Perlengkapan belajar	1	1	0.00	100.00 %
	5 . Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	79	79	0.00	100.00 %
	6 . Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1	1	0.00	100.00 %
	7 . Penyediaan biaya personil peserta didik	14.536.157.600	14.536.157.600	-	100,00
	8 . Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.659	1.196	463	72.09 %
	JUMLAH	14,553,676,714	2	14,553,675,082	591.97 %

III.5.2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L;

III. 5.2.1. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memiliki lima sasaran strategis untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa
2. Meningkatkan Pendidikan Berkarakter dan Berbudaya serta Kesetaraan Akses Pendidikan
3. Meningkatkan Efektivitas Sistem Pendidikan dalam Mendukung Penguatan Karakter Bangsa dan Peningkatan Kualitas SDM
4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
5. Meningkatkan Penguatan Budaya, Sejarah, dan Keistimewaan Daerah serta Kemampuan Merespon Perubahan Global

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, Kemendikbudristek menetapkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.9. Sasaran Strategis, Indikator, dan target Kinerja
Kemendikbudristek Tahun 2020-2024**

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,2	42,62	45,21	47,81	53,1
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	101,49	100
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	100
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,8	95
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	33,47	34,56	35,62	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25	3,5	3,7	4
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai	-	394	-	-	396
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai	-	385	-	-	388
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai	-	399	-	-	402
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	%	47,1	48,3	49,7	51,1	52,6
IKSS 2.8	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	%	64,77	65,25	65,72	66,2	66,7

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,43	48,33	49,22	50,11	51
IKSS 2.10	Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	%	12	18	23	31	40
IKSS 2.11	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	%	69	71,8	74,6	77,4	80
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik						
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30	35	40	45	50
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	%	10	15	22,5	31	40
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22,5	31	40
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan						
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55,5	57,3	59,1	60,9	62,7
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel						
IKSS 5.1	Opini laporan keuangan Kemendikbud	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	indeks	71,5	73	74,5	76	77,5
IKSS 5.3	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	Indeks	81	82	82	83	84
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81	85	87	91

**Tabel 3.10. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Kemendikbudristek Tahun 2021-2024**

Nama Program	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program
1. Program Dukungan Manajemen			
	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	a.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud
		b.	Opini laporan keuangan Kemendikbud
		c.	Kategori capaian kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA Kemendikbud

Nama Program	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program
		d.	Persentase Satker yang tertib pengelolaan BMN
		e.	Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>
		f.	Persentase Satker yang mengimplementasikan digitalisasi dokumen
		g.	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu
		h.	Indeks efektivitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan
		i.	Persentase anggaran transfer daerah bidang pendidikan yang disalurkan langsung ke rekening sekolah
		j.	Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK
		k.	Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok pendidikan & kebudayaan
	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud	a.	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
		b.	Nilai PMPRB Kemendikbud
	Meningkatnya prestasi peserta didik tingkat internasional dan prestasi satuan pendidikan di tingkat nasional dan internasional	a.	Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)
		b.	Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional
	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	a.	Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila
		b.	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
	Meningkatnya efektivitas layanan pembiayaan pendidikan	a.	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
	Meningkatnya kualitas film dan iklan film	a.	Persentase film dan iklan film yang lulus sensor tanpa revisi
	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai gerakan nasional	a.	Persentase tingkat keberhasilan budaya sensor mandiri
	Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	a.	Persentase Satker yang berintegritas
		b.	Persentase Satker yang menerapkan strategi <i>anti fraud</i>
		c.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		d.	Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud
	Meningkatnya Komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan	a.	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi

Nama Program	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program
		b.	Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota
2. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			
	Meningkatnya satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a.	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional	a.	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (termasuk PPG model baru)
		b.	Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1
		c.	Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak
		d.	Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya
		e.	Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan
	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a.	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
		b.	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
		c.	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	a.	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan
	Terwujudnya Sistem Perbukuan Nasional	a.	Persentase buku pendidikan yang terstandar dan berkualitas
		b.	Persentase pelaku perbukuan yang dibina
	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	a.	Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran
		b.	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran
	Meningkatnya jumlah, kualitas, dan relevansi penelitian pendidikan dan kebudayaan	a.	Jumlah publikasi hasil penelitian yang terbit di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terindeks global
		b.	Jumlah laporan penelitian dan/atau publikasi hasil penelitian yang dikutip oleh publikasi ilmiah

Nama Program	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program
		c.	Persentase laporan penelitian yang menjadi rujukan perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan
		d.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian arkeologi dalam pelestarian serta pemajuan pendidikan dan kebudayaan
	Meningkatnya standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	a.	Persentase sekolah/madrasah yang terakreditasi sesuai SNP
		b.	Persentase Satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi sesuai dengan SNP
		c.	Jumlah Standar SNP yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan
	Meningkatnya partisipasi peserta asesmen nasional terstandar	a.	Persentase satuan pendidikan yang diukur kompetensi dan karakternya melalui asesmen nasional terstandar
3. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun			
	Meningkatnya perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	a.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA/SMK/ sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya
		b.	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)
		c.	Jumlah kab/Kota dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)
		d.	Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimum 75 (kategori tinggi)
	Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a.	Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai <i>scorecard</i> minimum 75 (kategori tinggi)
		b.	Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
	Meningkatnya karakter peserta didik	a.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
		b.	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum
	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	a.	Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
		b.	Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non-Tunai
		c.	Persentase provinsi/kabupaten/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
		d.	Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah

Nama Program	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program
			yang akurat, terbaru dan berkelanjutan
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
	Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan	a.	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
		b.	Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
		c.	Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
		d.	Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR
		e.	Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR
		f.	Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
	Meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri	a.	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri
		b.	Persentase SMK yang dikembangkan menjadi <i>Center of Excellence</i> (COE) per bidang keahlian
		c.	Persentase SMK yang sumber daya (<i>resources</i>)nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional
		d.	Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
		e.	Persentase SMK yang menyelenggarakan <i>Teaching Factory</i>
	Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri	a.	Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi
		b.	Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (<i>resources</i>) nya dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerja sama profesional
		c.	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH
		d.	Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
	Terwujudnya Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri	a.	Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri
5. Program Pendidikan Tinggi			

Nama Program	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program
	Meningkatnya akses, kualitas pembelajaran, dan relevansi pendidikan tinggi	a.	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya
		b.	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University</i>
		c.	Jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 500 World Class University by Subject</i>
		d.	Jumlah perguruan tinggi menjadi PTN-BH
		e.	Persentase program studi yang terakreditasi/sertifikasi internasional (PTN)
		f.	Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
		g.	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR
		h.	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus
		i.	Persentase pendanaan dan pengembangan fasilitas riset pendidikan tinggi yang dibiayai oleh mitra (PTN)
	Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan	a.	Persentase dosen yang bersertifikat
		b.	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya
		c.	Persentase dosen berkualifikasi S3
6. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan			
	Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat	a.	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
		b.	Jumlah festival skala internasional (<i>Mega Events</i>) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan
		c.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan kesenian
	Terwujudnya perlindungan Warisan Budaya yang memperkaya kebudayaan nasional	a.	Persentase CB dan WBTB yang ditetapkan
		b.	Jumlah cagar budaya peringkat nasional yang dikelola secara profesional lewat mekanisme Badan Layanan Umum
		c.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal dan ekstrakurikuler kesenian

Nama Program	Sasaran Program		Indikator Kinerja Program
		d.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah
	Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	a.	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
		b.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
		c.	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Daerah dengan standar yang ditetapkan Ditjen Kebudayaan
		d.	Persentase pelaku/pendukung kegiatan kebudayaan, perempuan terhadap laki-laki
	Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan	a.	Persentase Desa Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan dan dimanfaatkan
		b.	Persentase kabupaten/kota yang menjadikan PPKD sebagai rujukan penyusunan RKPD dan RPJMD
		c.	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda
		d.	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya
	Meningkatnya kemahiran penutur bahasa Indonesia	a.	Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji
		b.	Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik
	Meningkatnya budaya literasi	a.	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)
	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah	a.	Indeks daya hidup bahasa daerah
	Meningkatnya peran bahasa Indonesia kancah internasional	a.	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia
		b.	Jumlah pemelajar BIPA

III. 5.2.2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memiliki empat sasaran strategis untuk periode 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatkan Akses dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Nasional
2. Meningkatkan Prestasi Olahraga Nasional dan Kualitas Hidup Masyarakat
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan serta Keolahragaan Berbasis Karakter dan Nilai Budaya Bangsa
4. Meningkatkan Kinerja Organisasi dan Tata Kelola yang Baik dan Transparan dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Kemenpora

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, Kemenpora menetapkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.11. Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kemenpora Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target						Satuan
			Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Terwujudnya pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda	Indeks pembangunan pemuda	51,5 (2018)	53,56	54,59	55,61	56,64	57,67	Indeks (skala 0-100)
		Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan pemuda		N/A	2,5 (cukup)	3,2 (baik)	3,9 (baik)	4,5 (sangat baik)	Skala (1-5)
		Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda		46,67	47,67	48,67	49,67	50,67	Skala (1-100)
		Tingkat pencegahan perilaku berisiko pemuda		dihitung ulang kembali	dihitung ulang kembali	dihitung ulang kembali	dihitung ulang kembali	dihitung ulang kembali	Skor (1-100)
		Persentase pemuda berwirausaha		0,47	0,52	0,57	0,62	0,67	skor (0-2)
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Persentase penduduk 10 thn yang berolahraga	31,39 (2019)	33,87	35,4	36,93	38,46	40	%
		Peringkat pada Asian Games	4 (2018)	N/A	N/A	13	N/A	N/A	Peringkat
		Peringkat pada Asian Para Games	5 (2018)	N/A	N/A	8	N/A	N/A	Peringkat
		Jumlah perolehan medali emas pada Olimpiade	1 (2016)	N/A	2	N/A	N/A	3	Medali Emas
		Jumlah perolehan medali emas pada <i>Para-olimpiade</i>	- (2016)	N/A	1	N/A	N/A	3	Medali Emas
		Peringkat pada SEA Games	4 (2019)	N/A	4	N/A	3	N/A	Peringkat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target						Satuan
			Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	
		Peringkat pada ASEAN Para Games	1 (2017)	N/A	1	N/A	1	N/A	Peringkat
3	Terwujudnya kemenpora yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	65,8 (2019)	70,1 (BB)	73,1 (BB)	77,1 (BB)	81,1 (A)	85,1 (AA)	Indeks (skala 0-100)
		Indeks sistem merit		3	3,2	3,5	3,8	4	Indeks (skala 1-4)
		Opini BPK	WTP (2019)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK
		Indeks pelayanan publik		3,51 (B)	3,76 (B)	4,01 (A-)	4,26 (A-)	4,51 (A)	Skor

Tabel 3.12. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Kemenpora Tahun 2020-2024

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target						Satuan
				Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program Kepemudaan	Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda di pusat dan daerah	N/A	0,3	0,5	0,7	0,9	100%	Persen
2			Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan pemuda pelapor di level pusat dan daerah	N/A	0,3	0,5	0,7	0,9	1	Persen
3			Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap	N/A	0,3	0,5	0,65	0,9	1	Persen

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target						Satuan
				Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	
			implementasi kebijakan kemitraan pemuda di tingkat nasional dan internasional							
4			Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan <i>white collar</i>	N/A	0,37	0,39	0,4	0,41	0,43	Persen
5			Angka kesakitan pemuda	N/A	7,62	7,43	7,24	7,05	6,87	Persen
6			Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	N/A	N/A	0,25	0,5	0,75	1	Persen
7			Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan ditingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	N/A	N/A	0,25	0,5	0,75	1	Persen
1		Tercapainya pemuda yang berideologi Pancasila, berkarakter, berbudaya dan berwawasan kebangsaan	Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan partisipasi pemuda dalam sosialisasi kemasyarakatan dan kegiatan organisasi di pusat dan daerah	N/A	0,3	0,5	0,7	0,9	1	Persen
2			Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan peningkatan kepemimpinan pemuda di level pusat dan daerah	N/A	0,3	0,5	0,7	0,9	1	Persen
3			Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan peningkatan budaya literasi pemuda di pusat dan daerah	N/A	0,3	0,5	0,7	0,9	1	Persen
4			Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap	N/A	0,3	0,5	0,7	0,9	1	Persen

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target						Satuan
				Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	
			implementasi kebijakan wawasan kebangsaan pemuda di pusat dan daerah							
5			Persentase pemerintah pusat dan daerah yang responsif terhadap implementasi kebijakan peningkatan karakter pemuda	N/A	0,3	0,5	0,7	0,9	1	Persen
6			Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	N/A	N/A	6,86	N/A	N/A	7,36	Persen
7			Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir	N/A	N/A	81,97	N/A	N/A	82,58	Persen
1	Program Keolahragaan	Meningkatnya pemassalan olahraga dan aktivitas fisik masyarakat	Tingkat partisipasi berolahraga masyarakat	N/A	33,87	35,4	36,93	38,46	40	Persen
2			Tingkat ketersediaan sumber daya pendukung olahraga masyarakat yang berkualitas	N/A	85	90	90	95	100	Persen
3			Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang memadai	N/A	85	90	90	95	100	Persen
4			Nilai kepuasan masyarakat dalam dukungan pemassalan olahraga masyarakat	N/A	50	50	55	55	60	Persen
1		Meningkatnya berprestasi olahraga tingkat regional dan internasional	Persentase atlet Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) yang berpartisipasi di event regional dan internasional	N/A	100	100	100	100	100	Persen

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target						Satuan
				Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	
2			Jumlah atlet elite nasional yang lolos kualifikasi olimpiade	N/A	N/A	35	N/A	N/A	35	atlet
3			Jumlah atlet elite nasional yang lolos kualifikasi paralimpiade	N/A	N/A	25	N/A	N/A	25	atlet
4			Peringkat pada Asian Games	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	peringkat
5			Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi nasional berbasis cabang olahraga olimpiade dan potensi daerah	N/A	40	40	40	41	42	event
6			Fasilitasi pembinaan organisasi keolahragaan berbasis <i>olimpiade</i> dalam memenuhi standar minimal keolahragaan (lembaga)	N/A	22	22	22	23	24	lembaga
7			Pengelola organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dalam perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga (orang)	N/A	600	600	600	600	600	orang
8			Tenaga keolahragaan <i>olimpiade</i> yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan	N/A	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	orang
9			Prasarana gedung olahraga berbasis cabor olimpiade/paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	N/A	7	7	8	8	8	lembaga
10			Peringkat pada Asian Para Games	N/A	N/A	N/A	10	N/A	N/A	peringkat
11			Tingkat capaian medali emas pada <i>olimpiade</i> (2021 dan 2024)	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100	persen
12			Tingkat capaian medali emas pada paralimpiade (2021 dan 2024)	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100	persen
13			Peringkat pada SEA Games	N/A	N/A	4	N/A	3	N/A	peringkat
14			Peringkat pada Asean Paragames	N/A	N/A	1	N/A	1	N/A	peringkat

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target						Satuan
				Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	
15			Persentase olahragawan <i>olimpiade</i> di PPLP/PPLM yang menjadi olahragawan andalan nasional	N/A	5	10	15	20	25	persen
16			Persentase olahragawan <i>olimpiade/paralimpiade</i> di SKO yang menjadi olahragawan andalan nasional	N/A	5	10	15	20	25	persen

III.5.3. Penetapan Isu-Isu Strategis

Dari uraian di atas, terdapat tantangan dalam menjaga keberlangsungan pembangunan pelayanan pendidikan, pemuda dan olahraga di DIY. Untuk itu perlu merumuskan beberapa isu strategis untuk dapat menentukan tujuan dan sasaran organisasi. Berikut ini adalah beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY:

III.5.6.1. Partisipasi dan Pemerataan Pendidikan

Perluasan dan pemerataan peserta didik adalah upaya untuk meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perluasan dan pemerataan peserta didik perlu dilakukan.

Peningkatan angka partisipasi di jenjang pendidikan menengah adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Angka partisipasi sekolah (APS) mengukur persentase jumlah peserta didik pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah populasi peserta didik pada usia yang sama.

Peningkatan APS di jenjang pendidikan menengah sangat penting karena pendidikan pada jenjang ini merupakan fondasi bagi pengembangan kemampuan individu di masa depan. Dengan meningkatkan APS, masyarakat Indonesia akan memiliki lebih banyak tenaga kerja yang terdidik dan berkualitas, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kemampuan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Berdasar data pada Gambar 3.6, Gambar 3.7, dan Gambar 3.8, saat ini masih terdapat warga DIY yang belum mendapatkan pendidikan di jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan khusus, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah DIY. Beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, psikologis, dan lingkungan sosial masih menjadi alasan mengapa anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau memutuskan sekolah. Di samping itu, kurangnya fasilitas dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah dengan kebutuhan khusus juga menjadi penyebab anak usia sekolah dengan kebutuhan khusus tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

III.5.6.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu dilakukan secara sistematis agar mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki sumber daya manusia, sarana prasarana, dan proses pembelajaran. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas menjadi faktor kunci dalam manajemen sekolah dan pembelajaran siswa. Namun, masih terdapat pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi atau belum bersertifikasi, yang dapat menghambat

peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, perbaikan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan harus terus dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Selain pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, sarana prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Pemerintah Daerah DIY terus berupaya meningkatkan ketersediaan ruang kelas, jamban, ruang praktik siswa, ruang guru, dan peralatan pembelajaran, namun masih banyak yang perlu diperbaiki. Selain itu, pengembangan kurikulum juga perlu dilakukan secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Beberapa materi yang perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum adalah isu-isu terkini yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan teknologi.

Dalam hal peningkatan literasi dan numerasi, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif lagi. Hasil asesmen nasional menunjukkan bahwa capaian literasi dan numerasi di DIY masih dibawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan program-program khusus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran literasi dan numerasi. Program-program ini dapat berupa pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pendidik dan siswa, pengembangan bahan ajar yang inovatif dan menarik, serta penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Dengan adanya program-program ini diharapkan dapat meningkatkan capaian literasi dan numerasi di DIY sehingga mampu bersaing dengan capaian literasi dan numerasi di tingkat nasional.

Pentingnya peningkatan literasi dan numerasi dalam pendidikan adalah karena kedua hal ini menjadi dasar bagi peserta didik untuk menguasai berbagai mata pelajaran dan kemampuan hidup yang esensial. Literasi dan numerasi menjadi dasar dalam pemahaman dan penggunaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi modal penting dalam berbagai profesi di masa depan. Selain itu, kemampuan literasi dan numerasi juga menjadi indikator bagi kualitas pendidikan di suatu wilayah atau negara.

Peningkatan literasi dan numerasi juga dapat berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Hal ini karena literasi dan numerasi melibatkan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi serta melakukan perhitungan matematika. Oleh karena itu, peningkatan literasi dan numerasi akan membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan tersebut, sehingga mampu bersaing di era globalisasi dan teknologi.

Dalam hal peningkatan literasi dan numerasi, peran semua pihak sangat penting, termasuk pemerintah, sekolah, pendidik, orang tua, serta masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong peningkatan literasi dan numerasi. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk program-program yang berkaitan dengan literasi dan numerasi, sedangkan sekolah dan pendidik dapat mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Orang tua juga dapat membantu dengan memberikan dukungan dan membimbing anak-anak dalam belajar, serta masyarakat dapat mendukung dengan memberikan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran.

III.5.6.3. Relevansi Pendidikan

Peningkatan relevansi pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi.

Pertama-tama, layanan pendidikan vokasi perlu dirancang dan dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dalam hal ini, keterlibatan DU/DI sangat penting dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan vokasi. DU/DI harus berperan aktif dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, pemenuhan sarana prasarana, evaluasi pembelajaran siswa, dan informasi tentang kebutuhan kompetensi di pasar tenaga kerja.

Selain itu, kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja juga perlu ditingkatkan. Terutama bagi lulusan pendidikan menengah, khususnya SMK, perlu dikembangkan keterampilan, soft skills, nilai budaya kerja, dan kemampuan berwirausaha. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat keterkaitan antara pendidikan dengan dunia kerja melalui program magang, pelatihan, dan kerjasama dengan perusahaan.

Pengembangan *teaching factory* juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan relevansi pendidikan. *Teaching factory* merupakan program yang memungkinkan peserta didik belajar berproduksi dan memastikan hasil produksinya sesuai dengan standar industri. Dalam hal ini, pengembangan *teaching factory* perlu ditingkatkan untuk mendorong pembelajaran, riset terapan, dan inovasi berbasis DU/DI yang dapat membantu peserta didik belajar dan mempersiapkan mereka untuk memasuki dunia kerja.

Dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan, perlu dipastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada analisis kebutuhan pasar tenaga kerja dan memenuhi standar DU/DI. Selain itu, kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja harus ditingkatkan dengan memperkuat keterkaitan antara pendidikan dengan dunia kerja.

III.5.6.4. Penguatan Kepemudaan

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi ketercapaiannya. Salah satu permasalahan tersebut adalah rendahnya angka partisipasi khususnya di tingkat Pendidikan Tinggi. Selain itu, kurangnya lapangan kerja yang tersedia juga mempengaruhi ketercapaian IPP di DIY. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka pengangguran.

Untuk mengatasi permasalahan ketercapaian IPP di DIY, perlu dilakukan berbagai strategi seperti peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan akses lapangan kerja, serta peningkatan akses terhadap fasilitas pemuda dan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, perlu juga dilakukan pemberdayaan pemuda melalui program pelatihan dan bimbingan serta pengembangan wirausaha.

Peningkatan pemuda berwirausaha juga menjadi salah satu cara efektif untuk mengentaskan kemiskinan di DIY. Namun, terdapat beberapa permasalahan terkait peningkatan pemuda berwirausaha di DIY. Salah satunya adalah kurangnya akses terhadap modal usaha dan fasilitas pendukung bisnis. Selain itu, kurangnya keterampilan dan pengalaman dalam mengelola bisnis serta kurangnya akses informasi

tentang pasar dan teknologi juga menjadi hambatan utama bagi pemuda untuk mengembangkan usaha mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah DIY perlu memperkuat kebijakan dan program yang mendukung pengembangan wirausaha pemuda. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses terhadap modal usaha dan fasilitas pendukung bisnis, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses ke teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pemerintah DIY juga dapat memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan kepada pemuda.

Dalam mengembangkan wirausaha pemuda, juga perlu mempertimbangkan pengembangan sektor usaha yang berpotensi untuk dikembangkan di DIY, seperti sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi pemuda untuk mengembangkan bisnis dan menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya perbaikan ketercapaian IPP dan peningkatan pemuda berwirausaha, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di DIY secara keseluruhan.

III.5.6.5. Pembinaan Keolahragaan

Meningkatkan capaian Sport Development Index (SDI) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki peran yang penting dalam mengembangkan olahraga di daerah tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan Desain Olahraga Daerah (DOD) yang tepat untuk DIY. DOD ini dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan fasilitas olahraga di DIY, sehingga dapat meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Selain itu, meningkatkan prestasi siswa di bidang olahraga juga menjadi hal yang penting. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan olahraga di sekolah-sekolah, seperti menyediakan fasilitas yang memadai dan melatih guru olahraga yang berkualitas. Selain itu, perlu juga dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program pendidikan olahraga yang telah dilakukan.

Meningkatkan prestasi siswa di bidang olahraga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di DIY secara keseluruhan. Dengan adanya prestasi yang dihasilkan, dapat membangun citra positif daerah tersebut dan membuka peluang untuk menarik minat wisatawan. Selain itu, prestasi olahraga juga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi, seperti meningkatkan kesehatan masyarakat dan membuka peluang lapangan kerja di bidang olahraga.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi dalam meningkatkan capaian SDI di DIY. Salah satunya adalah kurangnya fasilitas olahraga yang memadai di daerah pedalaman dan perbatasan. Selain itu, masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan program-program yang mendukung pengembangan olahraga di DIY, seperti penyediaan fasilitas olahraga yang memadai dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga. Selain itu, perlu juga dilakukan pembinaan dan pengembangan bakat olahraga sejak dini, seperti dengan memberikan program pelatihan olahraga untuk anak-anak di sekolah-sekolah. Dengan adanya perbaikan capaian SDI di DIY, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan olahraga di DIY secara keseluruhan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan komponen penting dalam pembangunan daerah. Tujuan merupakan pernyataan yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi daerah. Visi dan misi ini berkaitan dengan isu strategis daerah dan masalah-masalah pembangunan. Dalam mengembangkan tujuan, perlu memperhatikan visi dan misi daerah. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan harus diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Penetapan sasaran yang jelas dan memiliki indikator yang terukur akan membantu dalam mencapai tujuan secara fokus dan akan dapat mendorong pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

Pada periode 2022-2027, sasaran pembangunan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga akan difokuskan pada penyelesaian beberapa permasalahan dengan mempertimbangkan isu strategis aktual serta memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata kelola pemerintah yang baik. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan serta pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga akan menjadi fokus pembangunan untuk mencapai masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat dan kesejahteraan sosial kemasyarakatan dengan mengutamakan nilai-nilai budaya lokal DIY.

Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2022-2027 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022-2027

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/ Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rata-rata Lama Sekolah			9,64	9,65	9,66	9,68	9,7	9,72	9,72
		Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA			21.91%	21.93%	21.94%	21.96%	21.97%	21.99%	21.99%
		Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA			18.93%	18.95%	18.96%	18.98%	18.99%	19.01%	19.01%
		Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK			14.02%	14.04%	14.05%	14.07%	14.08%	14.10%	14.10%
		Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK			11.04%	11.06%	11.07%	11.09%	11.10%	11.12%	11.12%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda			65,57	65,59	65,61	65,63	65,65	65,67	65,67

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/ Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS			peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)
		Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS			peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar
			Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	89,95%	89,97%	89,98%	90,00%	90,01%	90,03%	90,03%
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	50,68%	50,70%	50,71%	50,73%	50,74%	50,76%	50,76%
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	30,81%	30,83%	30,84%	30,86%	30,87%	30,89%	30,89%
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	51,91%	51,93%	51,94%	51,96%	51,97%	51,99%	51,99%
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	30,34%	30,36%	30,37%	30,39%	30,40%	30,42%	30,42%
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36.42%	36.47%	36.52%	36.57%	36.62%	36.67%	36.67%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/ Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51,30%	51,32%	51,33%	51,35%	51,36%	51,38%	51,38%
			Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	Persentase pemuda bekerja	60.34%	61.84%	63.34%	64.84%	66.34%	67.84%	67.84%
			Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	17 medali	20 medali	22 medali	24 medali	26 medali	28 medali	28 medali
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	A	A	A	A	A	A	A

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan efektif. Langkah-langkah ini terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang didasarkan pada kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap. Strategi adalah cara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki guna mengatasi permasalahan yang ada sehingga memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, strategi ini diimplementasikan melalui sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya konkret dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan strategi dan kebijakan yang tepat dan terarah akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Berikut rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tahun 2022-2027:

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Dikpora DIY Tahun 2022-2027

Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan	Peningkatan aksesibilitas pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan memastikan bahwa fasilitas pendidikan mudah diakses bagi semua orang, termasuk peserta didik dengan disabilitas.
			Memperluas akses ke teknologi yang mendukung pembelajaran dan partisipasi dalam pendidikan
			Memberikan beasiswa atau bantuan operasional kepada satuan pendidikan dapat membantu mengurangi beban keuangan yang sering kali menjadi hambatan dalam aksesibilitas pendidikan.
			Meningkatkan kesadaran/advokasi kepada masyarakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, namun juga tanggung jawab masyarakat dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan hak semua orang termasuk penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan
			penguatan pendataan terhadap anak usia sekolah yang tidak bersekolah sehingga dapat

Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			memberikan penanganan yang sesuai dengan kondisi anak
			fasilitasi terhadap perijinan pada pendirian satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan dengan ketersediaan satuan pendidikan
		peningkatan capaian literasi dan numerasi	pengembangan kompetensi bagi pendidik dan siswa dengan berbagai macam pelatihan, seperti pelatihan pengembangan bahan ajar, pelatihan metode pembelajaran inovatif, dan pelatihan penguasaan teknologi informasi.
			Pengembangan bahan ajar yang inovatif dan menarik, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan.
			Penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Dengan memperkuat interaksi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan media pembelajaran interaktif dan pembentukan komunitas belajar
		Peningkatan kualitas pendidikan	Pengembangan minat bakat peserta didik dengan penyelenggaraan, pembinaan, dan keikutsertaan dalam kejuaraan dan lomba-lomba di berbagai bidang
			Menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan non diskriminatif
			peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
			Pemerataan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian insentif dan pemetaan kebutuhan pendidik
		Pembentukan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai budaya	Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum dan Mengajarkan nilai-nilai budaya melalui program ekstrakurikuler

Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan penyerapan lulusan SMK	Mengadopsi nilai-nilai budaya dalam kebijakan sekolah dan memperkuat pengembangan sarana prasarana infrastruktur dan pengkondisian lingkungan pendidikan berkarakter nilai-nilai keistimewaan
			Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
			pelatihan dan pengembangan kepada guru SMK agar memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam industri tertentu.
			memperkuat kerja sama dengan industri untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tren industri yang terbaru.
			fasilitasi program magang bagi siswa SMK di perusahaan-perusahaan terkait.
			Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah SMK sebagai salah satu bentuk pengembangan unit produksi yang ada di sekolah sehingga siswa dapat melakukan praktek bisnis
	Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan	Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda	Meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi pemuda khususnya partisipasi pemuda dalam Pendidikan Tinggi dengan penyediaan beasiswa bagi pemuda
			Meningkatkan akses pemuda terhadap pelatihan dan pendidikan kewirausahaan
			Mendorong kolaborasi antara pemuda dan industri dengan memfasilitasi pertemuan antara pemuda dengan pelaku industri untuk berdiskusi tentang tren bisnis dan peluang kerja sehingga dapat membuka peluang bagi pemuda untuk mendapatkan pengalaman kerja dan membangun jaringan yang kuat.
			Meningkatkan jumlah kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan bagi pemuda serta evaluasi terhadap keberhasilan kegiatan dengan menghitung persentase

Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			keberhasilan pemuda yang mampu mandiri dan wirausaha
			mengadakan kompetisi dan penghargaan untuk mengakui dan mendorong kreativitas dan inovasi pemuda sehingga dapat memberikan motivasi bagi pemuda untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam bidang yang mereka minati
			Menjalin kerjasama dengan Kwarda dalam upaya peningkatan kapasitas pembangunan karakter pemuda
	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional	Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berolahraga	Pengembangan <i>talent pool</i> untuk atlet-atlet berbakat untuk cabang olahraga PON/ASEAN Games/Olimpiade melalui Kelas Khusus Olahraga
			Pengembangan <i>talent pool</i> untuk atlet-atlet penyandang disabilitas berbakat untuk cabang olahraga ParaPON/Para Asean Games/Paralimpiade melalui KKO/SKO
			Peningkatan peringkat olahraga prestasi DIY di tingkat nasional dengan pembinaan dan pelatihan atlet pelajar sejak dini
			Pengembangan tata cara dan pola untuk lebih memassalkan olahraga rekreasi ke dalam masyarakat
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur olahraga DIY untuk mencapai standar internasional
			Menyelenggarakan dan ikut serta dalam kejuaraan dan even olahraga
			Pembentukan Sekolah Keberbakatan Olahraga sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pelatihan olahraga sejak dini bagi siswa secara intensif
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan	Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Meningkatkan layanan bagi masyarakat dengan mengedepankan transparansi, keterbukaan informasi dan efisien

Misi 1: Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pemerintahan di Perangkat Daerah		Meningkatkan kinerja manajemen perkantoran baik terkait manaemen pegawai maupun manajemen kerja
			Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tepat waktu dalam pelaksanaan pekerjaan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang akan dilaksanakan selama periode 2022- 2027 dalam rangka pemenuhan layanan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Dikpora Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				Rata-rata Lama Sekolah	9,64	9,64		10		9,66		9,68		9,7		9,72		9,72		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	21.91%	21.91 %		21.93 %		21.94 %		21.96 %		21.97 %		21.99 %		21.99%			
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	18.93%	18.93 %		18.95 %		18.96 %		18.98 %		18.99 %		19.01 %		19.01%			
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	14.02%	14.02 %		14.04 %		14.05 %		14.07 %		14.08 %		14.10 %		14.10%			
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	11.04%	11.04 %		11.06 %		11.07 %		11.09 %		11.10 %		11.12 %		11.12%			
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	65,57	65,57		65,59		65,61		65,63		65,65		65,67		65,67			
				Peringkat yang diraih dalam Pra-	peringkat 4	peringkat 4		peringkat 8		peringkat 4		peringkat 8		peringkat 4		peringkat 8		peringkat 8			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				POPNAS dan POPNAS	besar (pra popnas)	besar (pra popnas)		besar (Popnas)		besar (pra popnas)		besar (Popnas)		besar (pra popnas)		besar (Popnas)		besar (Popnas)			
				Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar		peringkat 6 besar		peringkat 6 besar		peringkat 6 besar		peringkat 6 besar		peringkat 6 besar		peringkat 6 besar			
	Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan			Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	89,95 %	89,95 %		89,97 %		89,98 %		90,00 %		90,01 %		90,03 %		90,03 %		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	50,68%	50,68 %		50,70 %		50,71 %		50,73 %		50,74 %		50,76 %		50,76%			
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	30,81%	30,81 %		30,83 %		30,84 %		30,86 %		30,87 %		30,89 %		30,89%			
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	51,91%	51,91 %		51,93 %		51,94 %		51,96 %		51,97 %		51,99 %		51,99%			
				Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	30,34%	30,34 %		30,36 %		30,37 %		30,39 %		30,40 %		30,42 %		30,42%			
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36.42%	36.42 %		36.47 %		36.52 %		36.57 %		36.62 %		36.67 %		36.67%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51,30%	51,30 %		51,32 %		51,33 %		51,35 %		51,36 %		51,38 %		51,38%			
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Se derajat	98,49 %	98,49 %	567.439.289.110	99 %	600.238.392.120	99,5 %	705.554.851.548	100 %	809.956.231.306	100 %	931.291.089.417	100 %	1.070.825.318.579	100 %	4.685.305.172.080	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	86,00%	86,00 %		86,05 %		86,10 %		86,15 %		86,20 %		86,25 %		86,25%			
				Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77,37%	77,37 %		77,42 %		77,47 %		77,52 %		77,57 %		77,62 %		77,62%			
				Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	76,90%	76,90 %		78,00 %		80%		80,5%		81%		81,5%		81,5%			
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58,57%	58,57 %		58,59 %		58,60 %		58,62 %		58,63 %		58,65 %		58,65%			
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49,41%	49,41 %		49,43 %		49,44 %		49,46 %		49,47 %		49,49 %		49,49%			
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	46,94%	46,94 %		46,95 %		46,97 %		46,98 %		47,00 %		47,01 %		47,01%			
				Persentase satuan pendidikan dengan	41,43%	41,43 %		41,44 %		41,46 %		41,47 %		41,49 %		41,50 %		41,50%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul																	
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.79%	46.79 %		46.80 %		46.82 %		46.83 %		46.85 %		46.86 %		46.86%			
				Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	0 orang	0 orang		30 orang		35 orang		40 orang		45 orang		50 orang		50 orang			
				Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	40%	40%		45%		50%		55%		60%		65%		65%			
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,23%	0,23%		0,22%		0,20%		0,19%		0,17%		0,16%		0,16%			
				Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		2,26		n/a		n/a		n/a		n/a		2,26			
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		2,11		n/a		n/a		n/a		n/a		2,11			
				Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		2,10		n/a		n/a		n/a		n/a		2,1			
				Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		1,93		n/a		n/a		n/a		n/a		1,93			
				Rata-rata kompetensi Literasi SDLB	n/a	n/a		2,10		n/a		n/a		n/a		n/a		2,1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
				berdasarkan Asesmen Nasional																	
				Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		1,92		n/a		n/a		n/a		n/a		1,92			
				Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		1,83		n/a		n/a		n/a		n/a		1,83			
				Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		2,27		n/a		n/a		n/a		n/a		1,92			
				Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		2,10		n/a		n/a		n/a		n/a		2,1			
				Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		1,92		n/a		n/a		n/a		n/a		1,92			
				Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		1,83		n/a		n/a		n/a		n/a		1,83			
				Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		2,27		n/a		n/a		n/a		n/a		2,27			
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	n/a		2,03		n/a		n/a		n/a		n/a		2,03			
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB	n/a	n/a		1,90		n/a		n/a		n/a		n/a		1,9			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
				berdasarkan Asesmen Nasional																	
				Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	n/a	n/a		52%		n/a		n/a		n/a		n/a		52%			
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	35 medali	35 medali	197.503.850.325	35 medali	211.295.018.008	38 medali	265.896.909.151	40 medali	304.192.977.324	42 medali	349.663.347.335	44 medali	401.953.415.187	44 medali	1.730.505.517.330	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
				Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	250 siswa	250 siswa		300 siswa		350 siswa		400 siswa		450 siswa		500 siswa		500 siswa			
				Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	74,01	74,01		74,16		74,31		74,46		74,61		74,76		74,76			
				Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	61,04	61,04		61,19		61,34		61,49		61,64		61,79		61,79			
				Persentase SMA yang melaksanakan UKS	20.10%	20.10 %		25.10 %		30.10 %		32.10 %		34.10 %		36.10 %		36.10%			
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	n/a	n/a		88,02 %		n/a		n/a		n/a		n/a		88,02%			
				Iklim keamanan SMA	84,28	84,28		84,43		84,58		84,73		84,88		85,03		85,03			
				Iklim kebinekaan SMA	96,56	96,56		96,71		96,86		97,01		97,16		97,31		97,31			
				Iklim Inklusivitas SMA	82,83	82,83		82,98		83,13		83,28		83,43		83,58		83,58			
		1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	15.000.000.000	1 unit	17.250.000.000	1 unit	19.837.500.000	1 unit	22.813.125.000		74.900.625.000	Dinas Pendidikan Pemuda	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
																				a Dan Olahrag a	
		1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah dibangun	1 ruang	1 ruang	460.072.000	1 ruang	282.076.000	1 ruang	282.076.000	1 ruang	324.387.400	1 ruang	373.045.510	1 ruang	429.002.337		2.150.659.247	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang telah dibangun	1 ruang	1 ruang	411.248.000	1 ruang	484.136.000	1 ruang	484.136.000	1 ruang	556.756.400	1 ruang	640.269.860	1 ruang	736.310.339		3.312.856.599	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang telah dibangun	0 orang	0 orang	0	1 ruang	484.136.000	1 ruang	484.136.000	1 ruang	556.756.400	1 ruang	640.269.860	1 ruang	736.310.339		2.901.608.599	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah dibangun	1 ruang	1 ruang	246.699.000	1 ruang	302.682.000	1 ruang	302.682.000	1 ruang	348.084.300	1 ruang	400.296.945	1 ruang	460.341.487		2.060.785.732	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	2 ruang	2 ruang	576.318.000	1 ruang	282.076.000	1 ruang	282.076.000	1 ruang	324.387.400	1 ruang	373.045.510	1 ruang	429.002.337		2.266.905.247	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	1 unit	1 unit	1.464.496.000	1 unit	3.466.550.300	1 unit	3.466.550.300	1 unit	3.986.532.845	1 unit	4.584.512.772	1 unit	5.272.189.688		22.240.831.905	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat kat Daerah Penang gung-jawab	Lok asi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	92 ruang	92 ruang	12.585.457.000	18 ruang	3.608.485.600	18 ruang	3.608.485.600	18 ruang	4.149.758.440	18 ruang	4.772.222.206	18 ruang	5.488.055.537		34.212.464.383	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	8 ruang	8 ruang	1.302.447.000	5 ruang	1.678.322.100	5 ruang	1.678.322.100	5 ruang	1.930.070.415	5 ruang	2.219.580.977	5 ruang	2.552.518.124		11.361.260.716	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang telah direhabilitasi sedang/berat	8 ruang	8 ruang	1.720.390.000	1 ruang	473.120.000	1 ruang	473.120.000	1 ruang	544.088.000	1 ruang	625.701.200	1 ruang	719.556.380		4.555.975.580	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang telah direhabilitasi sedang/berat	6 ruang	6 ruang	1.296.888.000	1 ruang	314.195.000	1 ruang	314.195.000	1 ruang	361.324.250	1 ruang	415.522.888	1 ruang	477.851.321		3.179.976.459	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang telah direhabilitasi sedang/berat	4 ruang	4 ruang	555.307.000	1 ruang	175.315.000	1 ruang	175.315.000	1 ruang	201.612.250	1 ruang	231.854.088	1 ruang	266.632.201		1.606.035.539	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 ruang	1 ruang	142.359.000	2 ruang	350.630.000	1 ruang	350.630.000	1 ruang	403.224.500	1 ruang	463.708.175	1 ruang	533.264.401		2.243.816.076	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah	1 ruang	1 ruang	155.938.000	0 orang	0	1 ruang	0	1 ruang	171.531.800	1 ruang	188.684.980	1 ruang	207.553.478		723.708.258	Dinas Pendidikan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat kat Daerah Penang gung-jawab	Lok asi	
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
			Kesehatan Sekolah	direhabilitasi sedang/berat															Pemud a Dan Olahrag a	
		1.01.02.1.01.28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	4 ruang	4 ruang	702.902.000	2 ruang	821.503.000	2 ruang	821.503.000	2 ruang	944.728.450	2 ruang	1.086.437.718	2 ruang	1.249.403.375	5.626.477.543	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	14 unit	14 unit	1.345.185.000	5 unit	860.921.000	5 unit	1.370.427.111	5 unit	1.575.991.178	5 unit	1.812.389.854	5 unit	2.084.248.332	9.049.162.475	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	7 paket	7 paket	215.000.000	9 paket	322.000.000	9 paket	322.000.000	9 paket	370.300.000	9 paket	425.845.000	9 paket	489.721.750	2.144.866.750	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	0 paket	0 paket	0	0 paket	0	300 paket	136.191.500	300 paket	156.620.225	300 paket	180.113.259	300 paket	207.130.248	680.055.232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1146 Peserta didik	1146 Peserta didik	25.116.854.000	65274 Peserta didik	23.804.493.300	33705 Peserta didik	11.652.935.800	33755 Peserta didik	11.640.876.170	33805 Peserta didik	13.237.007.596	33855 Peserta didik	15.072.558.735	100.524.725.601	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggara an Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	46.385.586.325	169 Satuan Pendidikan	68.471.892.308	169 Satuan Pendidikan	99.146.199.840	169 Satuan Pendidikan	114.018.129.816	169 Satuan Pendidikan	131.120.849.288	169 Satuan Pendidikan	150.788.976.682	609.931.634.259	Dinas Pendidikan Pemuda Dan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
																				Olahrag a	
		1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	75 Satuan Pendidikan	743.408.400	75 Satuan Pendidikan	854.919.660	75 Satuan Pendidikan	983.157.609	75 Satuan Pendidikan	1.130.631.250	3.712.116.919	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY	
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 peserta didik	900 peserta didik	6.771.008.000	9308 peserta didik	4.142.529.000	9358 peserta didik	12.253.520.200	9408 peserta didik	14.091.548.230	9458 peserta didik	16.205.280.465	9508 peserta didik	18.636.072.534	72.099.958.429	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY	
		1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	n/a	n/a	0	256 orang	167.352.000	276 orang	4.746.632.000	296 orang	5.458.626.800	316 orang	6.277.420.820	336 orang	7.219.033.943	23.869.065.563	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY	
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 orang	250 orang	850.922.000	5062 orang	585.342.900	5082 orang	46.207.000	5102 orang	53.138.050	5122 orang	61.108.758	5142 orang	70.275.071	1.666.993.779	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY	
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	169 satuan pendidikan	169 satuan pendidikan	1.044.208.000	169 satuan pendidikan	911.100.500	169 satuan pendidikan	1.897.827.000	169 satuan pendidikan	2.182.501.050	169 satuan pendidikan	2.509.876.208	169 satuan pendidikan	2.886.357.639	11.431.870.397	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Sekolah Menengah Atas	169 satuan	169 satuan	94.121.140.000	169 satuan	99.261.560.000	170 satuan	99.261.560.000	170 satuan	114.150.794.000	170 satuan	131.273.413.100	170 satuan	150.964.425.065	689.032.892.165	Dinas Pendidikan	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat kat Daerah Penang gung-jawab	Lok asi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Sekolah Menengah Atas	yang Mengelola Dana BOS	pendidikan	pendidikan		pendidikan		pendidikan		pendidikan		pendidikan		pendidikan				Pemuda Dan Olahrag a	
		1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	169 orang	169 orang	33.426.000	161 orang	44.600.000	170 orang	63.500.000	170 orang	73.025.000	170 orang	83.978.750	170 orang	96.575.563		395.105.313	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.57	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	n/a	n/a	0	n/a	0	100 orang	3.332.878.700	100 orang	3.832.810.505	100 orang	4.407.732.081	100 orang	5.068.891.893		16.642.313.179	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.60	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	n/a	n/a	0	n/a	0	11 dokumen	1.980.544.900	11 dokumen	2.277.626.635	11 dokumen	2.619.270.630	11 dokumen	3.012.161.225		9.889.603.390	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	n/a	n/a	0	n/a	0	7 kegiatan	305.898.100	7 kegiatan	351.782.815	7 kegiatan	404.550.237	7 kegiatan	465.232.773		1.527.463.925	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.01.62	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	n/a	n/a	0	n/a	0	100 orang	913.951.600	100 orang	1.051.044.340	100 orang	1.208.700.991	100 orang	1.390.006.140		4.563.703.071	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh	52 %	52 %	318.999.838.515	54 %	325.246.663.501	56 %	369.175.411.200	58 %	424.551.722.880	60 %	488.234.481.315	62%	561.469.653.509	62%	2.487.677.770.920	Dinas Pendidikan Pemuda Dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				pekerjaan atau berwirausaha															Olahrag a		
				Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	19 medali	19 medali		20 medali		21 medali		22 medali		23 medali		24 medali		24 medali			
				Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	25,26 %	25,26 %		25,28 %		25,3 %		25,32 %		25,34 %		25,36 %		25,36%			
				Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD	3 sekolah	3 sekolah		4 sekolah		5 sekolah		6 sekolah		7 sekolah		7 sekolah		7 sekolah			
				Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory	32 sekolah	32 sekolah		35 sekolah		38 sekolah		41 sekolah		44 sekolah		46 sekolah		46 sekolah			
				Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	65,6	65,6		65,75		65,90		66,05		66,20		66,35		66,35			
				Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	54,56	54,56		54,71		54,86		55,01		55,16		55,31		55,31			
				Persentase SMK yang melaksanakan UKS	20.10%	20.10 %		25.10 %		30.10 %		32.10 %		34.10 %		36.10 %		36.10%			
				Iklim keamanan SMK	81,13	81,13		81,28		81,43		81,58		81,73		81,88		81,88			
				Iklim kebinekaan SMK	92,57	92,57		92,72		92,87		93,02		93,17		93,32		93,32			
				Iklim Inklusivitas SMK	77,2	77,2		77,35		77,50		77,65		77,80		77,95		77,95			
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 ruang	0 ruang	0	1 ruang	580.158.000	1 ruang	580.158.000	1 ruang	667.181.700	1 ruang	767.258.955	1 ruang	882.347.798		3.477.104.453	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat kat Daerah Penang-gung-jawab	Lok asi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun	22 ruang	22 ruang	29.474.199.000	12 ruang	17.644.384.000	12 ruang	17.644.384.000	12 ruang	20.291.041.600	12 ruang	23.334.697.840	12 ruang	26.834.902.516		135.223.608.956	Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga	DIY
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun	3 ruang	3 ruang	1.500.000.000	11 ruang	5.195.642.000	11 ruang	5.195.642.000	11 ruang	5.974.988.300	11 ruang	6.871.236.545	11 ruang	7.901.922.027		32.639.430.872	Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga	DIY
		1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	2 ruang	2 ruang	319.860.000	1 ruang	175.427.000	1 ruang	175.427.000	1 ruang	201.741.050	1 ruang	232.002.208	1 ruang	266.802.539		1.371.259.797	Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga	DIY
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun	0 ruang	0 ruang	0	1 ruang	580.158.000	1 ruang	580.158.000	1 ruang	667.181.700	1 ruang	767.258.955	1 ruang	882.347.798		3.477.104.453	Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga	DIY
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	0 unit	0 unit	0	12 unit	1.837.714.000	12 unit	1.837.714.000	12 unit	2.113.371.100	12 unit	2.430.376.765	12 unit	2.794.933.280		11.014.109.145	Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga	DIY
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	29 ruang	29 ruang	5.889.175.000	5 ruang	1.148.081.000	5 ruang	1.148.081.000	5 ruang	1.320.293.150	5 ruang	1.518.337.123	5 ruang	1.746.087.691		12.770.054.964	Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga	DIY
		1.01.02.1.02.16	Rehabilitasi Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala	2 ruang	2 ruang	459.738.000	1 ruang	261.380.000	1 ruang	261.380.000	1 ruang	300.587.000	1 ruang	345.675.050	1 ruang	397.526.308		2.026.286.358	Dinas Pendidikan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat kat Daerah Penang gung-jawab	Lok asi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			Guru/Kepala Sekolah/TU	Sekolah/TU yang telah direhabilitasi																Pemud a Dan Olahrag a	
		1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi	6 ruang	6 ruang	4.597.380.000	2 ruang	1.710.054.000	2 ruang	1.710.054.000	2 ruang	1.966.562.100	2 ruang	2.261.546.415	2 ruang	2.600.778.377		14.846.374.892	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi	3 ruang	3 ruang	827.529.000	1 ruang	316.634.000	1 ruang	316.634.000	1 ruang	364.129.100	1 ruang	418.748.465	1 ruang	481.560.735		2.725.235.300	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	2 unit	2 unit	156.630.000	2 unit	100.900.000	2 unit	1.699.896.000	2 unit	1.954.880.400	2 unit	2.248.112.460	2 unit	2.585.329.329		8.745.748.189	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	22 paket	22 paket	2.200.000.000	19 paket	1.923.433.000	19 paket	1.923.433.000	19 paket	2.211.947.950	19 paket	2.543.740.143	19 paket	2.925.301.164		13.727.855.257	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	0 paket	0 paket	0	0 paket	0	300 paket	183.233.600	300 paket	210.718.640	300 paket	242.326.436	300 paket	278.675.401		914.954.077	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia	41 paket	41 paket	45.419.521.000	23 paket	39.940.627.042	23 paket	29.135.170.000	23 paket	33.505.445.500	23 paket	38.531.262.325	23 paket	44.310.951.674		230.842.977.541	Dinas Pendidikan Pemuda Dan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
																				Olahrag a	
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1193 peserta didik	1193 peserta didik	0	500 peserta didik	2.684.166.000	37266 peserta didik	19.027.875.600	37316 peserta didik	21.882.056.940	37366 peserta didik	25.164.365.481	37416 peserta didik	28.939.020.303		97.697.484.324	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	219 satuan pendidikan	219 satuan pendidikan	73.964.961.015	219 satuan pendidikan	101.404.140.159	219 satuan pendidikan	127.296.384.100	219 satuan pendidikan	146.390.841.715	219 satuan pendidikan	168.349.467.972	219 satuan pendidikan	193.601.888.168		811.007.683.129	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	n/a	n/a	0	219 satuan pendidikan	130.257.000	219 satuan pendidikan	604.093.500	219 satuan pendidikan	694.707.525	219 satuan pendidikan	798.913.654	219 satuan pendidikan	918.750.702		3.146.722.381	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 peserta didik	5000 peserta didik	6.736.351.500	875 peserta didik	4.650.000.000	925 peserta didik	8.832.701.800	975 peserta didik	10.157.607.070	1025 peserta didik	11.681.248.131	1075 peserta didik	13.433.435.350		55.491.343.851	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	n/a	n/a	0	216 orang	131.660.000	221 orang	3.139.679.800	226 orang	3.610.631.770	231 orang	4.152.226.536	236 orang	4.775.060.516		15.809.258.622	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan,	n/a	n/a	0	89 orang	158.105.100	109 orang	327.593.700	129 orang	376.732.755	149 orang	433.242.668	169 orang	498.229.068		1.793.903.291	Dinas Pendidikan Pemuda Dan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi																Olahrag a	
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	219 satuan pendidikan	219 satuan pendidikan	582.644.000	219 satuan pendidikan	957.333.200	219 satuan pendidikan	2.138.274.500	219 satuan pendidikan	2.459.015.675	219 satuan pendidikan	2.827.868.026	219 satuan pendidikan	3.252.048.230		12.217.183.631	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	219 satuan pendidikan	219 satuan pendidikan	146.830.550.000	210 satuan pendidikan	143.658.410.000	210 satuan pendidikan	143.658.410.000	210 satuan pendidikan	165.207.171.500	210 satuan pendidikan	189.988.247.225	210 satuan pendidikan	218.486.484.309		1.007.829.273.034	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	219 orang	219 orang	41.300.000	210 orang	58.000.000	210 orang	78.500.000	210 orang	90.275.000	210 orang	103.816.250	210 orang	119.388.688		491.279.938	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.50	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	n/a	n/a	0	n/a	0	100 orang	422.830.000	100 orang	486.254.500	100 orang	559.192.675	100 orang	643.071.576		2.111.348.751	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.53	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	n/a	n/a	0	n/a	0	5 dokumen	202.356.600	5 dokumen	232.710.090	5 dokumen	267.616.604	5 dokumen	307.759.094		1.010.442.388	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.02.54	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan	n/a	n/a	0	n/a	0	7 kegiatan	197.347.900	7 kegiatan	226.950.085	7 kegiatan	260.992.598	7 kegiatan	300.141.487		985.432.070	Dinas Pendidikan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
			Bidang Pendidikan	di bidang Pendidikan yang dilaksanakan																Pemuda Dan Olahrag a	
		1.01.02.1.02.55	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	n/a	n/a	0	n/a	0	100 orang	857.999.100	100 orang	986.698.965	100 orang	1.134.703.810	100 orang	1.304.909.381		4.284.311.256	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)	10 medali	10 medali	50.935.600.270	12 medali	63.696.710.611	13 medali	70.482.531.197	14 medali	81.211.531.102	15 medali	93.393.260.767	16 medali	107.402.249.883	16 medali	467.121.883.830	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	
				Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	0 siswa	0 siswa		3.500 siswa		4.000 siswa		4.500 siswa		5.000 siswa		5.000 siswa		5.000 siswa			
				Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	58,77	58,77		58,92		59,07		59,22		59,37		59,52		59,52			
				Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	58,86	58,86		59,01		59,16		59,31		59,46		59,61		59,61			
				Persentase SLB yang melaksanakan UKS	20.10%	20.10 %		22.10 %		24.10 %		26.10 %		28.10 %		30.10 %		30.10%			
				Iklim keamanan SMALB	82,6	82,6		82,75		82,90		83,05		83,20		83,35		83,35			
				Iklim kebinekaan SMALB	80,27	80,27		80,42		80,57		80,72		80,87		81,02		81,02			
				Iklim inklusivitas SMALB	84,33	84,33		84,48		84,63		84,78		84,93		85,08		85,08			
		1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	n/a	n/a	0	2 ruang	371.617.600	2 ruang	371.617.600	2 ruang	427.360.240	2 ruang	491.464.276	2 ruang	565.183.917		2.227.243.633	Dinas Pendidikan Pemuda Dan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
																				Olahrag a	
		1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 unit	2 unit	443.438.349	10 unit	1.915.573.700	2 unit	1.915.573.700	2 unit	2.202.909.755	2 unit	2.533.346.218	2 unit	2.913.348.151		11.924.189.873	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 unit	0 unit	0	2 unit	908.549.600	2 unit	908.549.600	2 unit	1.044.832.040	2 unit	1.201.556.846	2 unit	1.381.790.373		5.445.278.459	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	0 ruang	0 ruang	0	1 ruang	248.732.000	1 ruang	248.732.000	1 ruang	286.041.800	1 ruang	328.948.070	1 ruang	378.290.281		1.490.744.151	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	3 ruang	3 ruang	528.562.739	4 ruang	582.883.100	4 ruang	582.883.100	4 ruang	670.315.565	4 ruang	770.862.900	4 ruang	886.492.335		4.021.999.739	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah direhabilitasi	0 ruang	0 ruang	0	1 ruang	148.652.900	1 ruang	148.652.900	1 ruang	170.950.835	1 ruang	196.593.460	1 ruang	226.082.479		890.932.574	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi	1 ruang	1 ruang	164.242.645	1 ruang	181.500.000	1 ruang	181.500.000	1 ruang	208.725.000	1 ruang	240.033.750	1 ruang	276.038.813		1.252.040.208	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		1.01.02.1.03.24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi	3 unit	3 unit	283.266.778	1 unit	133.646.000	1 unit	133.646.000	1 unit	153.692.900	1 unit	176.746.835	1 unit	203.258.860		1.084.257.373	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	2 ruang	2 ruang	338.438.348	4 ruang	782.321.600	4 ruang	782.321.600	4 ruang	899.669.840	4 ruang	1.034.620.316	4 ruang	1.189.813.363		5.027.185.067	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	0 paket	0 paket	0	14 paket	325.000.000	14 paket	325.000.000	14 paket	373.750.000	14 paket	429.812.500	14 paket	494.284.375		1.947.846.875	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	0 paket	0 paket	0	0 paket	0	300 paket	0	300 paket	156.620.225	300 paket	180.113.259	300 paket	207.130.248		543.863.732	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia	6 paket	6 paket	380.680.000	6 paket	475.844.500	6 paket	475.844.500	6 paket	547.221.175	6 paket	629.304.351	6 paket	723.700.004		3.232.594.530	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4683 peserta didik	4683 peserta didik	4.885.805.000	10396 peserta didik	10.047.366.000	10416 peserta didik	12.762.210.000	10436 peserta didik	14.676.541.500	10456 peserta didik	16.878.022.725	10476 peserta didik	19.409.726.134		78.659.671.359	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan	9 satuan	9 satuan	8.404.686.411	9 satuan	9.323.718.011	9 satuan	14.163.419.197	9 satuan	16.287.932.077	9 satuan	18.731.121.888	9 satuan	21.540.790.171		88.451.667.755	Dinas Pendidikan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Ujian bagi Peserta Didik	Proses Belajar dan Ujian	pendidikan	pendidikan		pendidikan		pendidikan		pendidikan		pendidikan		pendidikan				Pemuda Dan Olahrag a	
		1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 satuan pendidikan	0 satuan pendidikan	0	0 satuan pendidikan	0	79 satuan pendidikan	265.644.000	79 satuan pendidikan	305.490.600	79 satuan pendidikan	351.314.190	79 satuan pendidikan	404.011.319		1.326.460.109	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2000 peserta didik	2000 peserta didik	1.556.486.000	365 peserta didik	3.286.484.000	415 peserta didik	4.787.002.400	465 peserta didik	5.505.052.760	505 peserta didik	6.330.810.674	550 peserta didik	7.280.432.275		28.746.268.109	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	1402 orang	1402 orang	8.502.550.000	1531 orang	8.808.732.700	1551 orang	3.539.621.700	1571 orang	4.070.564.955	1591 orang	4.681.149.698	1611 orang	5.383.322.153		34.985.941.206	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	n/a	n/a	0	207 orang	400.337.600	227 orang	12.517.000	247 orang	14.394.550	267 orang	16.553.733	287 orang	19.036.792		462.839.675	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	79 satuan pendidikan	79 satuan pendidikan	2.346.877.000	79 satuan pendidikan	2.696.261.300	79 satuan pendidikan	3.750.720.000	79 satuan pendidikan	4.313.328.000	79 satuan pendidikan	4.960.327.200	79 satuan pendidikan	5.704.376.280		23.771.889.780	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus	79 satuan	79 satuan	23.092.280.000	79 satuan	23.041.490.000	79 satuan	23.041.490.000	79 satuan	26.497.713.500	79 satuan	30.472.370.525	79 satuan	35.043.226.104		161.188.570.129	Dinas Pendidi	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Sekolah Pendidikan Khusus	yang Mengelola Dana BOS	pendidikan	n pendidikan		n pendidikan		n pendidikan		n pendidikan		n pendidikan		n pendidikan				kan Pemud a Dan Olahrag a	
		1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	79 orang	79 orang	8.287.000	79 orang	18.000.000	79 orang	26.500.000	79 orang	30.475.000	79 orang	35.046.250	79 orang	40.303.188		158.611.438	Dinas Pendidikan Pemud a Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.56	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	n/a	n/a	0	n/a	0	100 orang	292.146.000	100 orang	335.967.900	100 orang	386.363.085	100 orang	444.317.548		1.458.794.533	Dinas Pendidikan Pemud a Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.60	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	n/a	n/a	0	n/a	0	4 kegiatan	549.423.400	4 kegiatan	631.836.910	4 kegiatan	726.612.447	4 kegiatan	835.604.313		2.743.477.070	Dinas Pendidikan Pemud a Dan Olahrag a	DIY
		1.01.02.1.03.61	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	n/a	n/a	0	n/a	0	100 orang	1.217.516.500	100 orang	1.400.143.975	100 orang	1.610.165.571	100 orang	1.851.690.407		6.079.516.453	Dinas Pendidikan Pemud a Dan Olahrag a	DIY
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	95.85 %	95.85 %	29.844.000	95.97 %	248.990.200	96.09 %	461.375.000	96.21 %	530.581.250	96.33 %	610.168.438	96.45 %	701.693.703	96.45 %	2.582.652.591	Dinas Pendidikan Pemud a Dan Olahraga	
		1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdiksus	1 tahun	1 tahun	29.844.000	1 tahun	248.990.200	1 tahun	461.375.000	1 tahun	530.581.250	1 tahun	610.168.438	1 tahun	701.693.703	1 tahun	2.582.652.591	Dinas Pendidikan Pemud	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi																	a Dan Olahrag a	
		1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 dokumen	1 dokumen	29.844.000	1 dokumen	248.990.200	1 dokumen	461.375.000	1 dokumen	530.581.250	1 dokumen	610.168.438	1 dokumen	701.693.703		2.582.652.591	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	7 dokumen	7 dokumen	14.570.000	10 dokumen	57.540.000	10 dokumen	87.473.000	10 dokumen	100.593.950	10 dokumen	115.683.043	10 dokumen	133.035.499	50 dokumen	508.895.492	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahra ga	
				Jumlah rekomendasi perizinan yang diproses oleh OPD terhadap satuan pendidikan menengah	n/a	n/a		10 dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		10 dokumen			
		1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY	10 dokumen	10 dokumen	14.570.000	10 dokumen	57.540.000	10 dokumen	87.473.000	10 dokumen	100.593.950	10 dokumen	115.683.043	10 dokumen	133.035.499	10 dokumen	508.895.492	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	
		1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 dokumen	10 dokumen	14.570.000	10 dokumen	57.540.000	10 dokumen	87.473.000	10 dokumen	100.593.950	10 dokumen	115.683.043	10 dokumen	133.035.499		508.895.492	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	48.83 %	48.83 %	38.943.638.400	51,33 %	31.982.868.900	53,83 %	36.420.000.000	56,33 %	40.062.000.000	58,83 %	44.068.200.000	59.00 %	48.475.020.000	59.00 %	239.951.727.300	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik	n/a	n/a		51,33 %		n/a		n/a		n/a		n/a		51,33%			
		2.22.08.5.10	Pendidikan Berbasis Budaya	Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya	49,40%	49,40 %	38.943.638.400	50,00 %	31.982.868.900	50,17 %	36.420.000.000	51,92 %	40.062.000.000	53,67 %	44.068.200.000	53.69 %	48.475.020.000	53.69 %	239.951.727.300	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		2.22.08.5.10.01	Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	21 laporan	21 laporan	31.959.419.000	11 laporan	27.622.668.900	15 laporan	31.120.000.000	15 laporan	34.232.000.000	15 laporan	37.655.200.000	15 laporan	41.420.720.000		204.010.007.900	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		2.22.08.5.10.02	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	12 unit	12 unit	3.450.000.000	1 unit	1.200.000.000	4 unit	1.700.000.000	4 unit	1.870.000.000	4 unit	2.057.000.000	4 unit	2.262.700.000		12.539.700.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		2.22.08.5.10.04	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	90 orang	90 orang	3.534.219.400	90 orang	3.160.200.000	90 orang	3.600.000.000	90 orang	3.960.000.000	90 orang	4.356.000.000	90 orang	4.791.600.000		23.402.019.400	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
	Tercapainya			Persentase pemuda bekerja	60.34 %	60.34 %		61.84 %		63.34 %		64.84 %		66.34 %		67.84 %		67.84 %		Dinas Pendid	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat kat Daerah Penang gung-jawab	Lok asi	
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
	pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan																				ikan Pemuda Dan Olahraga	
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	6.67%	6.67 %	4.882.254.500	7.50 %	7.353.057.300	8.89 %	20.031.795.000	9.09 %	23.036.564.250	9.23 %	26.492.048.888	9.33 %	30.465.856.220	9.33%	112.261.576.158	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga		
				Jumlah kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	n/a	n/a		3 kelompok		n/a		n/a		n/a		n/a		3 kelompok				
		2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	15 kelompok	15 kelompok	4.632.254.500	15 kelompok	7.003.057.300	20 kelompok	19.981.795.000	20 kelompok	22.979.064.250	25 kelompok	26.425.923.888	30 kelompok	30.389.812.470	30 kelompok	111.411.907.408	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga		
		2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	4 orang	4 orang	209.984.000	0 orang	0	13 orang	994.942.100	13 orang	1.144.183.415	13 orang	1.315.810.927	13 orang	1.513.182.566		5.178.103.008	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat kat Daerah Penang gung-jawab	Lok asi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	558 orang	558 orang	2.497.000.000	2283 orang	5.253.057.300	2742 orang	15.629.911.400	2792 orang	17.974.398.110	2842 orang	20.670.557.827	2892 orang	23.771.141.500		85.796.066.137	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	n/a	n/a	0	0 orang	0	2550 orang	2.575.261.600	2600 orang	2.961.550.840	2650 orang	3.405.783.466	2700 orang	3.916.650.986		12.859.246.892	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	80 orang	80 orang	1.510.920.500	80 orang	1.750.000.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0		3.260.920.500	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		2.19.02.1.01.08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	n/a	n/a	0	0 dokumen	0	1 dokumen	186.455.000	1 dokumen	214.423.250	1 dokumen	246.586.738	1 dokumen	283.574.748		931.039.736	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan , Kepeloporan dan Kesukarelawan an Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan	550 orang	550 orang	414.350.000	0 orang	0	550 orang	595.224.900	570 orang	684.508.635	690 orang	787.184.930	610 orang	905.262.670		3.386.531.135	Dinas Pendidikan Pemuda Dan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Kesukarelawan dari Seluruh Kabupaten/Kota																Olahraga	
		2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan organisasi kepemudaan	1 lembaga	1 lembaga	250.000.000	1 lembaga	350.000.000	1 lembaga	50.000.000	1 lembaga	57.500.000	1 lembaga	66.125.000	1 lembaga	76.043.750	1 lembaga	849.668.750	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	250.000.000	2 dokumen	350.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	57.500.000	1 dokumen	66.125.000	1 dokumen	76.043.750		849.668.750	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.725.000.000	100%	1.983.750.000	100%	2.281.312.500	100%	9.990.062.500	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan	1 lembaga	1 lembaga	1.000.000.000	1 lembaga	1.500.000.000	1 lembaga	1.500.000.000	1 lembaga	1.725.000.000	1 lembaga	1.983.750.000	1 lembaga	2.281.312.500	1 lembaga	9.990.062.500	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 organisasi	1 organisasi	1.000.000.000	1 organisasi	1.500.000.000	1 organisasi	1.500.000.000	1 organisasi	1.725.000.000	1 organisasi	1.983.750.000	1 organisasi	2.281.312.500		9.990.062.500	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional			Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	17 medali	17 medali		20 medali		22 medali		24 medali		26 medali		28 medali		28 medali		Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)				target	Rp
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
	dan nasional																				
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 atlet	264 atlet	26.197.173.000	365 atlet	37.301.770.500	264 atlet	59.500.030.900	365 atlet	68.425.035.535	264 atlet	78.688.790.865	365 atlet	90.492.109.496	1623 atlet	360.604.910.296	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti	2 event	2 event	0	2 event	9.849.589.900	2 event	7.674.446.000	2 event	8.825.612.900	2 event	10.149.454.835	2 event	11.671.873.061	2 event	48.170.976.696	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	n/a	n/a	0	3 dokumen	2.323.104.000	3 dokumen	2.431.641.000	3 dokumen	2.796.387.150	3 dokumen	3.215.845.223	3 dokumen	3.698.222.006		14.465.199.379	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	217.896.900	1 dokumen	250.581.435	1 dokumen	288.168.650	1 dokumen	331.393.948		1.088.040.933	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	n/a	n/a	0	283 orang	7.526.485.900	203 orang	5.024.908.100	223 orang	5.778.644.315	243 orang	6.645.440.962	263 orang	7.642.257.107		32.617.736.384	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan	325 atlet	325 atlet	8.697.173.000	370 atlet	1.907.580.600	350 atlet	2.989.753.200	400 atlet	3.438.216.180	370 atlet	3.953.948.607	400 atlet	4.547.040.898	400 atlet	25.533.712.485	Dinas Pendidikan Pemuda Dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			Tingkat Nasional	bakat cabang olahraga															Olahrag a		
		2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	300 orang	300 orang	8.697.173.000	275 orang	1.907.580.600	1450 orang	2.867.659.100	1500 orang	3.297.807.965	1550 orang	3.792.479.160	1600 orang	4.361.351.034		24.924.050.859	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		2.19.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	122.094.100	1 dokumen	140.408.215	1 dokumen	161.469.447	1 dokumen	185.689.864		609.661.626	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional	3 lembaga	3 lembaga	17.500.000.000	3 lembaga	25.544.600.000	3 lembaga	48.835.831.700	3 lembaga	56.161.206.455	3 lembaga	64.585.387.423	3 lembaga	74.273.195.537	3 lembaga	286.900.21.115	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 dokumen	3 dokumen	17.500.000.000	3 dokumen	25.544.600.000	3 dokumen	48.500.000.000	3 dokumen	55.775.000.000	3 dokumen	64.141.250.000	3 dokumen	73.762.437.500		285.223.287.500	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		2.19.03.1.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	335.831.700	1 dokumen	386.206.455	1 dokumen	444.137.423	1 dokumen	510.758.037		1.676.933.615	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan			Kategori Reformasi Birokrasi OPD	A	A		A		A		A		A		A		A		Dinas Pendidikan Pemuda Dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
	urusan pemerintahan di Perangkat Daerah																			Olahraga	
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,56	86,56	976.974.163.525	87	978.781.733.885	86,66	1.024.374.222.945	86,71	1.178.066.653.307	86,76	1.354.774.836.462	86,81	1.557.989.065.595	86,81	7.070.960.675.719	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	1.049.733.000	100 %	1.249.393.800	100 %	540.000.000	100 %	621.000.000	100 %	714.150.000	100 %	821.272.500	100 %	4.995.549.300	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	83.840.000	6 Dokumen	89.960.400	7 Dokumen	400.000.000	7 Dokumen	460.000.000	7 Dokumen	529.000.000	7 Dokumen	608.350.000		2.171.150.400	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	91.485.000	4 Dokumen	68.785.400	4 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	92.000.000	4 Dokumen	105.800.000	4 Dokumen	121.670.000		559.740.400	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	874.408.000	14 Laporan	1.090.648.000	14 Laporan	60.000.000	14 Laporan	69.000.000	14 Laporan	79.350.000	14 Laporan	91.252.500		2.264.658.500	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya	100 %	100 %	929.445.951.462	100 %	924.825.172.025	100 %	977.658.657.697	100 %	1.124.307.456.352	100 %	1.292.953.574.806	100 %	1.486.896.611.025	100 %	6.736.087.423.367	Dinas Pendi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Perangkat Daerah	capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran																kan Pemuda Dan Olahrag a	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6733 Orang/ Bulan	6733 Orang / Bulan	928.223.466.462	6733 Orang / Bulan	923.528.305.625	6733 Orang / Bulan	976.175.553.397	6733 Orang / Bulan	1.122.601.886.407	6733 Orang / Bulan	1.290.992.169.368	6733 Orang / Bulan	1.484.640.994.773		6.726.162.376.032	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	6 dokumen	107.599.000	6 dokumen	112.220.400	5 dokumen	148.496.300	5 dokumen	170.770.745	5 dokumen	196.386.357	5 dokumen	225.844.310		961.317.112	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	443.026.000	24 dokumen	685.494.000	24 dokumen	657.748.000	24 dokumen	756.410.200	24 dokumen	869.871.730	24 dokumen	1.000.352.490		4.412.902.420	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	183.564.000	2 laporan	147.420.000	2 laporan	170.973.000	2 laporan	196.618.950	2 laporan	226.111.793	2 laporan	260.028.561		1.184.716.304	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	11 laporan	11 laporan	488.296.000	11 Laporan	351.732.000	11 Laporan	505.887.000	11 Laporan	581.770.050	11 Laporan	669.035.558	11 Laporan	769.390.891		3.366.111.499	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
				Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD																	
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	100 %	671.232.000	100 %	828.018.000	100 %	863.070.000	100 %	992.530.500	100 %	1.141.410.075	100 %	1.312.621.586	100 %	5.808.882.161	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2 laporan	671.232.000	30 laporan	828.018.000	30 laporan	863.070.000	30 laporan	992.530.500	30 laporan	1.141.410.075	30 laporan	1.312.621.586		5.808.882.161	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	211.800.000	100 %	140.556.500	100 %	142.984.000	100 %	164.431.600	100 %	189.096.341	100 %	217.460.791	100 %	1.066.329.232	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	
		0.00.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	160.700.000	1 dokumen	50.021.000	1 dokumen	55.129.000	1 dokumen	63.398.350	1 dokumen	72.908.103	1 dokumen	83.844.318		486.000.771	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20 dokumen	20 dokumen	51.100.000	35 dokumen	90.535.500	35 dokumen	74.799.000	35 dokumen	86.018.850	35 dokumen	98.921.678	35 dokumen	113.759.929		515.134.957	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	0 orang	0 orang	0	0 orang	0	50 orang	13.056.000	50 orang	15.014.400	50 orang	17.266.560	50 orang	19.856.544		65.193.504	Dinas Pendidikan Pemuda Dan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
			Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan																Olahrag a			
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	2.068.035.600	100 %	2.474.508.100	100 %	3.108.071.400	100 %	3.574.282.110	100 %	4.110.424.427	100 %	4.726.988.091	100 %	20.062.309.728	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a			
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	113.175.000	9 Paket	147.335.150	9 Paket	231.515.300	9 Paket	266.242.595	9 Paket	306.178.984	9 Paket	352.105.832		1.416.552.861	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY		
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	409.647.000	38 Paket	449.419.450	38 Paket	545.637.800	38 Paket	627.483.470	38 Paket	721.605.991	38 Paket	829.846.889		3.583.640.600	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	303.029.600	23 Paket	288.936.100	23 Paket	348.274.500	23 Paket	400.515.675	23 Paket	460.593.026	23 Paket	529.681.980		2.331.030.881	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY		
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	311.073.000	9 Paket	400.945.200	9 Paket	445.036.600	9 Paket	511.792.090	9 Paket	588.560.904	9 Paket	676.845.039		2.934.252.833	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY		
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 dokumen	9 dokumen	43.512.000	9 dokumen	59.799.200	9 dokumen	64.293.200	9 dokumen	73.937.180	9 dokumen	85.027.757	9 dokumen	97.781.921		424.351.258	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	9 laporan	887.599.000	22 laporan	1.128.073.000	22 laporan	1.398.314.000	22 laporan	1.608.061.100	22 laporan	1.849.270.265	22 laporan	2.126.660.805		8.997.978.170	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	86.250.000	1 dokumen	99.187.500	1 dokumen	114.065.625		374.503.125	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat	50 %	50 %	13.874.196.000	50 %	16.890.757.200	50 %	8.231.489.200	50 %	9.502.509.500	50 %	10.926.071.080	50 %	12.562.985.410	50 %	71.988.008.390	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 paket	9 paket	667.347.000	16 paket	533.630.500	16 paket	1.385.393.200	16 paket	1.593.202.180	16 paket	1.832.182.507	16 paket	2.107.009.883		8.118.765.270	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	576 unit	576 unit	1.872.909.500	824 unit	2.816.695.500	824 unit	3.249.247.800	824 unit	3.736.634.970	824 unit	4.297.130.216	824 unit	4.941.699.748		20.914.317.734	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0	3 unit	32.997.200	3 unit	0	3 unit	36.296.920	3 unit	39.926.612	3 unit	43.919.273		153.140.005	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	11.333.939.500	3 unit	12.973.280.200	3 unit	3.255.990.600	3 unit	3.744.389.190	3 unit	4.306.047.569	3 unit	4.951.954.704		40.565.601.763	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0 unit	0	77 unit	534.153.800	77 unit	340.857.600	77 unit	391.986.240	77 unit	450.784.176	77 unit	518.401.802		2.236.183.618	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran	100 %	100 %	19.376.314.762	100 %	21.403.051.400	100 %	22.827.924.848	100 %	26.252.113.575	100 %	30.189.930.612	100 %	34.718.420.204	100 %	154.767.755.401	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	
		0.00.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	9 Laporan	27.124.000	9 Laporan	23.712.000	9 Laporan	20.260.000	9 Laporan	23.299.000	9 Laporan	26.793.850	9 Laporan	30.812.928		152.001.778	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	10.335.397.200	32 Laporan	9.556.618.300	32 Laporan	10.667.846.700	32 Laporan	12.268.023.705	32 Laporan	14.108.227.261	32 Laporan	16.224.461.350		73.160.574.516	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	9 Laporan	9.013.793.562	31 Laporan	11.822.721.100	31 Laporan	12.139.818.148	31 Laporan	13.960.790.870	31 Laporan	16.054.909.501	31 Laporan	18.463.145.926		81.455.179.107	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan	100 %	100 %	4.213.383.600	100 %	6.839.307.080	100 %	7.163.896.640	100 %	8.238.481.136	100 %	9.474.253.307	100 %	10.895.391.302	100 %	46.824.713.065	Dinas Pendidikan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat kat Daerah Penang gung-jawab	Lok asi		
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		target	Rp				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat																Pemud a Dan Olahrag a			
		0.00.01.1.09.01.0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	284.557.000	421 Unit	724.450.940	421 Unit	582.246.900	421 Unit	669.583.935	421 Unit	770.021.525	421 Unit	885.524.754		3.916.385.054	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY		
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 unit	48 unit	544.563.100	52 unit	596.753.040	52 unit	887.830.440	52 unit	1.021.005.006	52 unit	1.174.155.757	52 unit	1.350.279.120		5.574.586.463	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY		
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	274 unit	274 unit	58.975.000	376 unit	81.202.800	376 unit	62.066.200	376 unit	71.376.130	376 unit	82.082.550	376 unit	94.394.932		450.097.612	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY		
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97 unit	97 unit	536.697.500	84 unit	454.593.800	89 unit	631.470.900	94 unit	726.191.535	99 unit	835.120.265	104 unit	960.388.305		4.144.462.305	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY		
		0.00.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0 unit	0	1 Unit	15.754.900	1 Unit	36.000.000	1 Unit	41.400.000	1 Unit	47.610.000	1 Unit	54.751.500		195.516.400	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat kat Daerah Penang gung-jawab	Lok asi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	85.000.000	1 unit	97.750.000	1 unit	112.412.500	1 unit	129.274.375		424.436.875	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	24 unit	2.788.591.000	28 unit	4.966.551.600	28 unit	4.879.282.200	28 unit	5.611.174.530	28 unit	6.452.850.710	28 unit	7.420.778.316		32.119.228.356	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		0.00.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian	5.500 siswa	5.500 siswa	6.063.517.101	5.600 siswa	4.130.969.780	5.675 siswa	3.838.129.160	5.775 siswa	4.413.848.534	5.850 siswa	5.075.925.814	5.925 siswa	5.837.314.686	5.925 siswa	29.359.705.075	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	
		0.00.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	3 Unit Kerja	6.063.517.101	4 Unit Kerja	4.130.969.780	5 Unit Kerja	3.838.129.160	5 Unit Kerja	4.413.848.534	6 Unit Kerja	5.075.925.814	6 Unit Kerja	5.837.314.686		29.359.705.075	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	DIY
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	n/a	n/a	0	n/a	0	25%	100.000.000	50%	100.000.000	75%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	
		4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tercapainya implementasi budaya pemerintahan	n/a	n/a	0	n/a	0	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahrag a	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.01.10.5.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	n/a	n/a	0	n/a	0	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	DIY
Total						1.615.480.932.535		1.657.464.352.905		1.848.029.748.393		2.122.002.659.598		2.438.124.567.113		2.801.463.411.592		12.482.565.672.136			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan sasaran kinerja disusun berdasarkan tujuan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran kinerja proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan dalam bidang urusan, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pada bidang urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga periode 2022-2027 yang telah direncanakan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 7.1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Tujuan: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga								
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,64	9,65	9,66	9,68	9,7	9,72	9,72
2	Kesenjangan Numerasi Jenjang SMA	21.91%	21.93%	21.94%	21.96%	21.97%	21.99%	21.99%
3	Kesenjangan Numerasi Jenjang SMK	18.93%	18.95%	18.96%	18.98%	18.99%	19.01%	19.01%
4	Kesenjangan Literasi Jenjang SMA	14.02%	14.04%	14.05%	14.07%	14.08%	14.10%	14.10%
5	Kesenjangan Literasi Jenjang SMK	11.04%	11.06%	11.07%	11.09%	11.10%	11.12%	11.12%
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	65,57	65,59	65,61	65,63	65,65	65,67	65,67
7	Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)
8	Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar
Sasaran: Meningkatnya pemerataan layanan, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan								
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	89,95%	89,97%	89,98%	90,00%	90,01%	90,03%	90,03%
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	50,68%	50,70%	50,71%	50,73%	50,74%	50,76%	50,76%
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	30,81%	30,83%	30,84%	30,86%	30,87%	30,89%	30,89%
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	51,91%	51,93%	51,94%	51,96%	51,97%	51,99%	51,99%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	30,34%	30,36%	30,37%	30,39%	30,40%	30,42%	30,42%
6	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36.42%	36.47%	36.52%	36.57%	36.62%	36.67%	36.67%
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51,30%	51,32%	51,33%	51,35%	51,36%	51,38%	51,38%
Sasaran: Tercapainya pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan								
1	Persentase pemuda bekerja	60.34%	61.84%	63.34%	64.84%	66.34%	67.84%	67.84%
Sasaran: Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan nasional								
1	Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	17 medali	20 medali	22 medali	24 medali	26 medali	28 medali	28 medali
Sasaran: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah								
1	Kategori Reformasi Birokrasi OPD	A	A	A	A	A	A	A

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dalam lima tahun kedepan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY untuk tahun 2022-2027.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksana Renstra Tahun 2022-2027 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY dengan pelaksanaan harian Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan.
2. Perencanaan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga DIY dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.
3. Setiap unit di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (Sekretariat, Bidang, UPT, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota dan Sekolah) agar mempersiapkan rencana/program/kegiatan, melaksanakan, mengendalikan dan menyusun laporan dengan cermat, tertib dan akuntabel.
4. Dalam mempersiapkan rencana/program/kegiatan tersebut, setiap unit di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY (Sekretariat, Bidang, UPT, Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota dan Sekolah) agar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing harus mengacu dan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Dikpora DIY Tahun 2022-2027.
5. Untuk keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan penguatan peran *stakeholder* baik dalam persiapan maupun pelaksanaannya.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2022-2027 dilakukan pemantauan dan evaluasi:
 - a) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dilakukan oleh masing-masing unit di lingkungan Dinas Dikpora DIY.
 - b) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seluruh program/kegiatan dan menyusun laporan.
 - c) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.

Yogyakarta,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dr. DIDIK WARDAYA, SE., M. Pd
NIP 19660503 198602 1 002

2023



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA DIY
Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta